



# w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

## Dampak dan Perubahan Reorganisasi Vertikal

# DJBC



\*juga masuk dalam program Tim Penguatan Reformasi

Simplifikasi Prosedur

Program Sinergi antara **DJBC** dan **DJP**

"SINGLE IDENTITY NUMBER"  
(Nomor Identitas Tunggal)

Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2017**

1. NPWP = *Single Identity Number*.
2. NIK dan Nomor Pokok PPJK dihapuskan.
3. Portal Registrasi Kepabebean ditambahkan melalui portal INSW dan portal DJBC.
4. Waktu Layanan 5 Hari kerja --> 1 Hari kerja (sejak permohonan diterima lengkap).
5. Pengguna Jasa lebih taat aturan.

**Single Identity Number** dapat mencegah kenakalan wajib pajak yang mengelabui data perpajakan dengan memanfaatkan aktivitas ekspor-impor

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI



"SINGLE"  
YANG GAK  
SENDIRIAN

# DARI REDAKSI

**D**alam rangka mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC. Penataan organisasi Instansi Vertikal DJBC yang tertuang pada PMK 188/PMK.01/2016 merupakan upaya DJBC dalam merespon dinamika lingkungan organisasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal agar dapat menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi. Selengkapnya terkait reorganisasi DJBC dapat anda baca di rubrik laporan utama edisi Maret 2017.

Pada rubrik feature, tim redaksi akan mengulas fasilitas pengawasan yang ada sejak tahun 2015 di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yaitu Main Control Room (MCR). MCR merupakan ruang kendali yang difungsikan sebagai sara pendukung sistem pengawasan di bidang ekspor dan impor yang dalam pengoperasiannya dikelola oleh bidang penindakan dan penyidikan, dimana MCR ini juga memiliki beberapa sistem yang saling terintegrasi dengan sistem yang ada di KPU Tanjung Priok.

Pada rubrik reportase, tim redaksi telah menyediakan 3 laporan menarik yang mengulas inovasi yang dilakukan KPPBC TMP C Kotabaru, kontribusi Industri Kecil dan Menengah di daerah Nusa Tenggara Barat, dan mengulas perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia yang terbentuk pada 29 Februari 2016.

Di rubrik Sejarah, tim redaksi mengulas tentang perkembangan seragam Bea Cukai dari Generasi ke Generasi. Menilik sejarah, bersumber dari Bagian Organisasi Tata Laksana (OTL), Sekretariat DJBC seragam bea cukai sudah berubah berkali-kali yang dibagi menjadi 6 generasi. Sebagaimana dinamika organisasi, narasumber dari OTL mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan-perubahan lagi menyesuaikan kebutuhan organisasi. Selengkapnya dapat anda baca di rubrik Sejarah.

Tahukan anda varietas jenis mutiara yang beredar di Indonesia ternyata beraneka ragam, berasal dari lokasi yang berbeda dan harganya pun beragam pula. Yang paling populer adalah mutiara Laut Selatan (mutiara lombok), mutiara Akoya, dan mutiara Tahitian yang merupakan mutiara premium dan bernilai tinggi. Sedangkan mutiara air tawar yang mendominasi pasar menawarkan jenis mutiara yang menarik dan harganya pun terjangkau. Selengkapnya tentang mutiara dapat anda baca di rubrik berbagi pengetahuan.

Kami menantikan kontribusi aktif Anda untuk kemajuan Majalah WBC. Kritik dan saran yang membangun, serta kiriman materi berupa artikel dan foto selalu kami tunggu tiap bulannya. Untuk dapat berkontribusi jangan lupa kirimkan tulisan untuk beberapa rubrik WBC dan foto untuk Galeri Foto Anda ke [warta-beacukai@gmail.com](mailto:warta-beacukai@gmail.com)

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke [majalah.wbc@customs.go.id](mailto:majalah.wbc@customs.go.id) dan [wartabeacukai@gmail.com](mailto:wartabeacukai@gmail.com) dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

## ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur  
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822  
e-Mail : [wartabeacukai@gmail.com](mailto:wartabeacukai@gmail.com) dan [majalah.wbc@customs.go.id](mailto:majalah.wbc@customs.go.id)

Follow: [@Warta\\_BeaCukai](https://www.facebook.com/Warta_BeaCukai) [WartaBeaCukai](https://www.facebook.com/WartaBeaCukai)



**warta**  
**bea cukai**  
Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

## DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Heru Pambudi, S.E., LLM

## PENASEHAT

## SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI

Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

## DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.

## DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

Robi Toni, S.E., M.M.

## DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

## DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN

Ir. Rahmat Subagio, M.A.

## DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A

## DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL

Hendra Prasmono, S.H., M.IH

## DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

Muhammad Sigit, Ak, MBA

## DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Ir. Harry Mulya, M.Si

## DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si.

## TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Dwijo Muryono

## TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI

Dwi Teguh Wibowo, S.E.

## TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

## KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Ir. Agus Hermawan, MA

## PENGARAH

## DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA

DR. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA

## PEMIMPIN REDAKSI

## KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI

Deni Surjantoro

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

## REDAKTUR

Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Sumardian Wahyudiati, Muparrih, Jiwo Narendro P, Zulfaturrahmi

## FOTOGRAFER

Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira, Irfan Nur Ilman

## REPORTER

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya.

## SEKRETARIAT

Indah Widaryati, Rudi Andrian

## ◆ DAFTAR ISI

### 4 .....EVENT

### 6 .....PROFIL KANTOR



- 6 Bea Cukai Ketapang: "Bekerjalah Diatas Rata-rata"

### 9 .....PERATURAN

- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

### 10 .....KEBIJAKAN



- 10 Mengenal Kelas dan Tipologi Instansi Vertikal DJBC Melalui Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/BC/2016 Tentang Pedoman Penataan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Instansi Vertikal DJBC

### 16 .....REPORTASE



- 16 KPPBC TMP C Kotabaru: Prioritaskan Stakeholder Melalui Pelayanan Online
- 20 KPPBC TMP C Mataram: KITE IKM EKSIS, PENGUSAHA OPTIMIS
- 24 PERAKI Awali Kegiatan 2017 Dengan Seminar

### 26 .....LAPORAN UTAMA



- 26 Dampak dan Perubahan Reorganisasi Vertikal DJBC
- 27 Impact and Changes on DGCE Vertical Reorganization

### 38 .....WAWANCARA



- 38 Sekretaris DJBC - Kushari Suprianto: Reorganisasi Vertikal Mengoptimalkan Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

### 42 .....FEATURE



- 42 Adanya Sistem MCR Segala Penyimpangan Terdeteksi Dengan Cepat

**46** ..... **SISI PEGAWAI**



46 Bonar Pardomuan Sitinjak: "Petugas Patroli Bea Cukai Teluk Nibung Kerap Menjadi Sasaran Massa Bayaran"

**50** ..... **RUANG KESEHATAN**



50 Gigi Bungsu, perlukah dicabut?

**52** ..... **HOBI DAN KOMUNITAS**



52 Komunitas Fitness Bea Cukai Bikin Sehat Jasmani dan Rohan

**54** ..... **BERBAGI PENGETAHUAN**



54 Mengetal Ragam Mutiara

**56** ..... **SEJARAH**



56 Seragam Bea Cukai dari Generasi ke Generasi

**58** ..... **OPINI**

58 (BUKAN) REFORMASI KAKI LIMA

**60** ..... **INFOGRAFIS**

**62** ..... **GALERI FOTO**



62 Keindahan Bromo tak pernah membosankan untuk terus dinikmati

**64** ..... **TRAVEL NOTE**



64 Selancar Alam dan Kuliner Ke Pulau Lombok

**70** ..... **BEA CUKAI MENJAWAB**

70 Impor dan Ekspor Sementara Barang Bawaan Penumpang

**71** ..... **RAGAM**

71 untuk bumiku (kita masih membisu)

**72** ..... **KICAUAN**



### **BEA CUKAI JAYAPURA GAGALKAN PENYELUNDUPAN KULIT KAYU MASOI**

**Jayapura** – Semerbak harum kulit kayu masoi (*Cryptocarya massoia*) memang memikat hati. Memiliki aroma wangi yang berasal dari kandungan minyak atsiri, komoditas ini kerap digunakan dalam pembuatan obat dan minyak wangi. Tingginya keuntungan dari tingginya harga kulit kayu masoi yang bisa didapat, menjadikan kulit kayu masoi kerap diselundupkan dari Papua New Guinea (PNG) ke Jayapura. Seperti penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai Jayapura berikut ini.

Petugas Bea Cukai Jayapura, pada Kamis (02/03) menghentikan laju sebuah mobil di Jalan Raya Hamadi, Kota Jayapura. Mobil tersebut diketahui membawa muatan 21 karung kulit kayu masoi, yang berasal dari Kreer Market Wewak Propinse, PNG dengan tujuan Sentani. Turut diamankan dalam penindakan tersebut 3 orang pelaku berinisial BM, NM, dan PK. Keempatnya diketahui membawa kulit kayu masoi menggunakan long boat

untuk menyebrangi perairan perbatasan PNG dan Jayapura.

Terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana penyelundupan, sesuai Pasal 102 Huruf B UU Kepabeanaan, unsur-unsur Tindak Pidana pun telah terpenuhi dan saat ini dalam proses penyidikan.



### **PLBN DIRESMIKAN, BEA CUKAI NANGA BADAU SIAP DORONG EKSPOR DAN TINGKATKAN PENGAWASAN**

**Nanga Badau** - Dalam rangkaian acara peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Nanga Badau, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani yang ikut bersama rombongan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, turut melakukan peninjauan PLBN terpadu Nanga Badau.

Puan yang didampingi oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi berkesempatan melepas 11 truk pengangkut CPO yang akan diekspor ke Serawak, Malaysia. Patut diketahui bahwa dalam periode 2016 hingga Maret 2017 Bea Cukai Nanga Badau telah melayani ekspor CPO lebih dari 67.000 metrik ton.

Dengan modernisasi yang diterapkan di PLBN Nanga Badau tentunya akan dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan pengawasan.

Seperti yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo agar pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya terhadap barang selundupan ditingkatkan. Bea Cukai secara penuh mendukung upaya pengawasan di wilayah perbatasan, salah satunya dengan menerapkan otomasi sistem untuk para pelintas batas.



### **DALAM KURUN WAKTU DUA BULAN, BEA CUKAI ACEH LAKUKAN PENINDAKAN TIGA KAPAL PENGANGKUT BAWANG MERAH ILEGAL**

**Belawan** – Setelah berhasil melakukan penindakan dua kapal penyelundup bawang merah di perairan Aceh di akhir Februari, pada Jumat (03/03) lagi-lagi Bea Cukai Aceh gagalkan satu lagi penyelundupan dengan modus serupa. Kali ini Bea Cukai Aceh berhasil melakukan penindakan terhadap kapal motor KM Baiduri yang membawa 30 Ton bawang merah asal Thailand.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Rusman Hadi, mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan tindak pidana penyelundupan impor dengan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Penangkapan KM. Baiduri kali ini menambah panjang daftar penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Aceh. Sebelumnya, Bea Cukai Aceh telah melakukan penindakan terhadap KM. Jasa Ayah yang mengangkut 15 ton Bawang Merah, dan KM. Jasa Ibu yang mengangkut 30 ton Bawang Merah ilegal.

### **SINERGI BEA CUKAI DAN BNN BONGKAR SINDIKAT NARKOBA JARINGAN TIONGKOK DI MEDAN**

**Jakarta (07/03/2017)** – Petugas gabungan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara mencokok sindikat penyelundup narkoba jaringan Tiongkok di Medan pada Rabu (01/03). Dari penangkapan ini petugas gabungan

berhasil mengamankan 48,1 Kg sabu, 3.702 butir ekstasi, dan 454 butir *happy five*. Selain barang bukti di atas, petugas juga mengamankan 3 mobil dan 25 telepon genggam beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebuah timbangan. Para tersangka diduga telah melanggar Pasal 114 ayat 2 j.o. Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat 2 j.o. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

Penangkapan ini menambah panjang daftar penindakan narkoba di seluruh Indonesia, di mana sepanjang tahun 2015 hingga 2017 Bea Cukai telah menindak 497 kasus dengan barang bukti yang diamankan sebesar 2.125,72 Kg. Daftar di atas tidak hanya menunjukkan keberhasilan kinerja aparat penegak hukum semata, namun juga menjadi motor penggerak kewaspadaan semua pihak untuk membendung peredaran narkoba.



### **INTERNALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**

**Malang** - “Seberapapun penghasilan, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan, namun tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup”. Istilah tersebut memang benar dan berlaku bagi kehidupan manusia termasuk pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Istri, selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga merupakan orang yang berperan besar di balik kesuksesan suami sekaligus memiliki fungsi kontrol atau pengendalian terhadap kehidupan suami. Dalam rangka memperkuat fungsi pengendalian yang dimiliki oleh istri para pegawai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Budaya Anti Korupsi (Audit Life Style). Bertempat di Aula Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II (27/03), acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Bapak Nirwala Dwi Heryanto.

Acara diikuti oleh seluruh istri pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang tergabung dalam Dharma Wanita. Pada kesempatan ini, disampaikan materi tentang Audit Life Style oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Kemudian, disampaikan juga materi tentang Perencanaan Keuangan Keluarga untuk Meningkatkan Integritas dan Produktifitas Pegawai oleh Ibu Ririn Septiani, dari Kantor Pusat DJBC. Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan semakin meningkatkan peran istri sebagai kontrol dan pengendalian terhadap suami khususnya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah melakukan tindakan korupsi.



### **BEA CUKAI PEDULI, BANTU KORBAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI SUMATERA BARAT**

**Teluk Bayur** – Banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sejak 3 Maret 2017 menyebabkan rusaknya berbagai infrastruktur hingga menelan korban jiwa. Sebanyak 8 kecamatan yang meliputi kecamatan Pangkalan, Kapur IX, Mungka, Harau, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Sulikik, dan Empat Barisan dan 13 nagari terkena langsung dampak banjir dan longsor.

Percepatan pemulihan kondisi pasca bencana terus dilakukan pemerintah Sumatera Barat. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Bea Cukai Teluk Bayur turut memberikan bantuan dalam bentuk bantuan paket sembako, dan paket peralatan alat sekolah, serta paket selimut.

Pada Kamis (09/08) Bea Cukai Teluk Bayur memberikan bantuan berupa 1.500 paket sembako, paket peralatan belajar/perlengkapan alat tulis sekolah, dan paket selimut. Bantuan ini diharapkan dapat meringkankan kesulitan yang sedang dialami oleh warga yang terkena bencana.





## BEA CUKAI KETAPANG “BEKERJALAH DIATAS RATA-RATA”



Menjadi moto kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Ketapang. Dijelaskan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, **Casman**, maksud dari motto itu adalah apabila saat kinerja kita sedang turun masih berkualitas minimal masih rata-rata. “Jadi dimanapun kita jangan sampai membiarkan diri kita sampai drop, sehingga banyak yang menghancurkan diri sendiri di tempat jauh.”

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Ketapang adalah satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Kantor Bea Cukai Ketapang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 425 Kompleks Pelabuhan Sukabangun Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Ketapang meliputi dua Kabupaten dengan total luas wilayah sekitar 3,5 Ha yang terdiri dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Juga memiliki Kantor Bantu Kendawangan (Pelabuhan Laut)



dan 2 pos pengawasan yaitu Pos Pengawasan Teluk Melano dan Pos Pengawasan Teluk Batang

Penerimaan Kantor Bea Cukai Ketapang tahun 2016 mencapai 25,63 Milyar Rupiah dengan rincian Bea Masuk 25,16 Milyar, Bea Keluar 19,5 Juta, dan Cukai 459,2 Juta. Dengan pegawai berjumlah 16 orang, kantor ini bisa terbilang kecil baik dari fisik, SDM, sarana prasarana maupun kegiatan pelayanan dan pengawasannya. Meskipun begitu keberadaan Kantor Bea Cukai Ketapang ini penting karena mengawasi salah satu perusahaan smelter mineral jenit Bauksit terbesar di Asia Tenggara yang bertujuan untuk ekspor.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT WHW, perusahaan yang mengolah bauksit mentah menjadi alumina dalam kawasan pabean. Jaraknya 2 jam perjalanan dari kantor, Kantor Bea Cukai Ketapang mencoba menempatkan pegawai di sana khusus untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor mereka untuk meminimalisir waktu dan biaya jikalau bolak-balik. Selain itu karena di sini banyak juga kebun sawit, importasi pupuk pun dilayani di Kantor Bea Cukai Ketapang.

Walaupun kegiatan pelayanan yang dilakukan sehari-hari tidak banyak tetapi objek pengawasan yang terletak cukup jauh dari kantor dan kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri. Tantangan lain yang biasanya dihadapi oleh kantor yang minim kegiatan adalah timbulnya kejenuhan/kebosanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Casman,

membentuk Customs Ability Sharing Team (CAST) yaitu forum peningkatan kompetensi pegawai di Kantor BC Ketapang.

“Jadi saat menerima pegawai saya yakin bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan/kompetensi yang unik sehingga saya mencari cara untuk membangkitkan kompetensi

ini supaya berbuat lebih baik untuk institusi.”

Menurutnya sistem yang dijalankan di sini adalah *sharing not teaching*, karena Casman merasa tidak ada yang lebih hebat diantara seluruh pegawai termasuk dirinya. “Mereka ini (pegawai) seperti puzzle yang harus saya susun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu gambaran yang lebih bagus. Saya berpikir bagaimana memancing mereka untuk memantaskan diri untuk tugas mereka, meningkatkan kemampuan bekerja mereka.”

Selain itu juga Casman menganggap bahwa Kantor Bea Cukai Ketapang merupakan miniatur dari kantor-kantor yang lebih besar. Yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang ada di kantor besar diadaptasi disesuaikan dengan kondisi di Bea Cukai Ketapang. Kegiatan-kegiatannya skala kecil lebih untuk menambah soft skill, seperti ada miniatur Bapors (Badan Pemuda Olah Raga dan Seni) dengan kegiatan seperti beladiri, menembak, musik band dan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dengan kegiatan seperti sharing agama setiap hari senin pagi.

“Saya juga yakin mereka bukan pegawai Kantor Bea Cukai Ketapang tapi pegawai Kantor Bea Cukai Indonesia sehingga kemampuannya harus sama dengan pegawai bea cukai lainnya jadi tidak kaget kalau ditanya, ‘ngapain sih bikin seperti ini?’”.

Ini beberapa quote yang menginspirasi Casman untuk berbuat lebih di kantor ini. Salah satunya,

*It doesn't matter how many resource you have, if you don't know how to use them it will never be enough.* Casman tidak menginginkan ada pikiran “Kita tidak bisa begini karena SDM begini begitu, tapi SDM yang ada tidak dioptimalkan kompetensinya sehingga mereka bisa berbuat lebih. Dua orang yang mempunyai kompetensi bagus lebih baik daripada 10 orang yang tidak memiliki kompetensi.”

Quote lain yang juga disukainya adalah *The problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem.* Salah satu penyakit yang dirasakan di kantor-kantor kecil atau saat si pegawai mutasi ke tempat-tempat yang jauh, banyak yang merasa kalau dibuang. “Padahal menurut saya tidak, teman-teman dipilih, karena dipilih itu maka juga harus menyesuaikan keinginan yang memilih.”

Dalam melakukan kegiatan pengawasan Kantor Bea Cukai Ketapang memperkuat *surveillance*. Juga, menguatkan pemetaan lokasi seperti posisi importir dimana, eksportir dimana. Satu lagi juga dilaksanakan yaitu dengan menggunakan aplikasi CCTV semacam *monitoring room* tapi belum sekompleks itu dan kegiatan rutin operasi pasar.

Pelayanan paling utama dari Kantor Bea Cukai Ketapang adalah kegiatan ekspor. Dari tahun 2013-awal 2014 dominan kegiatan ekspor. Akan tetapi tahun 2015 hingga sekarang banyak importasi. Rata-rata per tahun hanya ada 11 dokumen.

Dijelaskan oleh Kepala Sub Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan, **Sulaiman**, bahwa di Ketapang tren dokumen pelayanan bukan karena event atau kebijakan tapi lebih seperti, baru tidaknya perusahaan tersebut. “Seperti tahun 2014-2015 itu ada perusahaan-perusahaan baru yang sedang tahap pembangunan sehingga dokumennya banyak importasi. Karena sekarang perusahaan itu sudah produksi sehingga hanya impor bahan baku penolong saja.”

Ditambahkan oleh Casman bahwa memang paling banyak pelayanan ekspor dibanding impor dan

## ◆ PROFIL KANTOR



banyak perusahaan menggunakan fasilitas BKPM sehingga mereka memang banyak menggunakan impor untuk barang-barang modal.

Terkadang dalam bekerja Kantor Bea Cukai tentu tidak lepas dari instansi lain seperti saat melakukan *boatzoeging*. Bea Cukai juga tergabung dalam pelayanan 1 atap dalam memberikan pelayanan bersama yang didalamnya ada 7 instansi lain seperti Karantina, Imigrasi, Kepolisian, dan Tentara. Bea Cukai Ketapang juga bergabung dalam Kominda.

Selain itu juga dalam menjaga hubungan dengan stake holder, rutin diadakan *coffe morning*, dan dengan menggunakan teknologi saat ini seperti aplikasi whatsapp grup atau mailing list untuk memudahkan komunikasi. Kantor Bea Cukai Ketapang juga melakukan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau perusahaan baru. "Di sini ada beberapa perusahaan yang sedang berkembang dan itu kita coba asistensi dengan pola jembut bola. Awalnya pertama mereka memang datang ke sini untuk bertanya, selanjutnya kami jemput bola, tujuannya jelas

selain karena memang tugas kita revenue collector juga industrial assistance."

Sebagai Kepala Kantor tentu Casman memiliki harapan tersendiri, dari beberapa pengalamannya berkeliling bahwa pengembangan kompetensi pegawai tidak bisa jika hanya di-handle sepenuhnya oleh pusat. Jadi Casman ingin setiap-setiap kantor yang punya kepala satker mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi individu tiap anak buahnya. "Memang sudah ada DKI (Dialog Kinerja Individu) tapi itu lebih untuk IKU. Ini inginnya lebih berkembang dari DKI itu. Bagaimana mereka mempersiapkan menjadi yang terbaik dimanapun mereka bertugas."

Casman secara pribadi juga ingin tim CAST ini dipergunakan oleh kantor-kantor lain di Indonesia dan saling *connecting*, *sharing* bukan hanya per kantor tapi antar kantor. Sehingga bisa mengetahui mana sih teman-teman yang kompetensi dan semangatnya tinggi.

"Ujungnya apa? Jadi nanti pusat akan mendapatkan input data bahwa si pegawai ini rajin tapi penempatannya di Papua, pojok dan dia masih bisa berkembang. Sebaliknya, si pegawai satunya lagi agak kurang rajin tapi penempatannya di priuk sehingga dengan adanya pengetahuan itu bisa membantu pusat untuk mengambil keputusan berikutnya untuk menempatkan "The Right Man on The Right Place". Arah kedepan untuk pengembangan kompetensinya karena tidak mungkin pusat tau sedalam-dalamnya internal kinerja pegawai itu bila tidak diberitahukan dari satker itu sendiri."

(DesiAPrawita)



## **PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.**

**D**alam rangka menyempurnakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.010/2005 mengenai Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan penyeragaman pelaksanaan pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan barang impor eks fasilitas KK/PKP2B, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PMK KK/PKP2B).

Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam PMK KK/PKP2B, antara lain:

1. Latar belakang diterbitkannya PMK tersebut, antara lain :
  - a. Beberapa materi dalam PMK nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sudah tidak relevan atau bertentangan dengan peraturan lainnya;
  - b. Peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemindahtanganan barang *eks* Kontrak Karya/ PKP2B hanya dalam bentuk Surat Edaran (SE) Dirjen Bea dan Cukai, yaitu:
  - c. Pemindahtanganan : SE - 31/BC/2003
    - ◆ Ekspor Kembali: SE - 14/BC/2003 (PKP2B) dan SE-24/BC/2003 (KK)
    - ◆ Pemusnahan : belum ada peraturannya.
  - d. Belum seragamnya pelaksanaan pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan barang impor eks fasilitas Kontrak Karya /PKP2B di beberapa Kantor Pabean.
2. Tujuan Penyusunan PMK Tentang KK/ PKP2B yaitu:
  - a. adanya harmonisasi peraturan yang terkait dengan peraturan pembebasan fasilitas perpajakan dan kepebeanaan atas impor barang dalam rangka KK/ PKP2B dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - b. adanya payung hukum yang mengatur mengenai ijin Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, dan Pemusnahan barang impor dalam rangka KK/ PKP2B.
3. Hal-hal pokok yang diatur dalam PMK tersebut, antara lain :
  - a. pemberian fasilitas masterlist Pembebasan BM Dan PPN atas impor barang eks KK/ PKP2B tetap diterbitkan oleh BKPM, sedangkan pemberian izin Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, dan Pemusnahan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean;
  - b. atas impor barang dalam rangka KK/ PKP2B akan diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pembebasan PPN untuk KK/ PKP2B yang kontraknya mencantumkan klausula mengenai pembebasan PPN atas impor barang dalam rangka KK/ PKP2B;
  - c. fasilitas kepebeanaan akan diberikan dalam bentuk pembebasan atau keringanan bea masuk untuk KK/ PKP2B yang kontraknya mencantumkan klausula mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK/ PKP2B;
  - d. importasi barang dapat dilakukan dalam keadaan terurai, sepanjang elemen data jenis barang yang tercantum dalam masterlist memuat data secara terperinci atau terurai;
  - e. pemindahtanganan dapat dilakukan setelah barang eks KK/ PKP2B digunakan paling singkat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
  - f. pemindahtanganan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun namun kurang dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, fasilitas pembebasan atau keringanan BM dan/atau PPN yang telah diberikan dibatalkan dan kontraktor wajib membayar BM dan/atau PPN yang terhutang; dan
  - g. pemindahtanganan yang dilakukan dalam jangka waktu setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, kontraktor dibebaskan dari pengenaan BM dan/atau PPN yang terhutang.

Nb : Peraturan dapat dilihat di [peraturan.beacukai.go.id](http://peraturan.beacukai.go.id)

# **MENGENAL KELAS DAN TIPOLOGI INSTANSI VERTIKAL DJBC MELALUI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-35/BC/2016**

## **TENTANG PEDOMAN PENATAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DJBC**

*“Mas, kenapa sih Bea Cukai kantornya banyak tipe? Gimana sih kok bisa jadi begitu?”* tanya seorang rekan kerja ketika saya sedang makan siang di kantin basement Gedung Papua.

Menata kantor, mungkin adalah tipe pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan di setiap Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah maupun instansi swasta lainnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu bagian dari instansi pemerintah yang selalu melakukan penataan organisasi dalam rangka merespon lingkungan yang dinamis dan strategis.

Penataan organisasi adalah hal mutlak yang wajib dilakukan DJBC, mengingat peran DJBC dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai mengharuskan DJBC melakukan pengawasan dan pelayanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah *border* dan *remote area*.

Salah satu upaya DJBC untuk mewujudkan penataan organisasi yang ideal adalah melalui pembentukan peraturan penataan organisasi untuk memberikan arah dan acuan bagi DJBC dalam melakukan penataan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, prosedur dan ketentuan yang berlaku; untuk memastikan bahwa setiap melakukan penataan organisasi tidak mengutamakan kepentingan unit organisasi masing-masing, tetapi mengutamakan kepentingan organisasi DJBC secara keseluruhan; dan untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan administrasi kepabeanan dan cukai serta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC dalam rangka mewujudkan *good governance*. Atas dasar itu, maka lahirlah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2016 tentang Pedoman Penataan, Monitoring, dan Evaluasi Organisasi Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2016 adalah peraturan yang memberikan gambaran mengenai dasar yang menjadi pembeda setiap Kantor Instansi Vertikal DJBC. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat kita pahami bersama bahwasanya instansi vertikal DJBC terbagi menjadi Kantor Wilayah dan Kantor

Pelayanan. Kantor Wilayah DJBC terbagi menjadi 2 tipologi yakni Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Wilayah DJBC Khusus. Sedangkan, Kantor Pelayanan DJBC dibagi berdasarkan kelas dan tipologi.

**Kelas** adalah **pengelompokan organisasi Instansi Vertikal DJBC** berdasarkan pada **beban kerja** yang terbagi dalam:

1. **Kelas Utama** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang memiliki beban kerja tinggi seperti volume ekspor dan impor yang sangat besar di bidang Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, dan kawasan khusus (FTZ, KEK, dan lain sebagainya).
2. **Kelas Madya** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai di pelabuhan, bandar udara, dan fasilitas kepabeanan dengan tingkat beban kerja menengah hingga tinggi.
3. **Kelas Pratama** melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai di pelabuhan, bandar udara, dan fasilitas kepabeanan dengan tingkat beban kerja (volume) yang rendah dibandingkan dengan Kelas Utama dan Kelas Madya.

**Tipologi organisasi instansi vertikal DJBC** ditetapkan **berdasarkan atas penilaian terhadap kegiatan** di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh instansi vertikal DJBC. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan **karakteristik jenis, sifat tugas, dan lingkungan organisasi**. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam penetapan instansi vertikal ke dalam tipologi organisasi.

1. **Kantor Pelayanan Utama**, yang terdiri atas **3 (tiga) Tipologi**, yaitu Tipologi A (Pelabuhan Laut), Tipologi B (Fasilitas Kawasan Khusus), dan Tipologi C (Pelabuhan Udara);
2. **Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai**, yang terdiri atas **5 (lima) Tipologi** Madya yaitu Tipologi Madya Pabean (dominasi Pelabuhan dan Bandar udara), Madya Cukai (dominasi Cukai), Madya Pabean A (dominasi Fasilitas Pabean), serta Madya Pabean B dan C (Pelabuhan, Bandar udara dan Fasilitas Pabean dengan skala berurutan di bawah Madya Pabean dan Madya Pabean A)

Adapun setiap kelas dan tipologi instansi vertikal dapat dideskripsikan dengan karakteristik dominan di dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan cukai, yang digambarkan melalui tabel 1 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Dominan Kegiatan Kepabeanan dan Cukai

Kelas	Tipologi	Karakteristik Dominan Kegiatan Kepabeanan dan Cukai
Utama	KPU A	Pelabuhan Laut, Beban Kerja Sangat Tinggi
	KPU B	Kawasan Khusus, Beban Kerja Sangat Tinggi
	KPU C	Pelabuhan Udara, Beban Kerja Sangat Tinggi
Madya	TMC	Cukai Hasil Tembakau, Beban Kerja Tinggi
	TMP	Pelabuhan (Laut dan/atau Udara), Beban Kerja Tinggi
	TMP A	Fasilitas Kepabeanan, Beban Kerja Tinggi
	TMP B	Pelabuhan (Laut dan/atau Udara), Fasilitas Kepabeanan, Beban Kerja Sedang
	TMP C	Pelabuhan (Laut dan/atau Udara), Fasilitas Kepabeanan, Beban Kerja Rendah
Pratama	Pratama	Pelabuhan (Laut dan/atau Udara), Fasilitas Kepabeanan, Beban Kerja Sangat Rendah

## ◆ KEBIJAKAN

Agar lebih jelas, dapat digambarkan melalui matriks perbandingan berdasarkan kelas dan tipologi pada tabel 2 berikut:

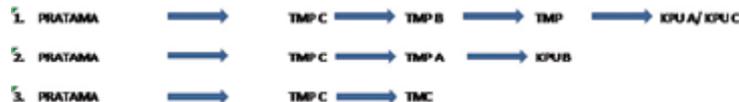
Tabel 2. Matriks Perbandingan berdasarkan Kelas dan Tipologi

Matriks Analisis Organisasi	Karakteristik					
	Pelabuhan	Bandara	Fasilitas Pabean	Cukai	Penerimaan	
TIPOLOGI	KPU A	+++++		+++	+++	+++++
	KPU B	+++	+++	+++++	+++	+++++
	KPU C		+++++	+++	+++	+++++
	TMC	+	+	++	+++++	+++++
	TMP	++++	++++	++++	++++	+++++
	TMP A	+++	+++	+++++	+++	++++
	TMP B	+++	+++	+++	+++	+++
	TMP C	++	++	++	++	+++
	TP	+	+	++	++	++

Berdasarkan kelas dan tipologi tersebut, terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses perubahan tipologi dan kenaikan kelas yang dapat digambarkan sesuai Bagan Alur Perubahan Tipologi dan Kenaikan Kelas di Lingkungan Instansi Vertikal DJBC sebagaimana gambar 1:

Gambar 1. Alur Perubahan Tipologi dan Kenaikan Kelas Instansi Vertikal DJBC

Melalui pembagian Kantor Pelayanan berdasarkan kelas dan tipologi, Sekretariat DJBC secara rutin melakukan



monitoring dan evaluasi (monev), dengan tujuan untuk: meneliti dan menganalisis efektivitas proses dan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi, dan menemukan faktor yang mempengaruhi efektivitas unit organisasi. Berdasarkan hasil monev, maka dilakukan penilaian performa kantor. Penilaian performa kantor dilakukan melalui metode kuantitatif agar penataan kantor instansi vertikal DJBC sesuai dengan prinsip-prinsip penataan organisasi dan mampu terukur secara objektif serta memenuhi asas keadilan.

Didasari pada pelaksanaan monev organisasi tahun 2015, maka dilakukan penilaian performa kantor baik Kantor Wilayah DJBC maupun Kantor Pelayanan. Setiap tahunnya, pelaksanaan monev dilakukan dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan monev tahun 2015 tersebut dilakukan dengan **tema penguatan pengawasan DJBC** dan dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Nawacita, RPJMN (KEK, Kapet, dan lain sebagainya), UU ASN, MP3EI (koridor ekonomi). Adapun hasil penilaian performa kantor dapat dilihat pada gambar 2.

**Analisis Organisasi Unit Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**



**1. Kantor Wilayah**

Warna merah menunjukkan unit kerja tersebut layak diusulkan untuk reorganisasi

Kantor	Index	Skor	Penempatan				Kantor Bantu dan Pos	Kabupaten dan Kota	Mitra Kerja	Perbatasan Darat	Penerima Fasilitas Cukai	Penerima Fasilitas Pabean	Proyek Strategis	Anggaran Operasional	Dana Alokasi Umum
			001	001	001	001									
Makassar	1	600			24%	77	64	30	*1	68	0	*7	69%	32%	
Sulawesi	2	520			39%	86	80	37	-0	226	5		16%	14%	
Sumatera Bagian Selatan	3	520			11%	50	60	42	-0	85	25	+1	50%	30%	
Jateng DIY	4	400		25%		50	41	15	-0	400	153	0	47%	11%	
Bali NTB NTT	5	460				77	43	22	*1	1,049	12	+3	33%	7%	
Kalimantan Bagian Barat	6	430			15%	37	29	15	*1	58	2	+5	31%	6%	
Jawa Barat	7	430	100%			31	27	11	-0	295	636	-0	40%	9%	
Jatim I	8	390		87%		54	17	10	-0	371	143	-0	36%	2%	
Jatim II	9	390		27%		42	24	10	-0	342	14	-0	31%	5%	
Kalimantan Bagian Timur	10	350			13%	56	29	19	*1	30	4	+4	10%	6%	
Sumatera Utara	11	340				40	27	10	-0	89	53	+2	39%	1%	
Banten	12	330					8	9	-0	41	222	+1	14%	7%	
Riau Sumbar	13	270			7%	68	35	9	-0	31	28	-0	57%	0%	
Jakarta	14	200					6	16	-0	815	155	-0			
Aceh	15	230				20	24	9	-0	0	0	-2	70%	1%	
Kepulauan Riau	16	210				37	8	9	-0	34	2	+1	64%		

**2. KPPBC Tipe Pratama**

Warna merah menunjukkan unit kerja tersebut layak diusulkan untuk digabung dengan unit kerja terdekat

KPPBC	Index	Skor	Analisis Beban Kerja										Kantor Bantu dan Pos	Luas Wilayah	Delambuan dan Bendera	Penerima Fasilitas Cukai	Penerima Fasilitas Pabean	Penempatan	Proyek Strategis	
			0	000	000	000	000	000	000	000	000	000								000
Gak Sri Indonesia	1	233	26,290	66%	3	6,275	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan Singkep	2	225	11,965	44%	0	2,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuala Lempang	3	241	26,258	37%	4	8,505	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kali Fax	4	248	12,549	62%	4	11,036	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengalengan Suka	5	250	12,048	67%	3	6,262	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sembu Belalang Padang	6	252	24,690	45%	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiamana	7	262	18,086	77%	2	16,282	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagan Siapiak	8	263	17,333	46%	5	8,882	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maulabeh	9	266	16,364	27%	4	11,064	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jepit Bawang	10	274	15,125	65%	2	15,991	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Selat Panjang	11	275	16,705	64%	0	3,709	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekalongan	12	276	14,378	30%	8	1,671	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nasire	13	284	11,351	45%	1	36,942	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tanempa	14	284	21,824	54%	9	2,699	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tulang Agung	15	285	23,625	12%	3	2,200	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ketawang	16	285	16,804	40%	5	16,009	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bengayak	17	289	17,689	63%	0	6,975	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanjung Pandan	18	290	16,540	72%	5	4,801	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bakih	19	290	12,761	71%	3	20,841	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bitar	20	302	25,114	45%	2	1,369	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daye	21	306	17,421	57%	5	6,350	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bak	22	311	16,855	78%	6	16,807	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pengalengan Buan	23	318	30,467	59%	5	21,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lumau	24	321	20,842	69%	6	11,887	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mandauan	25	325	13,966	69%	3	18,210	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tual	26	327	14,338	49%	11	18,485	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumbunama	27	336	23,044	64%	3	8,617	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ronala	28	340	27,098	62%	3	13,311	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Poso	29	352	25,572	70%	6	25,875	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tegal	30	355	27,386	41%	8	3,936	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taukmalaya	31	363	21,080	55%	4	6,335	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siboga	32	371	22,829	55%	6	14,071	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merauke	33	375	15,910	66%	5	127,201	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panyukene	34	402	16,807	62%	4	24,709	9	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nangau Baku	35	404	16,563	67%	3	51,480	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mali	36	404	21,724	59%	3	21,290	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Pos Dasar Baru	37	415	54,813	52%	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesim	38	420	19,500	50%	6	5,752	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumbawa	39	436	21,871	60%	13	14,812	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buang Praku	40	437	19,243	58%	6	81,865	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saunara	41	463	24,702	62%	13	17,267	12	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sangata	42	472	11,704	69%	4	18,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mesure	43	472	30,554	49%	10	5,025	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banyuwangi	44	481	30,297	62%	6	5,752	3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pancolau	45	507	26,137	67%	13	25,123	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kuala Tanjung	46	523	21,324	49%	6	2,859	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Prosohnggo	47	530	28,017	59%	6	8,444	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boonegoro	48	536	19,025	40%	4	4,020	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pematang Siantar	49	546	22,434	60%	4	14,094	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Panarukan	50	572	31,601	58%	11	6,288	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ◆ KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penilaian pada gambar 2 tersebut di atas, terdapat 6 Kantor Wilayah DJBC yang direkomendasikan untuk dimekarkan. Namun, sesuai dengan tema pengawasan, maka Kantor Wilayah DJBC Jateng-DIY (fokus tema penerimaan) tidak diajukan untuk dimekarkan meskipun dari hasil penilaian menunjukkan layak untuk dimekarkan. Sebagai gantinya, diajukan pemekaran untuk Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar dengan mempertimbangkan wilayah pengawasan khususnya perbatasan darat. Atas penilaian tersebut, berdampak pada penambahan 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC dan 1 (satu) Kantor Wilayah DJBC Khusus yaitu Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan dan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara serta Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua.

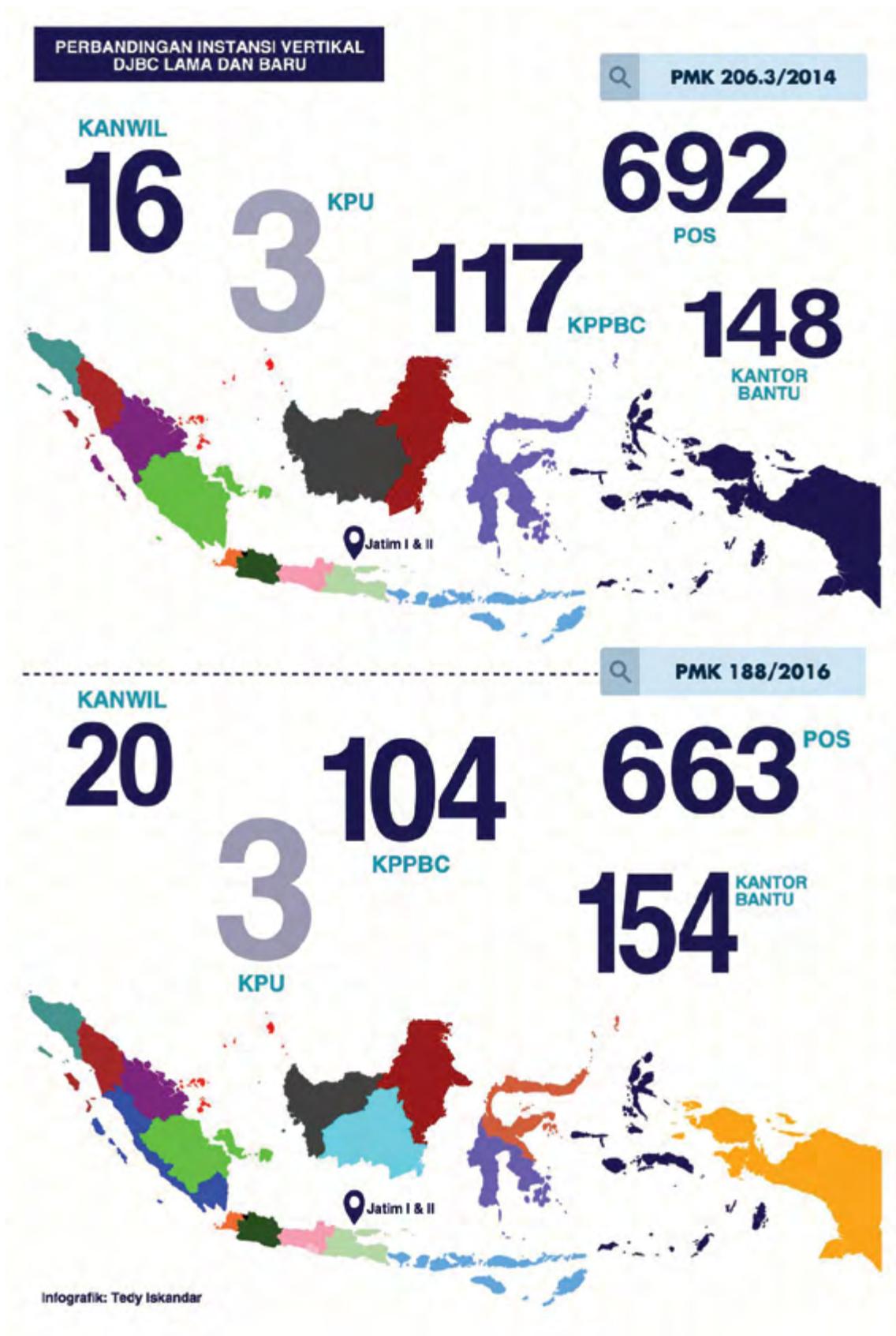
Selanjutnya, dilakukan penilaian performa pada KPPBC Tipe Pratama dalam rangka menjawab tuntutan kebijakan pemerintah yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana berdasarkan UU ASN tersebut, diamanatkan Kepala Kantor minimal diemban oleh Jabatan setingkat Eselon III (Jabatan Administrator). Namun, seperti kita ketahui bahwa KPPBC Tipe Pratama selama ini diemban oleh Kepala Kantor setingkat Eselon IV (Jabatan Pengawas). Penilaian performa kantor tersebut juga sejalan dengan monev organisasi tema pengawasan, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KPPBC Tipe Pratama adalah KPPBC yang mengawal pengawasan di wilayah *border* dan *remote* di Indonesia. Dari hasil penilaian, diketahui bahwa sebelumnya DJBC memiliki 50 KPPBC Tipe Pratama namun 36 diantaranya mengalami kenaikan kelas menjadi KPPBC TMP C.

Berdasarkan gambar 2, dapat kita lihat bahwa terdapat 15 KPPBC Tipe Pratama yang direkomendasikan untuk dilikuidasi, namun 3 diantaranya yakni KPPBC Meulaboh, KPPBC Kuala Langsa, KPPBC Jagoi Babang diusulkan untuk menjadi KPPBC TMP C. Hal ini sesuai dengan tema pengawasan dan didasari pada pertimbangan posisi strategis KPPBC tersebut dalam mengawal pengawasan yakni: KPPBC Meulaboh mengawal pesisir barat Provinsi NAD, KPPBC Kuala Langsa mengawal pesisir timur Provinsi NAD, dan KPPBC Jagoi Babang yang memiliki posisi strategis dalam mengawal perbatasan dengan Malaysia. Sebagai gantinya, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi, maka KPPBC Tipe Pratama Bajo'e dan KPPBC Tipe Pratama Pomalaa dilikuidasi. Adapun 14 KPPBC Tipe Pratama yang mengalami likuidasi tidak dihilangkan, namun beralih fungsi menjadi Kantor Bantu pada Kantor Pabean terdekat.

Selain melakukan monev dengan tema pengawasan, dilakukan pula monev sesuai dengan usulan penataan organisasi dari Kanwil DJBC Jateng-DIY untuk memecah KPPBC TMP B Yogyakarta karena wilayah pengawasan yang luas, maka sesuai dengan hasil analisis direkomendasikan untuk menghidupkan kembali KPPBC di Magelang yang sebelumnya berfungsi sebagai Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Yogyakarta.

Adapun perbandingan instansi vertikal DJBC sesuai dengan PMK 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC sebagai pengganti PMK 206.3/PMK.01/2014, adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut (gambar 3). **(Penulis Subbagian Organisasi, OTL DJBC)**

Gambar 3. Perbandingan Instansi Vertikal DJBC



## KPPBC TMP C KOTABARU PRIORITASKAN STAKEHOLDER MELALUI PELAYANAN ONLINE

Adanya aplikasi online diharapkan proses bisnis pelayanan dan pengawasan di Bea Cukai Kotabaru dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, transparan dan efisien, baik dari sisi internal Bea Cukai Kotabaru maupun pengguna jasa.

Perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital menandai awal era informasi mengubah cara pandang seseorang menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Adanya teknologi akan membuat perubahan besar, salah satunya mempermudah segala urusan. Namun ada juga sebaliknya justru membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar. Pastinya, perubahan teknologi manual ke arah digitalisasi adalah untuk mempermudah dan memberikan efisiensi.

Sama halnya yang dilakukan KPPBC TMP C Kotabaru. Hingga saat ini terus melakukan perubahan beberapa hal terutama mempermudah proses bisnis kepada pengguna jasa di wilayah pelayanan

KPPBC Kotabaru. Seperti disampaikan Kepala KPPBC TMP C Kotabaru, **Bagus Sulistijono**, bahwa perubahan itu sebagai upaya untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan serta memenuhi arahan pimpinan untuk mewujudkan *reform by location*.

Yang mendasari dilakukannya proyek-proyek perubahan sehingga menghasilkan *quick win* tersebut karena adanya layanan-layanan yang masih bersifat manual yang sampai saat ini belum terdapat aplikasi untuk otomasi maupun digitalisasinya dari Kantor Pusat. Disamping juga mengamati bahwa layanan manual mempunyai frekuensi sangat tinggi dan proses layanannya memerlukan waktu yang cukup lama di sisi pengiriman persuratannya maupun birokrasi di internal Bea Cukai Kotabaru.

Salah satu penyebab lamanya proses layanan adalah kendala jarak dan akses antara Bea Cukai Kotabaru dengan lokasi perusahaan atau kantor pengguna jasa yang sangat berjauhan. Karena itu yang pertama dilakukan pertama kali adalah memetakan dan mengumpulkan

informasi. Berikutnya dilakukan evaluasi mana saja area-area yang mempunyai frekuensi tinggi sampai dengan diperoleh kesimpulan bahwa area dimaksud memang *very important* dan *urgent* untuk dilakukan proyek perubahan. Untuk membuat proyek perubahan dibuatlah tim yang terdiri dari internal pegawai Bea Cukai Kotabaru. Masing-masing berperan aktif untuk mensukseskan proyek perubahan yang telah dicanangkan.

Out put yang dihasilkan oleh Tim Proyek Perubahan berupa aplikasi dan juga simplifikasi SOP baru sedangkan outcome yang dihasilkan adalah terciptanya proses bisnis layanan dan pengawasan yang lebih efisiensi serta keberhasilan melakukan perubahan budaya kerja di pihak pengguna jasa maupun internal pegawai.

"Saat ini kami telah dan akan terus membuat *quick win* sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dicapai, tujuannya adalah bagaimana dalam waktu singkat menyelesaikan hambatan birokrasi yang





muncul sehingga dengan *quick win* tersebut diharapkan proses bisnisnya menjadi lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien dari sisi waktu dan biaya dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan legal formalnya,” papar Bagus yang memiliki obsesi untuk menjadikan Bea Cukai Kotabaru, semakin bermartabat dan terus mendukung upaya Bea Cukai makin baik.

*Output* dari *quick win* tersebut, lanjut Bagus, adalah terciptanya aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Saat ini diketahui ada beberapa sistem komputer pelayanan yang telah dimandatorikan di KPPBC seperti CEISA, manifest online, BC 23 online, namun demikian diluar SKP tersebut sebenarnya masih terdapat layanan manual yang dapat diupayakan untuk dilakukan percepatan. Oleh sebab itu Bea Cukai Kotabaru berinisiatif membuat *quick win* di area-area manual yang dimaksud.

Mengenai aplikasi yang sudah dibuat di Bea Cukai Kotabaru, Bagus mengelompokkannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang diperuntukkan kepada pengguna jasa, yaitu : *ijin muat di luar kawasan pabean yang diajukan secara online, ijin bongkar di luar kawasan pabean yang diajukan secara online, ijin timbun di luar kawasan pabean yang diajukan secara online, redress manifest online, LS Online* (karena Bea Cukai Kotabaru belum terhubung dengan INSW) dan yang sedang dimatangkan adalah *Sosialisasi online*.

Kelompok kedua yang diperuntukkan bagi internal pegawai adalah : *Intranet Bea Cukai Kotabaru dan E-Logbook*. Meski bukan hal

yang baru, intranet sebagai jembatan komunikasi kantor dengan internal pegawai belum ada media. Oleh sebab itu menjadi penting untuk menciptakan intranet di internal kantor Bea Cukai Kotabaru. Secara sederhana intranet ini menjadi pengganti papan pengumuman. “Saya pikir intranet sangat bermanfaat terutama untuk kantor-kantor dengan wilayah pengawasan yang luas dengan banyak pos, akan sangat membantu dalam menyebarkan informasi dari kantor ke seluruh pegawai. Contoh yang mudah menginformasikan daftar pemotongan TKPKN terkait absensi, akan lebih mudah aksesnya jika daftar pemotongan tersebut diupload di intranet. Masing-masing pegawai dapat mengaksesnya dari gadget atau komputernya masing-masing. Tidak perlu datang ke ruangan Sub Bagian Umum atau papan pengumuman.

Kedua adalah proyek perubahan simplifikasi pembuatan log book melalui aplikasi e-logbook. Aplikasi ini memungkinkan pembuat logbook, atasan langsung dari pembuat logbook dan unit Kepatuhan Internal terhubung dalam satu aplikasi dengan fitur pilihan yang meminimalkan user-nya untuk melakukan kegiatan penginputan text sehingga proses reporting dan tabulasi datanya menjadi lebih mudah.

“Outcome dari proyek perubahan tersebut adalah terciptanya layanan kepabeanaan maupun administrasi internal Bea Cukai Kotabaru yang lebih sederhana cepat dan efisien. Namun demikian terdapat outcome yang lebih penting dari itu semua yaitu terciptanya budaya kerja yang baru di sisi pengguna jasa maupun

dari sisi internal pegawai Bea Cukai Kotabaru,” ungkap Bagus yang juga menegaskan, budaya kerja tersebut berupa kesediaan pengguna jasa untuk membuka diri lebih berperan aktif dan lebih proaktif terhadap pemenuhan tugas-tugas kepabeanaan di Bea Cukai Kotabaru sehingga dengan peran aktif pengguna jasa tersebut , tugas-tugas layanan kepabeanaan di Bea Cukai Kotabaru bisa berjalan lebih mudah, lebih transparan dan terkontrol.

Lebih lanjut menurut Bagus, target utama dari proyek perubahan di Bea Cukai Kotabaru adalah bagaimana mengupayakan perubahan budaya kerja di stakeholder internal ataupun eksternal untuk menyasiasi hambatan jarak, sarana dan prasarana serta akomodasi yang ada di lingkungan Bea Cukai Kotabaru. Secara proses bisnis, pelayanan manual dan digital sangatlah berbeda sehingga sisdur di pihak pengguna jasa dan internal di Bea Cukai Kotabaru mengalami perubahan. Perubahan yang terasa adalah pemangkasan beberapa tahapan kegiatan, misalnya konsep surat menyurat, proses *delivery* persuratan dan kurir. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana dengan aplikasi tersebut kita bisa mengorganisir dan menghubungkan pihak-pihak yang benar-benar berkompeten pada percepatan suatu proses bisnis, pihak-pihak tersebut ada di eksternal maupun internal Bea Cukai Kotabaru. Efek yang sangat terasa setelah dimandatorikan sejumlah *quick win* di Bea Cukai Kotabaru adalah sepihnya pengguna jasa yang datang ke Bea Cukai Kotabaru, dari data yang ada secara volume kegiatan hampir tidak ada penurunan

## ◆ REPORTASE

bahkan mengalami peningkatan, namun demikian jumlah pengguna jasa yang datang ke Bea Cukai Kotabaru semakin berkurang, saat ini hanya ada 1 atau 2 orang pengguna jasa perhari, sehingga hampir tidak terdapat antrian.

Dari inovasi yang telah dilakukan Kotabaru, rasanya perlu diacungi jempol dan penghargaan atas prestasi tersebut, sebab beberapa kantor juga telah memanfaatkan aplikasi hasil inovasi Bea Cukai Kotabaru. Tercatat sudah ada beberapa kantor yang mengkloning aplikasi pelayanan online ini antara lain Kantor Bea Cukai Jambi, Mataram, Gresik dan Kanwil Bea Cukai Kalbagtim. Sedangkan dalam waktu dekat yang juga akan mengkloning aplikasi online ini antara lain Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Probolinggo dan Nunukan.

### Sambutan Positif dari Stakeholder

Pada dasarnya setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang sama dalam hal pelayanan, yaitu mengharapkan mereka dilayani secara jujur, terbuka, penuh tanggung jawab, wajar, berkualitas, dan adil. Para pengelola bisnis seharusnya bersikap profesional untuk memberikan yang terbaik buat kepentingan para stakeholdernya dan sikap profesional seperti inilah telah ditunjukkan KPPBC Kotabaru melalui inovasi-inovasi yang tujuannya memudahkan para stakeholder menjalankan bisnisnya dengan mudah tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Berkat inovasi yang telah dilakukan KPPBC Kotabaru kini pengguna jasa sudah bisa merasakan manfaat aplikasi online yang memudahkan stakeholder melakukan bisnisnya. Seperti dikemukakan **Adhiyasa Gunadi, dari PT. Geoservices**, merupakan perusahaan bergerak dibidang surveyor dan verifikasi, salah satu kliennya adalah PT Arutmin sebuah perusahaan tambang batu bara. Yang mana PT Geoservice melakukan verifikasi terkait kualitas dan kuantiti. "Dikarenakan Arutmin adalah perusahaan berkelas internasional jadi tidak ada hambatan, ditambah kami memanfaatkan LS



Bersama para stakeholder.



Sosialisasi LS Online dengan stakeholder.

online. Saya juga konfirmasi ke lokasi-lokasi kerja goeservice di Indonesia, ternyata baru di Bea Cukai Kotabaru saja yang memiliki sistim digital semuanya serba online".

Geoservice, menilai sebagai satu terobosan yang baik, terutama dari segi waktu karena waktu menjadi salah satu faktor cukup penting dalam bisnis. "Ini sangat membantu. Selain dari segi waktu, yang jelas karena satu pintu tidak ada kontak dengan pihak-pihak yang mencari kepentingan sendiri, pelayanan ini satu pintu, langsung ke target, jadi kita tidak perlu *step by step* manual tatap muka."

"Sebelum dionlinekan harus siapkan dokumen sampai final dan agak ribet, harus kontak sana sini. Begitupun saat laporannya jadi harus kontak lagi tatap muka tentunya tidak efisien. Adanya program ini tinggal menginput disistem, orang-orang yang punya kepentingan juga bisa mengakses," tambah Adhiyasa yang mengaku pihaknya memanfaatkan sistem online ini sejak KPPBC Kotabaru mulai memberlakukan sistem online.

Masukan kepada KPPBC Kotabaru ia sampaikan, terkait

dengan adanya isu mengenai royalti. "Mungkin sedikit untuk pengembangan dan juga untuk mengantisipasi mengenai kode NTPN, itu mungkin bisa lebih ditampilkan. Karena setiap royalti kode untuk NTPN berbeda salah satu masukan kami yaitu dalam aplikasi online memasukkan kolom untuk kode NTPN," ujar Adhiyasa.

Sebagai stakeholder dari KPBBK Kotabaru, **Purwanto, mewakili PT. Arutmin Indonesia**, perusahaan pertambangan batubara sekaligus sebagai eksportir, sangat apresiasi atas hadirnya aplikasi online karena sangat terbantu. "Kami lihat Bea Cukai Kotabaru salah satu instansi yang inovatif mengikuti kemajuan teknologi informasi."

KPPBC Kotabaru, lanjut Purwanto, bisa melihat peluang dan memanfaatkannya untuk kenyamanan pengguna jasa terutama dari sisi kecepatan pelayanan. PT Arutmin dalam hal ini memanfaatkan sistem online untuk ijin muat, (Ijin muat online). Ia mengaku, pihaknya sangat terbantu dengan adanya sistem ijin muat online, karena proses pemuatan bisa dilakukan kapan saja, meski verifikasi atau respon harus

menunggu jam kerja. Padahal dari sisi pengusaha waktu adalah uang tidak peduli apakah hari kerja atau libur, karena memang operasional 24 jam. Keterlambatan berarti kerugian yang harus ditanggung pihaknya bahkan harus membayar denda atau yang disebut demurrage. "Alangkah baiknya jika kantor Bea Cukai melayani 24 jam selama 7 hari kerja untuk layanan redress manifest online, karena selama ini respon untuk layanan redress manifest online masih di jam dan hari kerja," ujar Purwanto

Purwanto menyatakan terimakasih dengan adanya sistem online yang sangat inovatif ini sehingga kegiatan ekspor bisa dilakukan setiap saat, dan bisa dilayani oleh Bea Cukai selama 24 jam. Datang ke kantor Bea Cukai hanya tinggal menyerahkan copian berkas dokumen sedangkan prosesnya sudah dilaksanakan secara *online*.

Adalagi masukan yang disampaikan Purwanto berdasarkan pengalamannya, jadi pada saat menginput berkas, ternyata salah dalam mengetik kurang huruf A nya. Keinginan Purwanto pada tampilan layar online saat ia menekan huruf A pada keyboard computer, dari abjadnya saja sudah terekam nama perusahaan dan nomor NPWP-nya sehingga tidak harus mengulang dari awal lagi.

"Kalau sebelumnya kita manual, proses pengajuannya, kita datang ke kantor, mengajukan berkas, tetapi kalau itu benar, kalau ada kekeliruan harus bolak balik lagi apalagi jarak kantor kami ke Bea Cukai Kotabaru 12 kilometer, biaya dan waktu terbuang. Tetapi dengan adanya aplikasi online untuk pelayanan di BC Kotabaru efisiensi biaya dan waktu bisa ditekan," demikian menurut **Fachrozy dari PT. AKR Corporindo**.

Importir bahan baku energi ini sangat mengapresiasi adanya sistem pelayanan online karena selain faktor biaya dan waktu ada beberapa faktor resiko yang bisa dikurangi dalam hal keterlambatan penyampaian dokumen oleh petugas yang mengantarkan berkas.

"Kami rasakan perbedaan sangat jauh dengan adanya sistem online, seperti pengajuan ijin timbun online ataupun PIB online. Dari sisi rekanan seperti agen pelayaran juga pasti sebelumnya ada kendala dalam hal manifest. Untuk mengajukan PIB nya kami menunggu manifest dari si agen. Dengan online ini justru menjadikan itu bukan kendala lagi, karena lebih cepat, bisa dikerjakan malam atau paginya mengerjakan PIB online dan ijin timbun online," ujar Fachrozy.

Bergerak di bidang agensi kapal atau pelayaran, **Farhan Fauzy, dari PT. Indo Dharma Transport** mengungkapkan bahwa perusahaannya memanfaatkan pelayanan untuk ijin bongkar online dan redress manifest online. "waktu tidak terbuang, karena tidak bolak-balik lagi, Kalau dulu kita sering mengantar berkas tengah malam atau subuh, sekarang cukup di kantor saja. Pelayanan RKSP, inward maupun outward jia ada salah harus balik lagi, padahal proses ini lebih peka waktu kalau telat dikit langsung denda. Saya rasa yang dilakukan BC Kotabaru sudah baik," ujar Farhan.

Menurut **Topan dari PT. Segara Utama Karya Exim**, perusahaan PPJK yang memanfaatkan ijin muat online dan LS online merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi online, karena mempersingkat waktu terutama untuk jam-jam sibuk. "Sebelumnya harus ngetik dulu, mengeprint dan scan ulang, kemudian diantarkan ke kantor BC di waktu jam kerja, tetapi adanya ijin muat online waktunya lebih cepat dan lebih efisien, sangat membantu."

Bagi PPJK, tentunya banyak aplikasi yang dimanfaatkan, dalam sehari bisa beberapa kali ke kantor BC, tergantung jika ada ijin muatnya bisa siang menjelang sore. Kalau waktu manual membutuhkan waktu 1-2 hari, sekarang hitungannya cukup dalam jam.

Pendapat juga disampaikan **Awi dari CV Ranu Sunu Hasta**, perusahaan bergerak dibidang PPJK dan selaku kuasa kuasa eksportir dan importir membantu kegiatan

kliennya yang lokasinya jauh dari kantor BC Kotabaru yaitu di Jakarta dan Surabaya sedangkan lokasi tambangnya berada 145 km dari Kotabaru yang harus ditempuh dengan kapal fery. Dalam hal ini Awi memanfaatkan ijin online dan ijin timbun online. untuk kegiatan impor yang selalu ia komunikasikan dengan BC Kotabaru.

Merasakan manfaat pelayanan online seperti waktu penyelesaian dokumen lebih cepat dari sistem manual sebelumnya dan efisiensi waktu dan biaya, karena sudah tidak lagi menggunakan kendaraan, tinggal duduk di depan komputer sudah bisa melakukan perijinan online.

"Yang paling penting adalah bisa dilakukan dimana saja, kita bisa akses di Banjar atau dimana saja, kita bawa flashdisk bisa upload ijin muatnya karena sifatnya online dan bisa mobile, manfaatnya benar-benar bisa kita rasakan," ungkap Awi.

Sama halnya dengan masukan stakeholder sebelumnya, Awi berharap sistem online tidak hanya bisa dilakukan pada jam kerja saja. Sebab seringkali informasi datangnya pada weekend, jumat sore atau malam. Sementara kapal sudah harus mulai dimuat hari Sabtu dan Minggu, ini bisa jadi kendala, artinya eksportir juga memikirkan *demurrage* terkait waktu.

**(Ariessuryantini)**

## KPPBC TMP C MATARAM

# KITE IKM EKSIS, PENGUSAHA OPTIMIS



**Himawan Indarjono**, menyatakan pihaknya saat ini sebatas memfasilitasi keputusan terkait KITE IKM .

**K**ontribusi IKM Indonesia terhadap ekspor nasional dianggap masih relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kontribusi sektor IKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Contohnya saja IKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen.

Dengan diluncurkannya fasilitas KITE IKM oleh Presiden Jokowi di Boyolali Jawa Tengah pada 30 Januari 2017 lalu, diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para pelaku usaha yang bergerak di industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan ekspor. Fasilitas ini untuk membantu IKM dalam menggiatkan sektor usahanya. Insentif fiskal dan kemudahan prosedur yang diberikan juga bertujuan untuk membuat IKM lebih bergairah.

Setelah diresmikan, pemerintah gencar menawarkan fasilitas KITE IKM ke para pengusaha industri kecil dan menengah. Keterlibatan Bea dan Cukai dalam KITE IKM terutama di daerah-daerah untuk mengenalkan KITE IKM perlahan namun pasti mulai menunjukkan hasil. Seperti yang dilakukan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Mataram.

Kegiatan sosialisasi dan 'blusukan' terkait fasilitas KITE IKM giat dijalankan oleh tim dari Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Mataram dan telah membuah hasil. Saat ini terdapat 5 perusahaan mengajukan fasilitas KITE IKM. Satu perusahaan sudah akan terbit Surat Keputusannya dan 4 lagi masih dalam proses melengkapi administrasinya.

Dari data Kementerian Perdagangan, saat ini terdapat kurang lebih 40 pengusaha IKM mutiara dan 200 pengrajin mutiara dengan kegiatan yang bervariasi, ada yang sebagai pembudidaya, pengolah mutiara grade rendah menjadi grade tinggi, pembuat perhiasan dan souvenir dan lain, pengrajin perhiasan untuk dipasangkan mutiara dan lain sebagainya.

Untuk membantu memajukan usaha para pengrajin mutiara yang ada di Lombok, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Mataram, **Himawan Indarjono**, menyatakan pihaknya saat ini sebatas memfasilitasi keputusan terkait KITE IKM .





## REPORTASE

“Bagaimana kita memfasilitasi proses impor para pembudidaya mutiara, baik yang mengimpor nucleus, bibit mutiara maupun mutiara jenis tertentu seperti mutiara hitam dan jenis lainnya.”

dalam rangka membantu pengusaha untuk dapat mengimpor mutiara hitam untuk industri, KPPBC Lombok akan mencoba melakukan terobosan melalui PMK supaya impor mutiara hitam bisa masuk melalui

importasi yang mendapatkan fasilitas dari administrator KEK. Hanya saja perlu diketahui oleh administrator KEK, barang-barang apa saja yang bisa mendapatkan fasilitas KEK karena terkait penerimaan negara. Barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan hotel dan air bersih jangan sampai masuk atau ada penyimpanan, karena itu perlu ada semacam latihan untuk menyamakan persepsi,” imbuh Himawan.



Berbagai jenis perhiasan mulai dari cincin, kalung, bros, liontin dan anting hasil pengolahan.

### Pelayanan Dan Pengawasan KPPBC Mataram

Lebih lanjut Himawan menjelaskan, kegiatan pengawasan dan pelayanan di KPPBC TMP C Mataram meliputi pelayanan kedatangan penumpang internasional di Bandara Internasional Lombok, pemeriksaan dan pembeaan barang kiriman paket pos dari luar negeri, pelayanan kegiatan ekspor, impor, dan cukai, termasuk pelayanan KITE IKM dan KEK. Sedangkan Wilayah kerja KPPBC ini meliputi :

- ◆ Kota Mataram: Kantor Pos Lalu Bea Mataram dan Pelabuhan Udara Selaparang
- ◆ Kabupaten Lombok Tengah: Pelabuhan Udara Bandara Internasional Lombok Praya
- ◆ Kabupaten Lombok Barat: Pelabuhan Laut Lembar
- ◆ Kabupaten Lombok Timur: Pos Pengawasan Labuhan Haji (PL) dan Pos
- ◆ Pengawasan Labuhan Lombok (PL)
- ◆ Kabupaten Lombok Utara: Pos Pengawasan Pemenang (LP)

Kalau dilihat dari sisi penerimaan negara, memang kontribusinya tidak terlalu banyak, paling tidak ada menjembatani pengusaha dalam berinvestasi yang berorientasi ekspor. “Pak Yuna, Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi kami sebagai perwakilan dari Kantor Bea Cukai Lombok turun langsung ke tempat usaha IKM, melakukan penyuluhan, terus-menerus mengajak pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas ini dan untuk memastikan agar perkembangan KITE IKM bisa tetap terupdate,” ujar Himawan yang menyatakan potensi industri IKM mutiara di Lombok sangat besar.

Hanya saja kendala saat ini mengenai impor mutiara hitam ada aturan lartas dari Kementerian Perdagangan dan wilayah Mataram ditunjuk sebagai pelabuhan masuk. Untuk diketahui, mutiara hitam yang diimpor masuk ke wilayah Lombok akan diolah lagi dari grade rendah menjadi grade tinggi. Maka itu

Pelabuhan Mataram. “Tidak seperti sekarang masuk melalui bandara sebagai barang tentengan saja. Mudah-mudahan pangsa pasar kita dapat menjembatani mereka,” ujar Himawan.

Selain kegiatan diatas, di Lombok akan hadir sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Mandalika yang saat ini sudah terdapat 3 investor, antara lain dua perhotelan (Hotel Pullman dan investor dari Korea) dan satu Perusahaan Pengolahan Air Bersih. Dan kegiatan sosialisasi untuk menarik minat investor di KEK akan dilakukan, supaya investor terus bertambah.

“Belum lama ini, Pak Menko Perekonomian datang meninjau KEK di Mandalika dan KITE IKM. Informasinya memang KEK akan segera di-launching, prosesnya sudah 3 tahun, ini tahun terakhir 1 Juli 2017 seharusnya sudah beroperasi namun kenyataannya ini belum. Posisi kita hanya menangani proses

Untuk kegiatan rutin yang banyak membutuhkan alokasi sumber daya dan waktu adalah pelayanan penumpang internasional di Bandara Internasional Lombok dan pemeriksaan terhadap barang kiriman dari luar negeri di Kantor Pos

## ◆ REPORTASE



Mutiara yang akan dijadikan perhiasan.



Proses pengolahan mutiara grade rendah menjadi grade tinggi.



Mutiara yang siap diolah menjadi lebih cantik dan menarik.

Lalu Bea Mataram. Selebihnya kegiatan berfokus ke pelayanan operasional di kantor terhadap para pengusaha ekspor, impor maupun cukai (pengusaha pabrik hasil tembakau). Namun disini lain pengawasan tetap dilakukan secara intens melalui kegiatan operasi pasar, monitoring dan kegiatan intelijen.

Megenai kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor ini, berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2016, diketahui bahwa hasil indeks Kepuasan Pengguna Jasa untuk KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram adalah 4,25 (empat koma dua lima) dalam

skala 5 (lima) dengan kategori "Sangat Puas". Hasil ini lebih baik daripada hasil survey pada tahun 2015 yang mendapat skala 3.98 kategori "Puas". Kenaikan tingkat kepuasan tersebut dikarenakan kerja keras seluruh pejabat dan pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan proses dan penyederhanaan prosedur sehingga masyarakat merasakan ada perbaikan kualitas pelayanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu menurut Kasubsi Pelayanan dan Informasi KPPBC TMP C Mataram, **Putu Yuna Diputra**, terkait KITE IKM, sejak awal telah diupayakan pemetaan untuk mengetahui perusahaan yang berpotensi mendapatkan fasilitas ini. "Kami blusukan berbarengan dengan kegiatan sosialisasi dan ternyata mendapat respon baik. Ada 5 perusahaan yang siap untuk diberikan fasilitas KITE IKM."

Menurut Yuna, yang masih jadi kendala kurangnya pengusaha di Lombok memanfaatkan fasilitas IKM adalah kurangnya kesadaran secara administrasi yang merupakan dasar mereka untuk melakukan usaha dan dasar untuk melakukan kewajiban pajak. "Itu yang menjadi Kendala, secara administrasi belum tertib, seperti ada perasaan khawatir jika mereka melaporkan pajak penghasilan jadi masih belum mau terbuka terutama jumlah penghasilan sesungguhnya.

"Dari sekian banyak pengusaha hanya satu yang patuh untuk laporan pajaknya dan hal seperti ini jadi kendala utama, untuk itu kami membangun kesadaran mereka untuk mulai tertib administrasi dan mengajak pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kami jemput bola, mendatangi para pengusaha walaupun malam-malam karena mereka siangnya bekerja."

"Dari penjelasan kami itu mereka berminat ingin memanfaatkan fasilitas apa saja yang bisa mereka dapatkan kalau mengikuti KITE IKM, kami sampaikan ada dua alternatif, bisa pakai kawasan berikat, atau KITE Konvensional, rencananya kita akan melakukan sosialisasi lagi kalau memang mereka berminat untuk itu,"pungkas Yuna.

### Optimis Dengan Adanya Fasilitas KITE IKM

Sebuah fasilitas yang ditawarkan pemerintah untuk memajukan industrinya, tentunya sangat mendorong minat **Arar**, seorang pembudidaya dan pengrajin mutiara asal Lombok untuk dapat bisa memanfaatkan fasilitas ini. Awalnya bisa tertarik untuk mengajukan Fasilitas KITE IKM kepada Kantor Bea Cukai



Arar berharap dengan memanfaatkan fasilitas KITE IKM produk mutiaranya punya daya saing untuk produk dan harga.

Lombok karena melihat dari pengalaman teman-temannya yang telah lebih dulu memanfaatkan fasilitas ini.

Diceritakan Arar, berawal jika ingin impor mutiara hitam asal Tahiti mengalami kesulitan, termasuk saat membutuhkan nucleus, biasanya melalui distributor Surabaya dan Jakarta, belum lagi kalau sudah masuk ke Indonesia harganya akan lebih mahal. Mutiara hitam yang dibeli oleh para pengrajin di Lombok adalah yang gradenya rendah untuk diolah kembali menjadi berbagai macam perhiasan dan cinderamata sehingga gradenya jadi bisa lebih tinggi dan nilai jualnya bisa bersaing. Kemudian dari segi teknologi, Indonesia termasuk yang tertinggal dalam hal teknologi mesin

“Karena melalui distributor yang tentunya harganya sudah beda, begitu juga kalau mau ekspor mutiara ke luar negeri, kita berpikir kenapa kita tidak langsung saja impor-ekspor tanpa perantara ? itu jadi harapan kami kedepannya, makanya saat ada penawaran fasilitas KITE IKM dari Bea Cukai kami tidak menyia-nyiakannya apalagi dari pengalaman teman kami yang sudah mengikuti KITE IKM,” ujar Arar yang juga pemilik Gallery Ragenda MOP.

Selain adanya fasilitas ini, kami juga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk pengadaan mesin pengolah dan pengasah mutiara yang lebih maju teknologinya yaitu mesin dilengkapi dengan teknologi penyinaran. Saat Menko Perekonomian berkunjung ke sentra industrinya sudah disampaikan bahwa pengrajin dan pembudidaya mutiara kalah dalam hal teknologi terutama untuk mesinnya. Di negara-negara lain sudah menggunakan alat dengan pencahayaan yang berasal dari teknologi Jepang antara 3-4 tahun yang lalu, sehingga mutiara olahan yang dihasilkan lebih bagus lagi kualitasnya terurama dari segi warnanya.

“Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas KITE IKM suatu saat kami bisa impor alat ini dan impor mutiara yang low grade untuk kita olah

lagi menjadi berbagai macam perhiasan sehingga hasil produk olahan kita bisa bersaing langsung dan nilai tambahnya semakin besar dan makin banyak yang bisa diambil dari olahan limbah dari mutiara seperti kerangnya,” papar Arar yang telah memulai usaha pengolahan mutiara sejak tahun 1997.

Bulan April merupakan bulan para pembudidaya dan pengrajin mutiara untuk melakukan ekspor. Arar pun berharap pada bulan April ia juga bisa melakukan ekspor mutiara seperti teman-temannya sehingga hasil produksi perhiasan dan cinderamata olahan miliknya bisa merambah ke luar negeri, ke pasar ekspor. Karena sebelumnya ekspor hanya dilakukan jika ada pesanan dalam skala tidak terlalu besar.

“Saya yakin mutiara olahan asal Lombok banyak peminatnya di luar negeri dan yakin mutiara kita bisa bersaing dengan pasar ekspor Kalau sudah kita design dan kombinasikan dengan logam maka hasilnya akan bagus,” ujar Arar yang berharap dengan memanfaatkan fasilitas KITE IKM produk mutiaranya punya daya saing untuk produk dan harga sehingga makin bertambah omzet penjualannya dan bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja.

“Sekarang saya sedang melengkapi NIK dan API dan itu tidak sulit, bahkan untuk mendapatkan fasilitas ini kita malah diminta oleh teman-teman Bea Cukai. Alhamdulillah kita banyak dibantu dan Insyaallah yakin program ini akan membantu kita, teman-teman sepertinya makin banyak untuk ikut, meski ada beberapa legalitas teman-teman masih harus dilengkapi seperti Tanda Daftar Industri (TDI). Saat ini teman-teman banyak yang urus TDI,” Pungkas Arar yang yakin dan optimis dengan manfaat fasilitas KITE IKM dan berharap Fasilitas ini bisa lebih memudahkannya untuk melakukan ekspor impor sehingga ada penambahan penerimaan. Apalagi pemerintah menjanjikan tidak dipungut biaya apapun bila ingin mengajukan Fasilitas KITE IKM.

**(Ariessuryantini)**



## **PERAKI AWALI KEGIATAN 2017 DENGAN SEMINAR**

**P**erkumpulan Ahli Kepabeanaan Indonesia (PERAKI) yang terbentuk pada 29 Februari 2016, setelah satu tahun berdiri kini mulai melakukan kegiatannya sebagai ahli kepabeanaan dengan mengadakan seminar tentang nilai pabeaan. Seminar yang berlangsung pada 14 Maret 2017 di aula utama Pusdiklat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta diikuti sebanyak 102 peserta mulai dari PPJK, pengguna jasa, hingga pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk seminar pertama kali ini, PERAKI mengambil tema "ketentuan nilai pabeaan berdasarkan BTKI 2017 dan diskusi tentang ketentuan nilai pabeaan untuk menghitung bea masuk" dengan pembicara Adang Karyana dari Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, yang membahas soal amandemen BTKI 2017, dan Sunarno dari anggota PERAKI, yang memaparkan ketentuan nilai pabeaan untuk menghitung bea masuk.

Terkait tema yang diambil kali ini, menurut Ketua Umum

PERAKI, Abdul Rachman, ketentuan soal BTKI yang baru berlaku pada 1 Maret 2017, jadi PERAKI ikut mensosialisasikan ketentuan yang baru tersebut. Selain itu, saat ini



**Abdul Rachman.**  
Hasil seminar menjadi masukan untuk pimpinan DJBC dalam mengambil keputusan dan kebijakan.





**Kegiatan Pertama.** Seminar menjadi kegiatan pertama dari kepengurusan PERAKI masa kerja 2016 – 2021.

masih banyak perbedaan pendapat antara petugas bea cukai dengan pengguna jasa terkait nilai pabean, yang berakibat saling klaim untuk membenarkan perhitungan bea masuk.

Dari permasalahan itulah PERAKI mengusung tema tersebut, yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada pimpinan DJBC untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. "Dari seminar ini akan banyak hal yang dapat kita pelajari dan kita ambil sebagai ilmu. Untuk itulah hasil seminar akan kami sampaikan ke pimpinan bea cukai. selain itu, seminar serupa juga akan kami selenggarakan di Surabaya karena di daerah tersebut juga banyak terjadi ketidaksepakatan terhadap nilai pabean antara petugas bea cukai dan pengguna jasa, jadi seminar ini bukan seminar seperti biasa tapi ada masukan dari lapangan untuk disampaikan kepada pimpinan bea dan cukai," ujar Abdul Rachman.

Lebih lanjut pria yang lebih dikenal dengan sebutan Rambo ini menjelaskan, sebagai perkumpulan ahli kepabeanan Indonesia, pihaknya

memiliki visi menjadi mitra bea cukai untuk turut membangun bangsa Indonesia, sedangkan misi adalah melancarkan arus dokumen yang efektif dan efisien dan membantu DJBC dalam meminimalisir pelanggaran kepabeanan baik yang dilakukan secara sengaja atau pun pelanggaran atas dasar ketidaktahuan.

"Sebagai ahli kepabeanan, organisasi kami anggotanya tidak hanya dari PPJK saja, tapi juga ada dari pegawai bea cukai yang masih aktif. Dan patut dipahami kalau kami berbeda dengan konsultan, kami kumpulan ahli pabean yang bekerja baik di PPJK maupun di perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor," paparnya.

Sebagai organisasi yang baru berjalan satu tahun, banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh PERAKI untuk mendukung kinerja DJBC. Oleh karena itu di masa kepengurusan tahun 2016 – 2021 telah tersusun beberapa agenda yang kesemuanya bertujuan memberikan masukan kepada DJBC untuk membuat dan mengambil suatu keputusan atau kebijakan.

Adapun susunan kepengurusan PERAKI saat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *Badan Pengawas* yang terdiri dari Ketua Umum Juni Haryudi dan anggotanya, Sunarno.SH, Drs. Achmad Kadir. *Badan Pengurus*, Ketua Umum, Abdul Rachman, Wakil Ketua I, yang menangani organisasi dan keuangan, I.Wayan Suastika. Wakil Ketua II yang membidangi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, IK. Subagyo, dan Wakil Ketua III, yang menangani operasional dan urusan wilayah, Aritanto.

Untuk Sekertaris Umum, Eduar Muliawan, Sekertaris I, Ferryansyah, dan Sekertaris II, Agus Purwoditomo. Untuk Bendahara Umum, Moh. Raffi BSC, Bendahara I, Mashita Anggraini. Sedangkan untuk *Pengurus Harian*, Ketua Ary Nugroho, Sekertaris, Tanti Prasono, Bagian Keuangan, Rubi Triana, dan Staf Tata Usaha, Lina Sari.

**(Supriyadi)**

# DAMPAK DAN PERUBAHAN REORGANISASI VERTIKAL DJBC



Kusrahari Suprianto, Sekretaris DJBC



**D**alam rangka mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna

jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan *good governance* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **Kusrahari Suprianto** penataan organisasi

Instansi Vertikal DJBC yang tertuang pada PMK 188/PMK.01/2016 merupakan upaya DJBC dalam merespon dinamika lingkungan organisasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal agar dapat menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi.

# IMPACT AND CHANGES ON DGCE VERTICAL REORGANIZATION



In order to optimize the role of the Directorate General of Customs and Excise to facilitate trade and industry, keeping the borders and protecting Indonesian society from smuggling and illegal trade, raising state revenues in the customs and excise sector, providing service to users of customs and excise, as well as improving

the organization effectiveness and performance in order to realize good governance at the Directorate General of Customs and Excise, improvements are made to the organization and functioning on DGCE vertical agencies.

According to the Secretary of the Directorate General of Customs and Excise, Kushari Suprianto,

organizational arrangement of DGCE vertical agencies as stated in PMK 188/PMK.01/2016 is an attempt of DGCE to respond the dynamics of the organizational environment both internal and external to answer the needs for organizational capacity building.

There are several things to change in the organizational

## ◆ LAPORAN UTAMA

Terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan dalam penataan organisasi instansi vertikal DJBC sesuai dengan PMK 188/PMK.01/2016 yakni: **Perubahan pertama**, adanya pemekaran Kantor Wilayah DJBC sehingga berdampak pada penambahan 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC dan 1 (satu) Kantor Wilayah DJBC Khusus yaitu Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat, Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan dan Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara serta Kantor Wilayah Khusus Papua dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Adapun yang menjadi pertimbangan penambahan Kantor Wilayah DJBC termasuk kebijakan pemerintah (Nawacita, MP3EI, dan lainnya), efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah dalam hal operasional (fasilitas, keberatan, pengawasan), supervisi, asistensi, dan koordinasi serta mengatasi permasalahan rentang kendali pelayanan, pengawasan, dan hambatan komunikasi.

Parameter yang menjadi dasar pemekaran Kantor Wilayah DJBC berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2016 tentang Pedoman Penataan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Instansi Vertikal di Lingkungan DJBC adalah penerimaan, dana alokasi umum (DAU), nawacita, mitra kerja, kantor bantu dan pos pengawasan, luas wilayah, Kabupaten/Kota, perbatasan negara (darat), fasilitas pabean dan fasilitas cukai.

Kantor Wilayah DJBC sendiri ada kanwil DJBC dan ada yang namanya kanwil DJBC khusus. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan Kantor Wilayah DJBC dengan Kantor Wilayah DJBC Khusus? Berdasarkan PMK 188/PMK.01/2016 dan PMK Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC sebelumnya, terdapat perbedaan Kantor Wilayah DJBC dengan Kantor Wilayah DJBC Khusus.

Dari sisi tugas dan fungsi serta struktur organisasi, kanwil DJBC khusus memiliki karakteristik



Gedung Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan.



KPPBC Sorong oke.

dominan dalam hal penindakan dan penyidikan sehingga terdapat 2 (dua) bidang yang mewadahi fungsi penindakan dan penyidikan yakni Bidang Penindakan dan Sarana Operasi dan Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Sedangkan pada kanwil DJBC hanya terdapat 1 (satu) bidang yang mewadahi fungsi penindakan dan penyidikan yakni Bidang Penindakan dan Penyidikan. Kemudian, pada kanwil DJBC karakteristik dominannya adalah pemberian pelayanan dan fasilitas kepabeanan dan

cukai. Sedangkan dari sisi peran, kanwil khusus dominan dalam hal pengawasan laut. Hal itu pula yang menjadi dasar dibentuknya Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua untuk mendukung pengawasan laut di wilayah timur Indonesia.

Dengan adanya reorganisasi vertikal DJBC ini dimana sebelumnya ada 15 (lima belas) Kanwil DJBC, 1 (satu) Kanwil Khusus dan 3 (tiga) Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang dipimpin setingkat eselon II, sekarang bertambah menjadi 18 (delapan belas) Kanwil DJBC, 2 (dua)



KPPBC Irian Jaya.



Kanwil DJBC Kalimantan Timur.

arrangement of DGCE vertical agencies in accordance with the PMK 188/PMK.01/2016 namely: The first change, the expansion of DGCE Regional Office thus impacting on the addition of three (3) DGCE Regional Office and 1 (one) DGCE Special Regional Office, namely Western Sumatra Regional Office, Southern Kalimantan Regional Office, Northern Sulawesi Regional Office and Papua Special Regional Office with the details as shown in Table 1.

As for the addition of the DGCE Regional Office including government policies (Nawacita, MP3EI, and others), the efficiency and effectiveness of the tasks and functions of regional offices in operational terms (facilities, objections and audit), supervision, assistance, and coordination and overcome the problems of service range control, supervision and communication barriers.

Parameters on which the expansion of the DGCE Regional Office based on the Regulation of

the Director General of Customs and Excise No. PER-35/BC/2016 on Guidelines for Organizational Planning, Monitoring and Evaluation of Vertical Agencies surrounding DGCE are revenue, general allocation fund (DAU), nawacita, business partners, sub-office and inspection post, total area, Regency / City, the country's borders (land), customs facilities and excise facilities.

DGCE Regional Offices itself has DGCE Regional Office and DGCE Special Regional Office. Then the question, what distinguishes the DGCE Regional Office and DGCE Special Regional Office? Based on PMK 188/PMK.01/2016 and PMK Organization and Work Structure of DGCE Vertical Agencies previously, there are differences between DGCE Regional Office and DGCE Special Regional Office.

In terms of tasks, functions and organizational structure, specifically DGCE Regional Offices have dominant characteristics on prosecution and investigation so that there are two (2) divisions which contain prosecution and investigation functions, namely Enforcement Division and Operational Facilities as well as Investigation Division and Goods of Prosecution Results While on DGCE Regional Offices there is only one (1) division that accommodate prosecution and investigation function, namely Prosecution and Investigation Division. Then, at the DGCE Regional Offices their dominant characteristic is the provision of services and facilities to customs and excise. In terms of the role, Special Regional Office is dominant in terms of sea inspection. It is also as the basis for the establishment of the DGCE Special Regional Office for Papua to support sea inspection in the eastern region of Indonesia.

With the DGCE vertical reorganization, where previously there were 15 (fifteen) DGCE Regional Offices, 1 (one) Special Regional Office and 3 (three) Main Service Office (KPU), led by Echelon II, now grown to 18

## ◆ LAPORAN UTAMA

Kanwil Khusus dan 3 (tiga) KPU.

**Perubahan kedua**, adanya perubahan tipologi dan kenaikan kelas pada 36 (tiga puluh enam) KPPBC Tipe Pratama menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) C dan penambahan 1 (satu) KPPBC TMP C baru yakni KPPBC TMP C Magelang, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

**Perubahan ketiga** adalah penggabungan 14 (empat belas) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama menjadi Kantor Bantu pada KPPBC lain sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Seperti diketahui bersama bahwa sebelumnya, DJBC memiliki 50 (lima puluh) KPPBC Tipe Pratama, dimana 36 (tiga puluh enam) kantor naik kelas menjadi tipe madya dan sisanya menjadi kantor bantu.

Penilaian untuk menaikkan kelas kantor pratama ini melalui pertimbangan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengawasan dan pelayanan yang juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2016 tentang pedoman penataan, monitoring, dan evaluasi organisasi instansi vertikal di lingkungan DJBC. Dalam Perdirjen ini terdapat sembilan parameter penilaian yang berasal dari tiga besaran utama fungsi DJBC yakni penerimaan, pengawasan, dan fasilitasi untuk meningkatkan tipe pratama menjadi tipe madya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sebagian besar KPPBC Tipe Pratama mengalami kenaikan kelas menjadi KPPBC TMP C, sedangkan yang lain tidak dihilangkan, namun beralih fungsi menjadi kantor bantu pada kantor pabean terdekat. Kantor bantu pada intinya adalah unit organisasi non struktural yang menjadi tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanaan dan cukai yang berada di lingkungan KPU atau KPPBC yang pelaksanaan tugasnya didasari oleh pelimpahan wewenang dari kepala KPU atau KPPBC.

**Perubahan keempat** adalah revitalisasi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC melalui

PMK 206.3/2014 (EXISTING)	PMK 188/2016
Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan	1. Kanwil DJBC Riau 2. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur 3. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat (baru)
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	4. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 5. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 6. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan (baru)
Kanwil DJBC Sulawesi	7. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara (baru) 8. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat	9. Kanwil DJBC Maluku 10. Kanwil DJBC Khusus Papua (baru)

Tabel 1 : Perubahan Kantor Wilayah DJBC

PMK 206.3/2014 (EXISTING)	PMK 188/2016
1. KPPBC Sambu Belakang Padang	Kantor Bantu pada KPU Batam
2. KPPBC Pangkalansusu	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Medan
3. KPPBC Siak Sri Indrapura	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Pekanbaru
4. KPPBC Bagansiapiapi	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Dumai
5. KPPBC Selatpanjang	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Bengkalis
6. KPPBC Dabo Singkep	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Tanjungpinang
7. KPPBC Tarempa	
8. KPPBC Pekalongan	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Tegal
9. KPPBC Tulungagung	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Blitar
10. KPPBC Bajoe	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Makassar
11. KPPBC Pomalaa	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Kendari
12. KPPBC Faktak	
13. KPPBC Kaimana	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Babo
14. KPPBC Nabire	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Biak

Tabel 2 : Perubahan Tipologi, Kenaikan Kelas dan Penambahan KPPBC

penguatan tugas dan fungsinya antara lain:

Kantor Wilayah DJBC:

- ◆ Pemisahan fungsi Humas dan Rumah Tangga pada Bagian Umum;
- ◆ Perubahan nomenklatur dan penguatan tugas dan fungsi pemeriksaan pada Seksi Pabean dan Cukai sehingga menjadi Seksi Pemeriksaan;
- ◆ Perubahan nomenklatur dan penguatan tugas dan fungsi di bidang penerimaan pada Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai sehingga menjadi Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
- ◆ Perubahan nomenklatur dan penguatan tugas dan fungsi di bidang perijinan dan fasilitas pada Seksi Fasilitas Pabean sehingga menjadi Seksi Perijinan dan Fasilitas. Selain itu terdapat pengurangan ruang struktur Seksi

Fasilitas Pabean dari 4 menjadi 3, dimana 1 ruang struktur dipergunakan untuk mengakomodir fungsi kehumasan;

- ◆ Pemindahan dan penguatan peran kehumasan dari Bagian Umum ke Bidang Fasilitas Kepabeanaan melalui pembentukan Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat. Pembentukan Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat menggunakan 1 ruang formasi pada Bidang Fasilitas Kepabeanaan;
- ◆ Penguatan tugas dan fungsi pengawasan khususnya terkait narkotika dan barang larangan melalui pembentukan Seksi Narkotika dan Barang Larangan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan.

Kantor Pelayanan Utama Tipe A:

- ◆ Perubahan nomenklatur,

1. KPPBC Meulaboh	13. KPPBC Madura	25. KPPBC Luwuk
2. KPPBC Kuala Langsa	14. KPPBC Blitar	26. KPPBC Pantoloan
3. KPPBC Sibolga	15. KPPBC Banyuwangi	27. KPPBC Morowali (d/h Poso)
4. KPPBC Pematangsiantar	16. KPPBC Probolinggo	28. KPPBC Malili
5. KPPBC Kuala Tanjung	17. KPPBC Madiun	29. KPPBC Parepare
6. KPPBC Tanjungpandan	18. KPPBC Jember (d/h Panarukan)	30. KPPBC Sumbawa
7. KPPBC Bengkulu	19. KPPBC Ketapang	31. KPPBC Maumere
8. KPPBC Tasikmalaya	20. KPPBC Nanga Badau	32. KPPBC Tual
9. KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	21. KPPBC Jagoi Babang	33. KPPBC Biak
10. KPPBC Purwokerto	22. KPPBC Pulang Pisau	34. KPPBC Babo
11. KPPBC Tegal	23. KPPBC Pangkalan Buun	35. KPPBC Merauke
12. KPPBC Bojonegoro	24. KPPBC Sangatta	36. KPPBC Manokwari

### 37. KPPBC Magelang (d/h Kantor Bantu pada KPPBC Yogyakarta)

Tabel 3 : Kantor Tipe Pratama yang terlikuidasi

(eighteen) DGCE Regional Offices, two (2) Special Regional Offices and three (3) KPU.

The second change is the change in typology and increase in class at 36 (thirty six) KPPBC Pratama Type into KPPBC Madya Type (TMP) C and the addition of one (1) new KPPBC TMP C, namely KPPBC TMP C Magelang, detailed as shown in Table 2.

The third change is the incorporation of 14 (fourteen) Inspection and Service Office of Customs and Excise Pratama Type to Support Office on the other KPPBC as shown in Table 3. As it is known earlier, DGCE has 50 (fifty) KPPBC Pratama type, where 36 (thirty-six) offices raise class into Madya Type grade and the others become Support Office.

Assessment for raising this Pratama Office class is through consideration of effectiveness and efficiency on the inspection and service activities which also referred to the Director General of Customs and Excise Regulation No. PER-35/BC/2016 on guidelines for structuring, monitoring, and evaluation of organizations in the DGCE vertical agencies. In this Director General

Regulation, there are nine assessment parameters derived from the three DGCE principal functions, namely revenue, supervision and facilitation to raise the Pratama Type to be Madya Type.

Based on these considerations, most of KPPBC Pratama Type raise class into KPPBC TMP C, while others are not removed, but converted into Support Office at the nearest customs office. Support Office is essentially a non-structural organizational unit for implementation of the customs and excise service tasks partially within KPU or KPPBC whose tasks based on the delegation of authority from the KPU or KPPBC Head.

The fourth change is the revitalization of the DGCE Regional Office and the Main Office through the strengthening of its duties and functions include:

DGCE Regional Office:

- ◆ The separation of the functions between Public Relations and Household in the General Section;
- ◆ Nomenclature changes and the strengthening tasks and functions of the Supervision in the Customs and Excise Section so that become Supervision Section;
- ◆ Nomenclature changes and the strengthening tasks and functions in the Revenue Section on Customs and Excise Information Section to become Revenue and Data Management Section;
- ◆ Nomenclature changes and the strengthening of tasks and functions in the licensing and facilities on Customs Facility Section so that become Licensing and Facilities Section. In addition, there is a re-structuration in Customs Facilities Section from 4 into 3, in which the first is used to accommodate public relations function;
- ◆ Removal and strengthening the public relations role from General Section into Customs Facilities Section through the establishment of Compliance Guidance and Public Relations Section. Establishment of Compliance and Guidance Section as well as Public Relations Section using one formation space in the Customs Facilities Division;
- ◆ Strengthening inspection tasks and functions, especially related to narcotics and prohibited goods through the establishment of Narcotics and Prohibited Goods

## ◆ LAPORAN UTAMA

penggabungan tugas dan fungsi Seksi Perijinan Pabean dan Cukai dengan Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai menjadi Seksi Perijinan dan Fasilitas Pabean dan Cukai, dan pengurangan ruang struktur eselon IV di Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai dari 4 menjadi 3;

- ◆ Penguatan tugas dan fungsi bantuan hukum melalui penambahan ruang struktur eselon IV dari 3 menjadi 4 pada Bidang Keberatan yakni pembentukan Seksi Bantuan Hukum.

Kantor Pelayanan Utama Tipe C:

- ◆ Perubahan nomenklatur pada seluruh seksi di Bidang Perbendaharaan dan Keberatan yakni Seksi Administrasi Penerimaan dan Pengembalian menjadi Seksi Penerimaan dan Pengembalian; Seksi Keberatan dan Banding menjadi Seksi Keberatan; Seksi Fasilitas Kepabeanan menjadi Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai.

Seluruh kantor instansi vertikal DJBC (Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, KPU, dan KPPBC), yakni:

- ◆ Penambahan tugas dan fungsi terkait Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (JFPBC) dan Jabatan Fungsional lainnya pada Bagian Umum/Subbagian Umum;
- ◆ Penguatan tugas dan fungsi pada bidang Kepatuhan Internal yakni investigasi internal dan upaya pencegahan.

Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) **Deny Isworo Makirtyo Tusthwardoyo**, arah penataan organisasi instansi vertikal DJBC tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, diantaranya amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan fungsi pengawasan, kebijakan pemerintah dan penguatan fungsi Kantor Wilayah DJBC.



Deny Isworo Makirtyo Tusthwardoyo, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL)

Melalui perubahan dan pertimbangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja DJBC supaya semakin baik. *Pertama*, pemekaran Kantor Wilayah DJBC diharapkan mampu meningkatkan peran pada beberapa kanwil yang sebelumnya memiliki *span of control* terlalu luas (terdiri dari beberapa provinsi), sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kanwil tersebut lebih efisien dan efektif. Pemekaran kanwil juga diharapkan akan meningkatkan

kinerja DJBC dalam hal koordinasi pada pemerintah daerah yang umumnya instansi pemerintah lain telah diisi oleh pejabat setingkat eselon II.

*Kedua*, dengan adanya perubahan tipologi KPPBC Tipe Pratama menjadi KPPBC TMP C serta pembentukan KPPBC TMP C Magelang merupakan perwujudan DJBC dalam merespon amanat UU ASN dan meningkatkan peran pengawasan khususnya pada wilayah-wilayah perbatasan.

Section on the Enforcement and Investigation Division.

Main Office Type A:

- ◆ Nomenclature changes, incorporating tasks and functions on the Licensing Section of the Customs and Excise become Licensing and Facilities Section of the Customs and Excise, and restructuring in structural space of echelon IV in the Customs and Excise Facility Service Division from 4 into 3;
- ◆ Strengthening the tasks and functions of legal aid through the addition of structural space for Echelon IV from 3 into 4 in Objections Division namely the establishment of Legal Aid Section.

Main Office Type C:

- ◆ Nomenclature changes in the entire sections in the Objections the Treasury Division namely Revenue Administration and Return Section become Revenue and Returns Section, Objections and Appeals Section becomes Objections Section; Customs Facilities Section become Customs and Excise Facilities Section.

All DGCE vertical agencies (Regional Office, Special Regional Office, KPU, and KPPBC), namely:

- ◆ Addition of tasks and functions related to Functional Title of Customs and Excise Inspector (JFPBC) and other Functional Section on General Division / General Subdivision;
- ◆ Strengthening tasks and functions in the Internal Compliance Division, namely internal investigation and prevention efforts.

According to the Head of Organization and Procedure (OTL) Deny Isworo Makirtyo Tustowardoyo, organizational direction arrangement of DGCE vertical agencies have been through mature consideration about the internal and external development, including the

mandate of Law No. 5 of 2014 on Civil Servants (ASN), strengthening the supervisory function, government policies and the strengthening of the DGCE Regional Office function.

Through the changes and considerations, it is expected to improve DGCE performance to better. First, the expansion of DGCE Regional Office is expected to increase role in some regional offices previously having too broad span of control (consisting of several provinces), so that the tasks and functions of these regional offices can be more efficient and effective. Expansion of regional offices is also expected to improve the DGCE performance in terms of coordination on local governments generally having been filled by other government agencies on echelon II officials.

Second, with the change on typology of KPPBC Pratama type become KPPBC TMP C as well as the establishment of KPPBC TMP C Magelang is manifestation of DGCE in response to the mandate of Law on ASN and enhance supervision role, especially in the border regions.

Third, strengthening tasks and functions of the DGCE Regional Office in the field of public relations, inspection, revenue, and control of the narcotics and prohibited goods. Strengthening tasks and functions in the field of public relations expected to support the role of Regional Offices in promoting and improving public perception on DGCE. Strengthening the audit function is expected to improve performance, especially related to the re-research. Strengthening the revenue function is to support DGCE performance in its role as revenue collection to optimize state revenue. Then, the strengthening of the inspection function, especially in the field of narcotics and prohibited goods is to enhance the DGCE role as community protection to be able to provide protection to the society on dangerous goods and goods that could destabilize the country.

Fourth, with the strengthening of

the legal aid function in KPU Type A is to improve the DGCE performance in resolving the legal issues arising from the implementation of tasks and functions in the field of customs and excise.

Fifth, additional tasks and functions related to facilitation and support of administrative JFPBC and other functional positions to accommodate the JFPBC development and other functional positions surrounding DGCE to be implemented in 2017. The existence of the tasks and functions is expected to support the JFPBC performance and other functional positions to meet the tasks, functions, and authorities to which it aspires.

Sixth, with the additional tasks and functions in the field of internal compliance it is expected to improve the performance of all DGCE vertical agencies in terms of the internal investigation and prevention efforts on discipline violation and employee code of conduct.

## Preparation of Implementation

Once published PMK 188/PMK.01/2016 concerning the DGCE vertical reorganization which in addition to the three (3) Regional Office, typology change and raising class on thirty-six (36) KPPBC Pratama Type become KPPBC Madya Type C and the addition of one (1) new KPPBC TMP C, namely KPPBC TMP C Magelang, incorporation of fourteen (14) Pratama Office become Support Office on the other KPPBC and revitalization of the Regional Office and KPU through strengthening its tasks and functions, it is necessary the mature preparation to implement them.

To know what preparation should be done to implement DGCE vertical reorganization, we intentionally visited one DGCE Regional Office broken or divided, namely Southern Sumatra DGCE Regional Office. Where the Riau and West Sumatra Regional Office and South Sumatra DGCE Regional Office will be divided into three regional offices, namely

## ◆ LAPORAN UTAMA

*Ketiga*, terdapat penguatan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah DJBC diantaranya di bidang kehumasan, pemeriksaan, penerimaan, dan pengawasan terhadap narkoba dan barang larangan. Penguatan tugas dan fungsi di bidang kehumasan diharapkan mampu mendukung peran kanwil dalam mensosialisasikan dan meningkatkan persepsi publik terhadap DJBC. Penguatan fungsi pemeriksaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja khususnya terkait penelitian ulang. Penguatan fungsi penerimaan agar mendukung kinerja DJBC dalam perannya sebagai *revenue collection* demi optimalisasi penerimaan negara. Kemudian, penguatan fungsi pengawasan khususnya di bidang narkoba dan barang larangan adalah dalam rangka meningkatkan peran DJBC sebagai *community protection* agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat atas barang berbahaya dan barang-barang yang dapat mengganggu stabilitas negara.

*Keempat*, dengan adanya penguatan fungsi bantuan hukum pada KPU Tipe A adalah dalam rangka meningkatkan kinerja DJBC dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepabeanaan dan cukai.

*Kelima*, penambahan tugas dan fungsi terkait fasilitasi dan pembinaan administratif JFPBC dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka mengakomodir pengembangan JFPBC dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan DJBC yang mulai diimplementasikan pada tahun 2017. Keberadaan tugas dan fungsi ini diharapkan mampu mendukung kinerja JFPBC dan jabatan fungsional lainnya agar sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diembannya.

*Keenam*, dengan adanya penambahan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal diharapkan mampu meningkatkan kinerja seluruh instansi vertikal DJBC dalam hal investigasi internal dan upaya pencegahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.

### Persiapan Implementasi

Setelah diterbitkan PMK 188/PMK.01/2016 tentang reorganisasi vertikal DJBC dimana ada penambahan tiga (3) Kantor Wilayah, perubahan tipologi dan kenaikan kelas pada tiga puluh enam (36) KPPBC Tipe Pratama menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C dan penambahan satu (1) KPPBC TMP C baru yakni KPPBC TMP C Magelang, penggabungan empat belas (14) Kantor Pratama menjadi Kantor Bantu pada KPPBC lain serta revitalisasi Kanwil dan KPU melalui penguatan tugas dan fungsinya, tentu diperlukan persiapan yang matang untuk mengimplementasikannya.

Untuk mengetahui persiapan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan reorganisasi vertikal DJBC ini, kami sengaja mengunjungi salah satu Kantor Wilayah DJBC yang dipecah atau yang dimekarkan yaitu Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan. Dimana Kanwil Riau dan Sumatera Barat dan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan akan dibagi menjadi tiga Kanwil yaitu Kantor Wilayah DJBC Riau, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Bagian Selatan **Mohammad Aflah Farobi** mengatakan pada dasarnya ada tiga hal yang perlu dipersiapkan, yaitu dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dari segi anggaran. Persiapan dari segi SDM telah diukur sesuai dengan beban kerja baik di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur maupun di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat dan nanti akan diusulkan ke Kantor Pusat untuk memenuhi pergeseran pegawai.

Persiapan dari segi sarana dan prasarana termasuk mempersiapkan kantor untuk Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang berlokasi di Bandar Lampung, ada tiga alternatif yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Jangka panjang sudah dimintakan tanah seluas kurang lebih 7.000 meter dari DJKN, jangka menengah

membeli bekas kantor yang berlokasi di tengah kota namun masih perlu biaya renovasi, serta alternatif ketiga atau jangka pendek menyewa kantor dengan biaya yang lebih murah paling tidak untuk jangka waktu tiga tahun. Persiapan yang ketiga adalah bagaimana untuk menyediakan anggarannya.

Dengan adanya pembagian Kanwil ini, Mohammad Aflah Farobi mengharapkan bisa bekerja lebih fokus. Karena dari segi beban kerja dimana Kanwil DJBC Sumbagsel saat ini yang terdiri dari lima provinsi membuat koordinasi dan konsolidasi agak berat apalagi karakteristik Sumatera bagian barat dan timur agak berbeda. Sumatera bagian barat yang berhadapan dengan Samudera Hindia cenderung *happy*-nya untuk mendorong penerimaan dan pertumbuhan industri, karena 90% penerimaan Kanwil DJBC Sumbagsel ini ada di Lampung dan Jambi. Sedangkan Sumatera bagian timur *happy*-nya lebih cenderung kepada pengawasan karena adanya pantai timur.

Sesuai amanat ketentuan peralihan pada PMK 188/PMK.01/2016, operasi penuh paling lambat satu tahun sejak ditetapkan, sehingga diharapkan jadwal operasi penuh maksimal pada 5 Desember 2017. Demi mendukung kelancaran pelaksanaan operasi penuh, maka implementasi direncanakan dimulai sejak Juni 2017 dengan masa transisi sampai dengan akhir September 2017.

Untuk mendukung kelancaran implementasi reorganisasi ini secara umum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain; penentuan formasi pejabat riil, penyusunan uraian jabatan dan peringkat jabatan, pelaksanaan mutasi pegawai, penyusunan kode satuan kerja alokasi DIPA 2017, pemenuhan sarana dan prasarana, penyusunan nomor dan cap dinas, penyusunan kode SKP, pelaksanaan peresmian, masa transisi sampai kepada operasi penuh.

Dalam rangka mendukung persiapan implementasi organisasi ini beberapa langkah telah dilakukan.



Mohammad Aflah Fabori, Head of Southern Sumatra DGCE Regional Office

Riau DGCE Regional Office, Eastern Sumatra DGCE Regional Office and Western Sumatra DGCE Regional Office.

Head of the Southern DGCE Regional Office Mohammad Aflah Farobi said there are basically three things that need to be prepared, namely in terms of human resources, infrastructure and budget. Preparation in terms of HR has been measured in accordance with the workload in Eastern Sumatra DGCE

Regional Office or Western Sumatra DGCE Regional Office and later will be proposed to the Central Office to meet employee shifts.

Preparations in terms of facilities and infrastructure including Western Sumatra DGCE Regional Office located in Bandar Lampung, there are three alternatives, namely for the long-term, medium and short term. In the long term, land area of approximately 7,000 meters of DJKN has been already requested, in the

medium-term to buy ex office located in the downtown but still needs renovation costs, as well as third or short term alternative is to lease cheaper office at least for a period of three years. Third Preparation is how to provide the budget.

With the distribution of these regional offices, Mohammad Aflah Fabori expects to work more focused. Because in terms of workload where Sumbagsel DGCE Regional Office is currently consisting of five provinces making coordination and consolidation more difficult especially characteristics of the western and eastern Sumatra somewhat different. Western Sumatra facing the Indian Ocean tends to be happy to encourage revenue and industrial growth, as 90% of the Sumbagsel DGCE Regional Office in Lampung and Jambi. While the eastern Sumatra is happy more likely to inspection for their east coast.

As stipulated by the transitional provisions on the PMK 188/PMK.01/2016, full operation was no later than one year from the set so that the maximum full operating schedule is expected on December 5, 2017. To support the smooth implementation of full operation, the planned implementation began in June 2017 with a transitional period until the end of September 2017.

To support the smooth implementation of this reorganization in general there are some things that need to be done, among others; determining the real official formation, preparation of job descriptions and position level, personnel transfers, preparation of the working unit code of DIPA 2017 allocation, the fulfillment of facilities and infrastructures, preparation of number and stamp duty, arranging SKP code, implementation of inauguration, the transition period until the full operation.

To support the preparation of this organization several measures have been taken. First, through KEP 55/BC/2017 dated January 31, 2017 concerning Organizational

## ◆ LAPORAN UTAMA

Pertama, melalui KEP 55/BC/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Tim Asistensi Penataan Organisasi Instansi Vertikal DJBC yang terdiri dari pejabat dan pegawai antar unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC. Pembentukan tim asistensi ini berfungsi untuk memetakan dan memitigasi proses bisnis dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lintas sektor agar diperoleh gambaran yang komprehensif.

Kedua, melalui surat Sekretaris DJBC Nomor S-3412/BC.01/2016 perihal Permohonan Pembentukan Tim Persiapan Penataan Organisasi Instansi Vertikal DJBC dalam rangka persiapan implementasi PMK 188/PMK.01/2016 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, dan Kepala KPU BC, yang diminta untuk membentuk tim internal agar mendukung proses koordinasi dengan Kantor Pusat DJBC dan membantu kelancaran proses implementasi pada setiap instansi vertikal DJBC yang terdampak PMK 188/2016.

Ketiga, melalui surat Sekretaris DJBC Nomor S-99/BC.01/2017 tentang Penyampaian Tahapan Implementasi Penataan Organisasi Instansi Vertikal DJBC, yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, dan Kepala KPU BC, telah disampaikan garis besar gambaran tahapan implementasi penataan organisasi instansi vertikal DJBC sebagai pedoman tim vertikal untuk mempersiapkan implementasi reorganisasi.

Selain itu, untuk mempersiapkan sarana dan prasarana kantor baru, secara umum terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan termasuk menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) terkait alih status, sewa, pinjam pakai, ataupun baru. Pemenuhan sarana prasarana berupa alih status BMN khususnya bagi satuan kerja yang melebur ke kantor baru serta pemenuhan sarana prasarana lainnya seperti pinjam pakai ataupun pengadaan baru yang

targetnya sampai dengan 2019.

Implementasi penataan organisasi instansi vertikal DJBC, tentunya tidak bisa berjalan masing-masing, diperlukan sinergi antara Kantor Pusat (seluruh Direktorat terkait proses bisnis yang perlu ditindaklanjuti) dan instansi vertikal DJBC (seluruh Kantor Wilayah DJBC, KPU BC, KPPBC). Sinergi selalu dibangun sehingga dibentuk Tim Asistensi Penataan Organisasi Instansi Vertikal DJBC baik di Kantor Pusat DJBC dengan terbitnya KEP 55/BC/2017 tanggal 31 Januari 2017 maupun Instansi Vertikal DJBC berdasarkan arahan Surat Sekretaris DJBC Nomor S-3412/BC.01/2016.

Khusus bagi Kantor Pratama yang mengalami peningkatan kelas menjadi Kantor Madya perlu untuk segera mempelajari tugas dan fungsi serta proses bisnis KPPBC TMP C baik SOP, kegiatan pengawasan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan lainnya supaya dalam implementasi bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Sedangkan bagi Kantor Pratama yang harus bergabung atau yang akan menjadi Kantor Bantu merupakan unit organisasi non struktural yang menjadi tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepublikan dan cukai yang pelaksanaan tugasnya didasari oleh pelimpahan wewenang dari kepala KPU atau KPPBC.

Dikarenakan sifatnya non struktural dan bukan merupakan satuan kerja, maka Kantor Pratama yang beralih status menjadi kantor bantu wajib menyusun laporan keuangan penutup dan laporan keuangan likuidasi antara lain penyelesaian saldo uang persediaan negara dan uang di bendahara, penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran, penyelesaian aset dan kewajiban yang terdiri dari kas lainnya, piutang dan utang, persediaan, aset tetap dan aset lainnya, dan langkah lainnya sebelum suatu entitas akuntansi dinyatakan dilikuidasi.

Kepala Kantor Pratama yang dilikuidasi dan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang mengawasi diharapkan

dapat melaksanakan ketentuan PMK 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, sebelum dinyatakan telah dilikuidasi. Adapun laporan keuangan penutup dan laporan keuangan likuidasi wajib disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC induknya.

Terkait pelayanan, penataan organisasi vertikal DJBC diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada stakeholder baik akibat penggabungan maupun pembentukan kantor baru. Jadi penataan organisasi vertikal ini bukan malah memberikan ketidakpastian penggunaan jasa, namun sebaliknya.

**(Piter)**

Structuring Assistance of DGCE Vertical Agencies consisting of officials and employee among the Echelon II within the DGCE Central Office. Establishment of an assistance team to map and mitigate business processes and things that need to be followed up across sectors to obtain a comprehensive picture.

Secondly, through DGCE Secretary letter No. S-3412/BC.01/2016 concerning Application for the Establishment of Organizational Structuring Preparation of DGCE Vertical Agencies in preparation for the implementation of PMK 188/PMK.01/2016 addressed to the Head of DGCE Regional Office, Head of Riau Islands DGCE Special Regional Office, and Head of KPU BC, asked to form an internal team in order to support the coordination process with the DGCE Central Office and help smooth implementation process by each vertical agency affected by PMK 188/2016.

Third, through the DGCE Secretary Letter No. S-99/BC.01/2017 concerning the Submission of the Implementation Stages for Organizational Structuring of DGCE Vertical Agencies, addressed to the Head of DGCE Regional Office, Head of the Riau Islands DGCE Special Regional Office, and Head of KPU BC, it has been delivered outlining picture on the organizational structuring of DGCE vertical agencies as a guideline for vertical agencies to prepare the reorganization.

In addition, for preparing new office facilities, in general there are several steps that need to be made, including stock taking of State Owned Property (BMN) related to change of status, rental, leasing, or new one. Fulfillment of facilities and infrastructures in the BMN transfer status especially for a working unit which incorporated into new offices and meeting other facilities and infrastructures such as leasing or procurement of new ones targeted up to 2019.

Restructuring organization

of DGCE vertical agencies cannot stand alone, a synergy is required between the Central Office (whole Directorate related to business processes that need to be followed up) and DGCE vertical agencies (whole DGCE Regional Offices, KPU BC, KPPBC). Synergy is always built so Organizational Structuring Assistance Team of DGCE Vertical Agencies is established in the DGCE Head Office with the issuance of KEP 55/BC/2017 dated January 31, 2017 or DGCE Vertical Agencies based on the direction of DGCE Secretary Letter No. S-3412/BC.01/2016.

Especially for the Pratama Office which raise class became Madya Offices, it is required to learn immediately tasks and functions as well as business processes of KPPBC TMP C either SOP, inspection activities, service activities, or other activities so that the implementation can go as expected.

As for the Pratama Office which must incorporate or which will become Support Office constitutes a nonstructural unit into a partial execution place for customs and excise service tasks based on the delegation of authority from the Head of KPU or KPPBC.

Due to the non-structural nature and not as a working unit, the Pratama Office transfers its status to become Support Office required to prepare closing financial statements and financial statement of liquidation, among others, the settlement of the state money balance and money in the treasury, the settlement of the ceiling balance of DIPA / budget, settlement of assets and liabilities consisting of other cash, receivable and payable, inventories, fixed assets, other fund assets, and other steps before an accounting entity otherwise liquidated.

Head of Pratama Office liquidated and Head of DGCE Regional Office who oversees is expected to carry out the provisions of PMK 272/PMK.05/2014 on the Implementation of Accounting Entity Liquidation

and Reporting Entities in the State Ministry / Institution, before otherwise have been liquidated. The closing financial statements and the financial statements of liquidation shall be submitted to the Main Office of DGCE Regional Office.

Related to services, DGCE vertical organization structuring is expected not to reduce the service quality to all stakeholders including because of incorporation and establishment of new office. So, this vertical organization structuring is not rather than giving uncertainties on service users, but otherwise.

**(Piter)**

SEKRETARIS DJBC - KUSHARI SUPRIANTO

# REORGANISASI VERTIKAL MENGOPTIMALKAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



**M**embuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai makin baik tidak mudah.

Berbagai upaya pengembangan dan penyempurnaan di berbagai bidang terus dilakukan, baik dari segi kelembagaan, kapabilitas, infrastruktur dan sumber daya manusianya. Apalagi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan, melakukan tugas dan fungsi bea cukai sebagai *trace facilitator*, *industrial assistance*, *revenue collector* dan *community protector* tidak semudah tugas dan fungsi bea cukai yang hanya mengawai daratan. Sesuai tuntutan tugas dan fungsi DJBC saat ini supaya dapat berjalan optimal dibutuhkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi secara vertikal.

Penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC ini ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC pada 5 Desember 2016 lalu. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang perubahan, maksud dan tujuannya serta bentuk organisasi DJBC kedepan WBC melakukan wawancara khusus dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **Kushari Suprianto**, berikut petikannya.

**Bisa bapak jelaskan, apa yang menjadi dasar diterbitkannya PMK 188/PMK.01/2016 tentang reorganisasi vertikal DJBC ?**

Reorganisasi vertikal DJBC didasari pada pertimbangan internal dan eksternal yang tertuang di dalam PMK 76/PMK.01/2009 dan Perdirjen 35/BC/2016.

Pertimbangan internal berkaitan dengan upaya mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan *good governance* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain pertimbangan internal tersebut, reorganisasi vertikal DJBC juga didasari pada pertimbangan eksternal. Pertama, berkaitan dengan keberadaan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga diperlukan penataan organisasi untuk menjalankan amanat dari UU ASN tersebut. Kemudian penataan organisasi juga diperlukan dalam rangka mengakomodir organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah seperti: arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian daya saing kompetitif perekonomian; nawacita (khususnya yang berkaitan dengan peran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan kemandirian ekonomi); dan MP3EI yang terdiri dari 6 koridor ekonomi.

**Reorganisasi vertikal ini membuat struktur organisasi DJBC semakin mekar atau bertambah, baik Kantor Wilayah maupun kantor pelayanan. Bagaimana menurut bapak ?**

Menurut kami, reorganisasi vertikal ini mendukung terwujudnya efektivitas dan efisiensi organisasi yang penataannya didasari pada parameter-parameter terukur baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di Kantor Pelayanan. Parameter tersebut antara lain untuk penataan Kantor Wilayah DJBC ada penerimaan, DAU, Nawacita, mitra kerja, kantor bantu dan pos pengawasan, luas wilayah, kabupaten/kota, perbatasan negara, fasilitas pabean, dan fasilitas cukai. Mengenai parameter kantor pelayanan telah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2016 tentang Pedoman Penataan, Monitoring, dan Evaluasi Organisasi Instansi Vertikal di Lingkungan DJBC.

**Bisa bapak jelaskan persiapan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan reorganisasi ini dan kapan waktunya ?**

Tentu saja implementasi reorganisasi memerlukan persiapan yang matang agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan bersama. Terkait persiapan yang dilakukan, saya kira ada 3 besaran utama yang perlu menjadi perhatian yakni persiapan dari sisi proses bisnis dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti; persiapan terkait jumlah SDM minimum yang harus dipenuhi agar operasional kantor dapat berjalan seperti kepala kantor, bendahara, dan lain sebagainya; dan persiapan sarana

prasarana yang harus ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional kantor tersebut.

Saya perlu sampaikan bahwa target waktu yang telah kami sepakati bersama adalah melakukan *launching* di bulan Juni 2017 dan masa transisi sampai dengan September 2017. Kemudian, untuk operasi penuh kantor kita perlu memperhatikan kembali amanat dari PMK 188/2016 bahwa maksimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya PMK 188/2016, yang artinya operasi penuh instansi vertikal sesuai dengan PMK 188/2016 paling lambat di bulan Desember 2017.

**Dengan adanya reorganisasi vertikal ini, berarti Kepala Kantor tidak ada lagi yang dipimpin oleh pegawai setingkat Eselon IV. apa pertimbangannya ?**

Salah satu dasar penataan organisasi vertikal ini adalah amanat dari Undang-undang ASN pasal 15 yang menyatakan bahwa jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya pada pasal 131 UU ASN, dinyatakan bahwa jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator. Hal ini menunjukkan bahwa



## ◆ WAWANCARA

jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintah, dan pembangunan minimal diemban oleh pejabat setingkat eselon III, sehingga kepala kantor selaku jabatan yang bertanggung jawab memimpin satuan kerjanya perlu penyesuaian menjadi pejabat setingkat eselon III.

Berdasarkan UU ASN tersebut, kita ketahui bersama bahwa dasar jabatan administrator setingkat eselon III adalah berkaitan dengan upaya pemenuhan kompetensi khususnya dalam hal manajerial agar mampu memetakan, menganalisis, dan mengambil keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja baik di bidang pengawasan maupun pelayanan.

### **Sehubungan dengan reorganisasi ini, tentu dibutuhkan penambahan SDM untuk menduduki jabatan dimaksud. Bagaimana mempersiapkannya ?**

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemenuhan SDM pada saat implementasi reorganisasi PMK 188 adalah dengan menerapkan Pola Mutasi Jabatan Karier di lingkungan DJBC, yaitu sistem pemindahan PNS dalam jabatan karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

Sistem perpindahan meliputi tiga jenis, antara lain:

- ◆ Perpindahan Jabatan Secara Horizontal, yaitu adalah perpindahan Jabatan Struktural dalam eselon yang sama atau perpindahan Jabatan Fungsional dalam tingkat (jenjang jabatan) yang sama;
- ◆ Perpindahan Jabatan Secara Vertikal, yaitu perpindahan jabatan pelaksana ke Jabatan Struktural, Jabatan Struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi, atau kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional;
- ◆ Perpindahan Jabatan Secara Diagonal, yaitu perpindahan

Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional atau perpindahan Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Struktural.

Perpindahan pegawai dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip yang telah diatur di UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dengan menggunakan Sistem Merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

Beberapa persyaratan yang dijadikan acuan antara lain:

- ◆ memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- ◆ memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- ◆ semua unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- ◆ memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- ◆ jangka waktu menduduki jabatan dan/atau jangka waktu dalam Wilayah Kerja;
- ◆ riwayat kerja;
- ◆ peringkat jabatan;

Untuk mendapatkan kandidat (calon pejabat) yang akan menduduki jabatan tertentu, Bagian Kepegawaian melakukan pemetaan pegawai dengan cara mengelompokkan pegawai tersebut berdasarkan kompetensi/potensi, kinerja, dan riwayat kerja pegawai. Hasil pemetaan pegawai akan dituangkan ke dalam diagram box pemetaan pegawai yang mengelompokkan pegawai pada Box I sampai dengan Box IX.

Pegawai-pegawai dengan kompetensi tinggi, kinerja tinggi, serta riwayat kerja yang bagus akan

terkumpul di dalam Box IX, dan mereka yang akan diproyeksi menduduki jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan formasi yang ada.



### **Selain mempersiapkan SDM, bagaimana persiapan untuk sarana dan prasarannya, termasuk pengadaan kantor baru ?**

Hal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka implementasi reorganisasi, antara lain:

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 2018 (RKBMN 2018) baik itu RKBMN pengadaan dan RKBMN pemeliharaan terhadap kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) strategis seperti tanah, bangunan, rumah negara, alat angkut darat bermotor) dan BMN yang nilai perolehannya di atas 100 juta per satuan;
- b. Mengidentifikasi dan meminta data BMN strategis (tanah, gedung/bangunan) yang berpotensi digunakan oleh kantor baru (4 Kanwil, dan 1 KPPBC TMP C) kepada kanwil dan KPPBC eksisting terdekatnya;

c. Pembahasan dan diskusi yang dihadiri oleh para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DJBC bersama seluruh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah di lingkungan DJBC tanggal 30 Januari 2017

hal diskusi mengenai reorganisasi DJBC;  
d. Pembahasan hasil pemetaan dan mitigasi proses bisnis dalam rangka implementasi PMK 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 melalui

undangan pembahasan hasil pemetaan dan mitigasi proses bisnis dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka implementasi PMK 188/PMK.01/2016

Bahwa rencana pemenuhan Barang Milik Negara dalam rangka implementasi reorganisasi di lingkungan DJBC antara lain:

a. Menentukan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana adalah terhadap kantor sebagai berikut:

No	Nama Kantor	Keterangan
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	Kanwil DJBC Baru
2	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Kanwil DJBC Baru
3	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	Kanwil DJBC Baru
4	Kanwil DJBC Khusus Papua	Kanwil DJBC Baru
5	KPPBC TMP C Magelang	KPPBC TMP C baru
6	KPPBC TMP C Jember	KPPBC TMP C yang pindah kota
7	KPPBC TMP C Morowali	KPPBC TMP C yang pindah kota
8	KPPBC TMP C lainnya	KPPBC yang naik tipologi ke TMP C

b. Menentukan mekanisme pemenuhan tanah dan/atau bangunan kantor, yakni:

- ◆ Menempati kantor lama
- ◆ Berkantor bersama
- ◆ Optimalisasi tanah, gedung kantor, rumah negara
- ◆ Mendapatkan hibah tanah dan gedung
- ◆ Sewa gedung kantor
- ◆ Membangun gedung kantor baru

c. Menentukan mekanisme pemenuhan AADB (Alat Angkut Darat Bermotor) dan inventaris:

- ◆ Optimalisasi BMN dengan alih status
- ◆ Sewa
- ◆ Pengadaan

**Kelihatannya reorganisasi DJBC terus berkelanjutan. Bisa bapak sampaikan bagaimana rencana reorganisasi ke depan ?**

Dalam waktu dekat kami akan menerapkan jabatan fungsional secara bertahap sesuai dengan peraturan Kementerian PAN-RB nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016. Dalam Reformasi Kepabeanaan dan Cukai juga akan dilakukan kajian dalam penataan organisasi antara lain pembentukan Unit Narkotika, Unit Kehumasan, Unit Pengawasan Laut, Laboratorium Bea dan Cukai serta Zoning Audit.

**Untuk mewujudkan DJBC yang lebih baik, selain membenahi struktur organisasi, menurut bapak hal apa lagi yang perlu dilakukan ?**

Untuk mewujudkan DJBC yang makin baik tentunya tidak hanya cukup dengan menata kelembagaan/organisasi saja, namun harus di dukung dengan aspek-aspek lain seperti kapabilitas SDM, penyempurnaan proses bisnis kepabeanaan dan cukai, pemenuhan sarana prasarana termasuk IT, serta program *reward and punishment* yang konsisten terhadap pegawai DJBC.

**Apakah ada hal lain yang ingin bapak sampaikan sehubungan dengan topik bahasan laporan utama ini ?**

Saya berpesan kepada seluruh jajaran pegawai DJBC dimanapun

anda bertugas, tetap jaga terus semangat api reformasi dan lakukan upaya-upaya yang terbaik untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang makin baik.

**(Piter)**

Gedung KPU BC Tanjung Priok.



## **ADANYA SISTEM MCR SEGALA PENYIMPANGAN TERDETEKSI DENGAN CEPAT**

**Fajar Donny.** Dengan sistem MCR pengguna jasa tidak dapat melakukan penyimpangan di Pelabuhan Tanjung Priok.

**P**engawasan yang efektif menjadi tujuan utama kinerja jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), bisa dibayangkan betapa rumit dan peliknya jika pengawasan yang dilakukan tanpa menggunakan sistem, tentunya akan banyak sumber daya manusia atau pegawai yang dibutuhkan untuk mengawasi, dan waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mengawasi satu jenis barang yang akan di ekspor maupun diimpor.

Terlebih jika kinerja yang dilihat adalah pelabuhan utama di Indonesia, yaitu pelabuhan Tanjung Priok yang notabene memiliki kesibukan tingkat tinggi karena lalu lintas ekspor impor tiap harinya mencapai ribuan kontainer baik yang masuk maupun keluar wilayah pabean Indonesia. Bahkan dibalik tingginya aktifitas ini Indonesia masih dikenal sebagai negara dengan dwelling time yang cukup tinggi di antara negara ASEAN lainnya, yang tidak dapat dibantah salah satu permasalahannya adalah di pelayanan bea cukai.

Sejak bea cukai menggulirkan reformasi, banyak sistem yang diciptakan, banyak aturan baru yang diterapkan, dan banyak mekanisme kerja yang diubah untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Masing-masing kantor juga dituntut untuk mampu berinovasi sehingga pelayanan dan pengawasan yang mereka lakukan dapat berjalan efektif baik dari sisi SDM maupun waktu.



SDM Handal. Untuk menjalankan sistem MCR dibutuhkan SDM yang berkopetensi di bidang IT dan sistem informasi.

Seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok, sejak kantor dengan peringkat pelayanan prima ini diresmikan, mereka berusaha menciptakan berbagai macam inovasi baik yang berkaitan dengan sistem kerja maupun sistem pelayanan dan pengawasan. Sistem ini terus berkembang mengikuti tren dan arah pelayanan yang diinginkan *stakeholder*.

Perkembangan pelayanan ini tentunya juga perlu didukung dengan sistem pengawasan yang baik dan tepat sasaran, untuk itulah salah satu inovasi yang mereka ciptakan sejak tahun 2015 adalah *Main Control Room (MCR)*. MCR memang bukan semata-mata inovasi dari KPU Tanjung Priok, sistem ini dibuat oleh Kantor Pusat DJBC yang berharap semua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dapat mengawasi semua jenis pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa, baik yang berada di kawasan berikat maupun yang ada di kawasan industri.

Lalu apa yang berbeda dengan MCR yang dimiliki oleh KPU Tanjung Priok? Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok, **Fajar Donny**, MCR merupakan ruang kendali yang difungsikan sebagai sara pendukung sistem pengawasan di bidang ekspor dan impor yang dalam pengoperasiannya dikelola oleh bidang penindakan dan penyidikan, dimana MCR ini juga memiliki beberapa sistem yang saling

terintegrasi dengan sistem yang ada di KPU Tanjung priok.

Antara lain, *surveillance camera* yang dipasang di beberapa titik lokasi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan kepabeanan. *E-Seal Monitoring System* yang digunakan untuk melakukan pemantauan pergerakan kontainer. *Gamma-Ray Collective Data Image*, untuk proses pengunggahan data hasil pemindaian Gamma-ray kontainer yang dilakukan secara *real time*. *Integrated Database Center* untuk pangkalan data, TPS data center. *Vessel GPS Tracking*, untuk melakukan pencarian posisi kapal dan lokasi dermaga tempat sandar kapal.

“Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia dengan prosentase kegiatan ekspor dan impor mencapai 70 persen dengan jumlah 5,7 juta teus/tahunnya. Maka dari itu, diperlukan sistem yang selektif, efektif, dan efisien sehingga tidak mengganggu mobilitas pelayanan. Adanya layanan kepabeanan 24/7 serta luasnya wilayah pengawasan KPU Tanjung Priok yang tidak seimbang dengan jumlah SDM yang bertugas pada unit pengawasan, juga menjadi faktor digunakannya MCR sebagai sarana pengawasan. Selain itu, diperlukan adanya sarana dan prasarana pengawasan yang dapat memberikan efek psikologis kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran,” ungkap Fajar Donny.

Dengan saling terintegrasinya sistem yang ada bersama MCR ,

tentunya ada keunggulan lain dari sistem yang murni dibuat oleh para pegawai KPU Bea Cukai Tanjung Priok ini. Karena, MCR yang memiliki fungsi utama sebagai *supporting system* dari kegiatan pengawasan ekspor dan impor, dalam penerapannya senantiasa dilakukan inovasi dan pengembangan. Adapun keunggulan dari MCR antara lain, dapat melakukan pemantauan kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, melakukan pemantauan pemeriksaan fisik jalur merah, dengan terintegrasinya sistem MCR dengan TPS maka pemantauan pengeluaran dan pemasukkan kontainer di TPS menjadi lebih mudah.

Keunggulan lainnya, melakukan pemantauan proses pemindaian kontainer dengan Gamman Ray di lapangan dan langsung mendapatkan hasil gambar secara *real time* di ruang MCR. Selain itu, dengan terintegrasinya aplikasi-aplikasi serta ketersediaan data informasi pada pangkalan data MCR sangat membantu dalam melakukan analisa data.

Saling terintegrasi dan saling mendukung pastinya tugas pengawasan semakin efektif, lalu bagaimana dengan pelayanan itu sendiri, apakah sistem MCR juga dapat digunakan untuk bidang pelayanan. Akan hal tersebut ternyata MCR juga dapat digunakan untuk bidang pelayanan, karena saat ini MCR melakukan pengembangan *Supporting Application* yang digunakan untuk mendukung kegiatan

## ◆ FEATURE



**Mendeteksi Pelanggaran.** Adanya server yang menghubungkan beberapa sistem dengan MCR, pelanggaran dapat dideteksi secara dini.



pelayanan dalam hal administrasi persuratan di bidang P2 dengan menggunakan fitur SMS gateway sehingga pengguna jasa dapat mengetahui proses surat mereka. "Yang kini juga sedang dilakukan adalah proses pengembangan untuk diintegrasikan dengan bidang pelayanan

pabean dan cukai dalam hal percepatan pelayanan dibidang tersebut," ujar Kepala KPU Tanjung Priok.

Inovasi yang dibuat oleh KPU Tanjung Priok menjadi contoh untuk perbaikan sistem pengawasan menuju arah efektif, hal ini dapat dilihat dari penerapan MCR yang

mampu membuat pengawasan semakin efektif. Misalnya, dengan Surveillance Camera yang ditempatkan pada beberapa titik rawan, dalam kondisi tertentu akan memudahkan petugas untuk melakukan pemantauan lapangan dan dapat segera menindaklanjuti maupun memberikan informasi kepada petugas lapangan.

Dari olah kegiatan tersebut maka kita dapat melihat apakah terdapat indikasi akan terjadi pelanggaran kepabeian, informasi terkait kapal yang sedang sandar, identitas dan posisi kontainer, maupun gambar hasil pemindaian Gamma Ray yang dapat segera diakses pada sistem aplikasi yang terintegrasi di MCR. Bahkan, proses pencarian data informasi juga tidak akan sulit dan memakan waktu lama karena sudah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dan database yang terpusat.

Sistem aplikasi untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan sudah dibuat, tentunya sistem ini juga memerlukan perawatan agar apa yang dijalankan dapat tetap



Pelabuhan Tanjung Priok. Tingginya aktifitas ekspor impor membutuhkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien.

lancar dan terkendali. Untuk MCR ini perawatan yang dilakukan oleh KPU Tanjung Priok dapat dikerjakan dengan baik dan mudah, walaupun pada awal-awalnya mereka juga mengalami kesulitan untuk masalah *maintenance*, karena ada hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan, yaitu MCR ini memerlukan ruangan khusus dengan tingkat suhu tertentu yang digunakan sebagai ruang server.

Pemeriksaan kondisi server pun harus dilakukan secara rutin, khususnya apabila terjadi pemadaman listrik. Hal ini dikarenakan keterbatasan jangka waktu dari UPS, sehingga dapat mengakibatkan *server off* dan tidak berfungsi. Perawatan lainnya adalah, server MCR memerlukan penggantian atau penambahan *storage* apabila *storage* sebelumnya melebihi kapasitas. Dan yang tidak kalah penting untuk perawatan ini adalah melakukan *back-up* rutin database pada server dan melakukan *controlling surveillance camera*.

Kondisi ini harus rutin dikukan mengingat sebuah sistem juga dapat mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Untuk kendala yang paling utama dari sistem MCR saat ini adalah sistem tersebut sewaktu-waktu dapat terjadi gangguan transfer data image dikarenakan peralatan pengirim signal (radio) yang terpasang pada tower-tower masih bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, untuk perawatan dan perbaikan juga masih memerlukan keterlibatan pihak vendor yang berakibat biaya

perawatan peralatan seperti kamera, radio, monitor, server, dan UPS menjadi cukup tinggi.

“Untuk pengoperasian sistem MCR ini pun kami membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan sistem informasi, agar kedepannya sistem MCR dapat senantiasa dilakukan pengembangan secara optimal,” paparnya.

Sistem MCR kini juga dimiliki oleh masing-masing KPPBC, belatar belakang Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat pada kegiatan ekspor impornya, maka KPU Tanjung Priok membangun sistem MCR yang sesuai dengan tipologi kantornya. Sementara itu untuk kantor bea cukai lainnya, pembangunan MCR juga disesuaikan dengan tipologi pengawasan dari masing-masing kantor tersebut. Dimana mereka tinggal membuat kalkulasi pengawasan yang diperlukan dan sistem MCR seperti apa yang sesuai untuk kantor mereka.

Jika sistem MCR diandalkan untuk kegiatan pengawasan, lalu berapa banyak hasil tegahan yang didapat oleh KPU dengan sistem tersebut. Menyikapi hal tersebut Kapala KPU menjelaskan, kalau sebagai besar hasil tegahan KPU Bea Cukai Tanjung Priok berasal dari optimalisasi sistem MCR karena ketika terdapat indikasi pelanggaran kepatuhan baik itu di bidang ekspor maupun impor, informasi tersebut sudah dapat diolah dan ditindaklanjuti melalui akses pada sistem MCR.

“Pemanfaatan sarana dan prasarana serta teknologi informasi sistem MCR ini harus dapat terus menerus dikembangkan dan dioptimalkan sehingga visi dan misi KPU Bea Cukai Tanjung Priok, yaitu menjadi kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra DJBC serta memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan, dan masyarakat dapat terwujud,” tandasnya.

Sistem pengawasan yang efektif sudah dibangun dan dijalankan oleh KPU Bea Cukai Tanjung Priok, artinya para pengguna jasa yang ingin berbuat diluar ketentuan pastinya akan terdeteksi dan mudah untuk diketahui. Kepatuhan pengguna jasa kini akan semakin tinggi karena setiap saat mereka diawasi oleh MCR yang akan meluruskan segala penyimpangan dalam proses kegiatan ekspor dan impor.

**(Supriyadi)**

# BONAR PARDOMUAN SITINJAK “PETUGAS PATROLI BEA CUKAI TELUK NIBUNG KERAP MENJADI SASARAN MASSA BAYARAN”



Lemparan mercon itu nyaris membakar kapal patroli bea cukai. Petugas berusaha melindungi diri dengan berbagai peralatan yang ada sambil berusaha menenangkan para penyelundup untuk tidak menyerang petugas. Namun dari sisi lain, bantuan massa untuk membebaskan kapal penyelundup dari sergapan petugas bea cukai berdatangan dan jumlahnya semakin banyak. Kondisi pun menjadi semakin mencekam saat beberapa dari mereka ada yang melempari bom molotov yang membahayakan kondisi kapal. Dengan perlawanan yang tidak seimbang ini, kapal patroli bea cukai menjadi bulan-bulanan serangan mercon dan bom molotov hingga badan kapal goyang akibat getaran ledakan mercon.

"Awas...awas pakai alat untuk melindungi diri kalian", teriak kopat mengingatkan para abk untuk melindungi diri dari serangan mercon yang seakan tidak berhenti berdentum di sisi dan atas kapal patroli. Di tengah serangan mercon itu, teriakan orang-orang dari beberapa perahu yang merupakan massa bayaran semakin gencar menghalau kapal patroli bea cukai agar kapal yang akan ditegah karena membawa bawang tanpa dokumen dari Malaysia dapat bebas dari sergapan petugas.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif sementara peringatan kepada massa sudah dilakukan, petugas patroli bea cukai tidak ingin memaksakan diri yang akhirnya hanya dapat menegah satu dari beberapa kapal penyelundup, sementara sisanya melarikan diri dan tidak dapat dikejar. Namun demikian sepanjang tahun 2016 lalu dari data yang ada sebanyak 44 kapal dan ratusan ton *balepress* dan bawang berhasil diamankan patroli laut KPPBC Teluk Nibung.

Itulah sekelumit kondisi yang cukup mencekam yang pernah dialami oleh petugas bea cukai yang salah satunya adalah Bonar saat menjalankan tugas patroli laut di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Teluk Nibung. Sebenarnya bukan hanya kali itu saja Bonar menghadapi kondisi mencekam saat menegah kapal penyelundup yang membawa balepres maupun bawang, beberapa kali melakukan penegahan yang berakhir bentrok, akhir-akhir ini sering dialami kapal patroli bea cukai, dan Bonar sering menjadi incaran massa yang merasa bisnisnya terganggu dengan penegakan hukum yang dilakukan bea cukai.

Pria yang baru beberapa bulan menikah ini, rupanya tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi yang dialaminya, menurutnya semua itu sebenarnya tidak ada masalah hanya sebagian orang saja yang terusik dan mencoba menciptakan kondisi jadi tidak kondusif. "Ini sudah menjadi tugas dan harus saya

jalani dengan baik, karena menjadi petugas bea cukai yang bergelut di bidang penindakan dan penyidikan (P2) merupakan inisiatif saya sendiri dan harus dijalani dengan tulus dan tetap semangat," ungkap Bonar.

Memang sejak awal penempatan di KPPBC Teluk Nibung, Bonar sudah tertarik untuk dilibatkan di unit P2 walaupun pada awalnya dia ditempatkan sebagai staf kepala kantor. Perawakannya yang tinggi besar dan tegap ini dirasa cocok sekali jika turut membantu mengamankan wilayah Indonesia dari masuknya barang-barang ilegal.

"Sebenarnya saya ini masuk bea cukai karena dorongan kakak yang terlebih dulu diterima di pajak. Dia bilang '*pilih bea cukai aja dek, keren itu ada bawa tembak, katanya*' Selain itu, kondisi keluarga kami yang bukan dari kalangan yang berada ditambah sejak kelas enam SD saya sudah menjadi yatim ditinggal ayah, jadi untuk sekolah kami berusaha mencari yang kedinan agar dapat langsung bekerja," cerita pria yang memiliki nama lengkap Bonar Pardomuan Sitinjak ini.

Bonar sendiri sempat gagal saat mengikuti tes di Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) tahun 2010, namun ia berusaha kembali mencoba ikut tes untuk yang kedua kalinya di tahun 2011 yang akhirnya diterima dan lulus tahun 2013. Di KPPBC TMP C Teluk Nibung inilah penempatan Bonar pertama kali, mulai dari praktek kerja, OJT, hingga CPNS dan PNS di Teluk

Nibung.

Setelah diangkat menjadi PNS dan penempatan pertama sebagai staf kepala kantor, anak bungsu dari empat bersaudara ini menghadapi Seksi P2 untuk bisa diikutkan dalam kegiatan P2 yang akhirnya disetujui. Namun penempatan di P2 ini tidak serta-merta mewujudkan impian Bonar untuk bisa ikut patroli, di



## ◆ SISI PEGAWAI



bidang P2 pertama kali Bonar mendapat tugas merekapitulasi laporan pengawasan sarana pengangkut. Barulah setelah beberapa bulan menjalankan tugas di kantor, akhirnya Bonar diikutkan dalam patroli laut yang saat itu sudah ada informasi kalau akan masuk kapal dari Port Klang yang membawa balepres.

"Pertama kali itu kaget juga ya, saya disuruh membawa banyak perlengkapan dan berkas juga alat dokumentasi, katanya warga disini sangat resisten dan tidak mau bea cukai menjalankan tugasnya dengan benar, kalau ada kesempatan mereka pasti menyerang. Benar saya, begitu kami mencoba melakukan tegahan terhadap beberapa kapal yang membawa balepress kami dihadang

dari berbagai sisi dan diserang dengan menggunakan mercon dan bom molotov," ungkapnya.

Kapal penyelundup lolos, Bonar pun merasa tidak ikhlas. Namun pimpinan menenangkan seluruh petugas dan mencoba untuk menghibur kalau besok kita pasti akan bisa menangkapnya. Dan benar, keesokan harinya dengan kesiapan yang jauh lebih matang beberapa kapal dapat ditegah walaupun perlawanan yang dilakukan penyelundup tidak kalah hebat dari sebelumnya, namun dengan kegigihan dan keberanian dalam menjalankan tugas, para penyelundup itu dapat ditegah.

Rupanya bukan hanya saat itu saja perlawanan massa terhadap patroli bea cukai, beberapa kali ikut

patroli dan melakukan penegahan, Bonar kerap mendapat perlakuan yang sama, yaitu serangan dan ancaman jika kapal penyelundup ditegah bea cukai. Bahkan dirinya pernah ditugasnya selama 3 minggu lebih di luar Teluk Nibung karena adanya ancaman yang membahayakan dirinya.

"Mungkin karena mereka lebih mengenal nama saya dari seragam ini, maka yang dicari jika ada ben-trok pasti saya, malah pernah saat sedang tugas di kantor bersama teman, tiba-tiba ada seorang ibu yang menanyakan perihal barangnya yang kami tegah dan dengan sangat emosi tiba-tiba menggigit lengan saya. Untung kami sigap jadi tidak sampai luka yang parah," papar Bonar.

Pengalaman lain yang juga tak kalah seru adalah saat Bonar menjadi saksi penangkap di pengadilan terhadap penyelundup. Dari pernyataan yang disampaikan Bonar menjadi pertimbangan hakim yang membuat keluarga tersangka marah dan mengejar Bonar di luar tempat sidang. Dari kejadian ini, Bonar semakin waspada. Berusaha mengubah tampilan hingga melindungi diri dengan perlengkapan yang memadai, dilakukannya agar dirinya dapat terhindar dari konflik yang lebih berbahaya lagi.

Rekan kerja maupun pimpinan pun tidak tinggal diam dengan kondisi yang dialami Bonar, segala bentuk dukungan dan bantuan pun diberikan rekan dan pimpinan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan baik terhadap Bonar, maupun terhadap kantor bea cukai. "Dengan kekompakan dan dukungan yang diberikan ini, saya semakin semangat untuk menjalankan tugas dan yakin kalau tindakan yang kami lakukan benar untuk menjaga wilayah Indonesia dari perdagangan ilegal," katanya.

Dukungan dari keluarga pun terus diberikan kepada Bonar, mereka berharap Bonar tidak menyimpang dalam menjalankan tugas dan tetap waspada terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap hasil kerja yang dilakukan Bonar dan rekan-rekannya dalam menegah barang ilegal yang masuk ke Teluk Nibung.

**Penghargaan Oleh Menteri Keuangan**

Keberhasilan melakukan tegahan ditengah serangan massa yang tidak suka bisnis haram mereka ditertibkan, menjadi satu poin penting bagi seluruh petugas bea cukai yang melakukan patroli laut. Keberhasilan ini menjadi suatu prestasi yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baik secara personal maupun institusi



untuk menunjang kelangsungan karier dari petugas itu sendiri. Melihat hasil yang sudah di dapat oleh Bonar dan rekan-rekannya, DJBC pun memberikan penghargaan atas prestasi yang didapatkannya.



Penghargaan ini bukan sekedar penghargaan yang diberikan secara cuma-cuma tanpa penilaian dan seleksi yang ketat dari berbagai prestasi dan personal yang mendapatkannya. Dan yang lebih penting lagi, penghargaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan pada acara Hari Pabean Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Februari lalu.

“Saya sangat bangga dengan penghargaan yang diberikan kepada saya, tapi sebenarnya saya juga malu, karena penghargaan ini menurut saya lebih cocok diberikan kepada unit P2 atau KPPBC. Dan kegiatan patroli adalah kegiatan tim bukan personal. Tapi pimpinan telah menunjuk saya secara personal, saya sangat bangga karena hasil kerja kami dinilai dan diperhatikan oleh pimpinan yang ada di pusat,” ujarnya merendah.

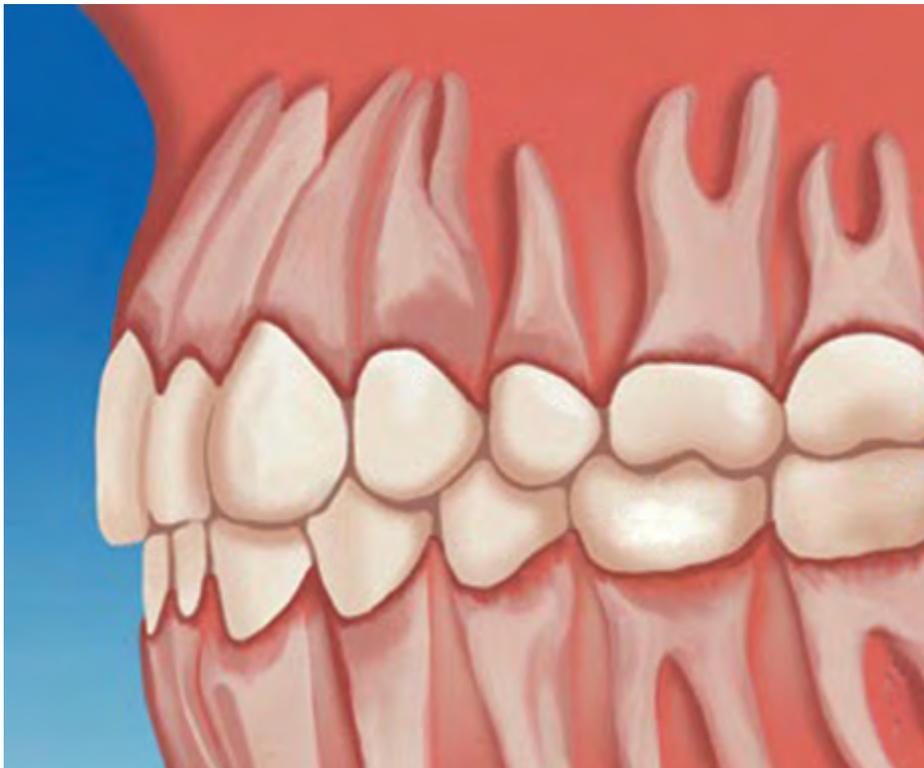
Berdiri berjajar bersama pegawai pilihan yang berprestasi di saat upacara peringatan hari Kepabeanan Internasional, tentunya menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan dan menjadi peristiwa penting dalam hidupnya. Begitu juga dengan Bonar, terlihat gagah dan tegar saat menerima piagam penghargaan dan mendapat ucapan selamat langsung dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjadi hal yang sangat istimewa dan akan terus dikenangnya sebagai cambuk untuk terus berusaha baik dan benar dalam menjalankan tugas di DJBC.

Apa yang sudah dilakukan dan di dapat oleh Bonar tentunya tidak terlepas dari usaha dan kerja keras juga integritas yang tinggi terhadap institusi dia mengabdikan. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan dalam bentuk penghargaan ini tentunya tidak akan dicoreng Bonar dengan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik bea cukai.

“Dari apa yang sudah saya lakukan dan saya dapat saat ini, saya berharap *tagline* yang kini dimiliki DJBC, yaitu bea cukai makin baik dapat benar-benar diwujudkan agar marwah institusi DJBC dapat dipercaya masyarakat sehingga para pegawai pun akan menjadi bangga menjadi bagian dari institusi tercinta ini,” harapnya.

Penghargaan atas kinerja tentunya bukan akhir dari pengabdian terhadap institusi ini, berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari segala aturan yang telah ditentukan, akan mempercepat terwujudnya cita-cita yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu bea cukai makin baik. Jika hal tersebut sudah berjalan tentunya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap DJBC akan semakin tinggi dan institusi ini akan menjadi institusi yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.

**(Supriyadi)**



# GIGI BUNGSU, PERLUKAH DICABUT?

**G**igi bungsu merupakan gigi geraham besar ke tiga atau gigi geraham terakhir yang tumbuh di dalam mulut. Umumnya, gigi ini tumbuh di penghujung usia belasan atau di awal usia 20 tahun, bahkan pada beberapa kasus gigi ini tumbuh setelah usia 20 tahun.

Tumbuhnya gigi bungsu ini kerap menimbulkan masalah dari ringan sampai berat. Masalah ini timbul karena gigi tersebut mulai erupsi atau tumbuh di saat pertumbuhan rahang sudah terhenti sehingga ruang yang tersisa di rahang seringkali tidak cukup untuk mengakomodir ukuran gigi tersebut.

Menurut Ricketts (1980), perubahan ukuran rahang manusia menjadi lebih kecil kerap memiliki hubungan erat dengan kondisi dan kebiasaan diet atau makanan, sehingga kasus gigi geraham bungsu yang impaksi atau tumbuh tidak sempurna meningkat pesat dan tentunya sebagian besar datang dengan keluhan-keluhan yang diakibatkan oleh gigi impaksi tersebut.

Pada beberapa kasus, pasien datang ke dokter umum dengan

keluhan sakit kepala, telinga berdengung, sakit leher, rematik, sering sakit tenggorokan, dan bau mulut yang mengganggu. Dari keluhan-keluhan tersebut, apabila tidak ditemukan adanya kelainan sistemik, umumnya dokter akan segera merujuk ke dokter gigi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan yang tepat.

Namun, tidak seluruh kasus gigi impaksi diawali dengan gejala-gejala seperti disebutkan diatas. Terkadang gigi impaksi memiliki gejala yang lebih jelas dengan keluhan yang dirasakan pasien langsung berasal dari gigi tersebut. Beberapa keluhan dari gigi tersebut antara lain :

- ◆ Perikoronitis  
Perikoronitis merupakan kondisi tertutupnya sebagian gigi bungsu oleh gusi sehingga menyebabkan terjebaknya sisa makanan halus dan bakteri di daerah tersebut. Lama-kelamaan sisa makanan dan bakteri yang terjebak di daerah itu akan menyebabkan infeksi dan bau mulut, serta terjadi peradangan pada tenggorokan.
- ◆ Gigi berjejal  
Pertumbuhan gigi tentu diiringi dengan pertumbuhan akarnya, seringkali proses ini kemudian menyebabkan perubahan letak gigi di depannya sehingga terjadi gigi berjejal.
- ◆ Gigi berlubang  
Umumnya terjadi pada gigi yang berada di sebelah gigi bungsu. Hal ini disebabkan karena posisinya yang berada di belakang sehingga sulit dijangkau untuk dibersihkan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan gigi berlubang pada gigi bungsu dan gigi yang berada di sebelahnya.

Kondisi-kondisi tersebut, apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Infeksi berat yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan obstruksi saluran napas sehingga dapat menyebabkan kematian.

Tetapi, apakah seluruh gigi bungsu perlu dicabut? Untuk menentukan perlu tidaknya pencabutan gigi tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkap dapat dimulai dengan ada tidaknya keluhan di daerah gigi bungsu dan seberapa sering keluhan tersebut timbul. Apabila frekuensi timbulnya keluhan semakin sering, konsultasikan dengan dokter gigi. Apabila dirasa perlu, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan penunjang dengan foto rontgen (panoramic). Penggunaan foto rontgen dapat menegaskan diagnosis apakah masalah di daerah gigi bungsu diakibatkan oleh kurangnya ruangan untuk pertumbuhan gigi bungsu, atau keluhan hanya karena proses pertumbuhan gigi itu sendiri. Sering juga pasien mengeluhkan rasa nyeri di daerah gigi bungsu, namun ketika diperiksa tidak ada kelainan pertumbuhan gigi bungsu, ini berarti rasa nyeri itu merupakan proses terbukanya gusi ketika gigi bungsu akan menembus gusi. Pada kasus ini tidak perlu dilakukan perawatan karena keluhan akan hilang setelah gigi bungsu tumbuh sempurna. Pencabutan gigi bungsu bukan merupakan hal yang wajib dilakukan, namun jika keluhan di gigi bungsu tidak kunjung hilang sebaiknya pencabutan gigi bungsu tidak ditunda agar keluhan tidak semakin parah.



gigi berlubang.



gigi berjejal.

**Drg. M.A. Ika Mauliana S**

## ◆ HOBI DAN KOMUNITAS



# KOMUNITAS FITNESS BEA CUKAI BIKIN SEHAT JASMANI DAN ROHANI

Badan sehat, bugar, ideal, dengan berlatih di lingkungan kantor yang nyaman, bebas biaya, hemat waktu, serta silaturahmi dengan rekan kerja tetap terjaga. Terciptanya insan pegawai yang sehat lahir maupun batin merupakan aset kantor yang luar biasa.



**M**emiliki tubuh yang sehat dan ideal adalah dambaan semua orang, tak terkecuali para pegawai Bea Cukai. Demi mendapatkan dan mencapai semua itu banyak orang memanfaatkan pusat kebugaran yang tersebar di berbagai pelosok. Aktivitas nge-gym atau fitness adalah satu budaya masyarakat modern yang marak dan tersedia di berbagai tempat di kota maupun desa bahkan di hampir semua perkantoran di Jakarta.

Dari beberapa pengalaman terungkap, setelah nge-gym dijamin akan membuat badan segar dan suasana hati menjadi menyenangkan. Agar lebih termotivasi, bisa juga mencoba membuat semacam 'kompetisi kecil', mulai dari proses peningkatan berat badan atau penurunan berat badan, serta pembentukan otot, dan hal ini sudah banyak



gaya hidup sehat pula. Dengan kata lain; mengajak untuk hidup sehat,” tambah Haykal, yang saat ditemui WBC ditemani rekan Roni, Gusto, Rohmad, Wildan, dan Khalid. “Jadwal kegiatannya hampir setiap hari setelah jam kerja,” ujar Rohmad yang pernah mengikuti acara Ninja Warrior Indonesia yang ditayangkan RCTI hingga menembus babak semifinal. Namun, menurut pantauan WBC komunitas ini masih terkendala minimnya alat yang tersedia. Mereka masih membutuhkan alat fitness semacam *barbel, cable fly, treadmill*, serta alat multifungsi lainnya.

(pomo/iman/mumtaz)



dilakukan di berbagai pusat kebugaran.

Didasari hal demikian, komunitas fitness Bea Cukai akhirnya terbentuk. Perkumpulan pecinta olah tubuh ini awalnya hanya bermodalkan kemauan saja. Kebetulan lokasinya berada di lantai 15 Gedung Kalimantan Kantor Pusat Bea Cukai Rawamangun Jakarta, namun bukan berarti dikhususkan untuk para pegawai di lingkungan kantor pusat saja. Bagi mereka pegawai Bea Cukai yang bertugas dan kebetulan berada di seputar Jabotabek tak ada salahnya untuk singgah dan mencoba. Bilamana mungkin mulai mencoba alat yang dipakai, jenis latihan yang diterapkan dan masih banyak hal lain yang membuat interaksi dalam komunitas fitness ini menjadi lebih berwarna. Menyenangkan bukan?

Komunitas yang baru terbentuk dua tahun lalu dan beranggotakan sekitar 20 orang ini merupakan wadah bagi para pegawai Bea Cukai untuk menyalurkan hobi dalam bidang olahraga otot. Haykal, salah seorang perintis komunitas ini mengungkapkan bahwa perkumpulan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *worklife balance* karena bekerja keras lima hari dalam seminggu selama lebih dari sembilan jam per hari haruslah diimbangi dengan olahraga yang cukup. Maka setiap harinya selepas jam kerja, banyak pegawai mendatangi *sport-center* di lantai 15 Gedung Kalimantan ini meluangkan waktu nge-gym atau juga bermain bulu tangkis.

“Intinya komunitas ini ingin memfasilitasi pegawai Bea Cukai yang ingin memiliki badan sehat bugar dengan



## ◆ BERBAGI PENGETAHUAN

# MENGENAL RAGAM MUTIARA

Tahukan anda varietas jenis mutiara yang beredar di Indonesia ternyata beraneka ragam, berasal dari lokasi yang berbeda dan harganya pun beragam pula. Yang paling populer adalah mutiara Laut Selatan (mutiara lombok), mutiara Akoya, dan mutiara Tahitian yang merupakan mutiara premium dan bernilai tinggi. Sedangkan mutiara air tawar yang mendominasi pasar menawarkan jenis mutiara yang menarik dan harganya pun terjangkau.



Menurut Arar, salah seorang pembudidaya dan pengrajin mutiara asal Lombok, ada kurang lebih 6-8 varietas jenis mutiara yang beredar di Indonesia antara lain :

**Mutiara Lombok (South Sea Pearls)** atau Jenis mutiara Laut Selatan, kualitasnya luar biasa, besarnya diatas rata-rata jenis mutiara lain, berukuran mulai dari 8mm-22mm, namun sebagian besar produksi antara 10mm-14mm. Ini termasuk mutiara paling langka indah nya luar biasa. Jenis mutiara Laut Selatan ini tumbuh di pulau lombok dengan jenis tiram *Pinctada maxima*, yang juga hidup di perairan hangat dari Australia, Filipina, Burma, Kepulauan Indonesia Timur, dan daerah lain di Asia Tenggara.

**Mutiara Akoya.** Akoya jenisnya bulat, putih, berkilau dengan cahaya mawar, tampak anggun dan lembut, dianggap salah satu yang terbaik dan paling populer di dunia. Nama mutiara akoya berasal dari kata bahasa Jepang, ukurannya relatif kecil (tiram *Pinctada Fucata*). Akoya dibudidayakan di air asin tiram di perairan dingin dari kepulauan Jepang. Akoya berukuran mulai dari 2mm-10mm. Kebanyakan berwarna putih sampai krim, dengan kilau mulai dari warna mawar sampai berwarna emas. Mutiara Akoya hasil budidaya sangat berkilau, hampir selalu bulat konsisten, sangat cantik dengan warna yang putih bersih, atau berwarna seperti baja mengkilat.

**Mutiara Tahitian.** Namanya berasal dari Kepulauan tropis Tahiti. Sekarang budidayanya tidak hanya di Tahiti tetapi juga Kepulauan Cook dan tempat-tempat lain di Pasifik Selatan. Jenis mutiara Tahitian lebih besar dari Akoya karena jenis mutiara ini memiliki tiram yang lebih besar. Ukurannya berkisar dari 7mm sampai 20mm, sebagian besar produksi diantara ukuran 10mm ke 14mm. Jenis mutiara Tahitian menawarkan sentuhan dramatis. Warna hitam alaminya berasal dari warna bibir



**Mutiara Keshii** . Keshii berarti “kecil” dalam bahasa Jepang dan jenis mutiara keshii biasanya kecil. Kadang-kadang dalam proses budidaya mutiara akan dimasukkan bahan yang agak sedikit berbeda yaitu agak kecil pada Mantel tiram ini sehingga hasilnya adalah jenis mutiara yang disengaja kecil. Mutiara ini hampir seperti jenis mutiara alami, hampir semua *nacre* dalam bentuk-bentuk bebas acak.

**Mutiara Mabe**, berbentuk seperti setengah bola, kubah dome, setengah lingkaran. *Nacre* sengaja dibiarkan tumbuh di satu sisi saja, mutiara Mabe adalah yang paling murah dari varietas jenis mutiara.

### Cara Mengenal dan Membedakan Mutiara Asli dan Palsu

Lebih lanjut menurut Arar yang juga pemilik Gallery RAGENDA MOP JEWELRY, untuk mutiara south sea, hasil budi daya Indonesia masih

hitam tiram, tapi warna mutiara ini juga dapat menjadi silver metalik, dengan warna hitam. Dan dalam kisaran ini warna mereka dapat memiliki kebiruan, keunguan, atau nada kehijauan. Jenis mutiara Tahitian dibudidayakan dari jenis tiram berbibir hitam jenis Pinctada, dan menghasilkan jenis mutiara yang sangat besar. Tiram ini sangat sensitif terhadap proses budidaya mutiara, yang membuat jenis mutiara ini sangat mahal untuk diproduksi.

**Mutiara Air Tawar**. Jenis mutiara air tawar bulat memiliki kualitas baik namun harganya terjangkau dan disukai pasaran saat ini. Berbeda dengan jenis mutiara air tawar yang berbentuk beras, jenis mutiara ini sebagian besar berbentuk bulat dengan ukuran 6mm-8mm dan terlihat sangat mirip dengan Akoya ketika dipakai (tetapi dengan harga terjangkau). Warna yang muncul dapat berwarna lavenders, pink, dan peach; dan beberapa mutiara yang bulat dan besar dapat seperti warna Tahiti (hitam kehijauan).

**Mutiara Biwa**. Walaupun secara historis berasal dari Jepang yaitu disekitar Danau Biwa (utara Kyoto), jenis mutiara air tawar Cina ini juga dibudidayakan di China sejak awal tahun 1970-an di Sungai Yangtze di Cina Timur. Jenis mutiara air tawar adalah suatu produk dari proses yang cukup rumit, yaitu satu kerang yang sehat dapat dipanen berkali-kali, menghasilkan beberapa jenis mutiara pada suatu waktu (banyak mutiara didalam satu kerang/tiram).

**Mutiara Abalone** Jenis mutiara Abalone tidak seperti benar-benar bentuk mutiara, mereka adalah mutiara Mabe yang dibentuk pada kerang abalone dari Selandia Baru dan Meksiko. Apa yang membuat mereka menarik adalah warnanya. Kerang abalone memiliki warna biru brilian dan hijau seperti varietas lain. Namun, harganya agak mahal, mutiara Mabe Abalone dapat berharga lima kali lebih mahal dari jenis mutiara mabe biasa.

unggul, karena semua kriterianya atau standar internasional untuk mutiara Indonesia lengkap mulai dari warna, shining, bentuk, dan ukuran masuk dikriteria hasil mutiara Indonesia. Ada beberapa negara penghasil mutiara dengan warna bagus, namun *shiningnya* dan bentuknya juga kurang.

Membedakan antara mutiara asli dengan palsu sebenarnya tidak sulit. Menurut Arar, jika mutiara palsu merupakan hasil cetakan mesin sehingga terkesan ukuran dan bentuknya sama, padahal mutiara yang asli tidak mungkin bentuk dan ukurannya sama.

“Walau terlihat sama tapi pasti beda jenis beratnya beragam, ada yang 100 ml atau 50 ml. Warnanya pun tidak mungkin sama 100 persen. Jadi satu siput isinya satu, dan selama tiga tahun itu mutiara yang sudah diberi nucleus akan berproses selama 3-3,5 tahun untuk menjadi satu buah mutiara. Yang jelas jika kita mau membedakan antara yang

asli dengan palsu tidak susah. Antara lain, kalau kena api tidak meleleh, mutiara asli jika digesek dengan mutiara lainnya terasa ada tekstur, sebaliknya kalau palsu digesek akan terasa licin, diberi cairan aseton saja akan luntur warnanya jika mutiara palsu,” ungkap Arar.

Harga mutiara laut tergantung kualitas (grade), klasifikasi harga ditentukan oleh grade mutiara. Semakin besar dan bulat maka semakin mahal harganya. Hitungan harga mutiara laut dihitung per gram. Kisaran harga mutiara laut berkisar dari mulai Rp.70.000,-/gram sampai dengan Rp.450.000,-/gram.

(Ariessuryantini/Teddy.T)

# SERAGAM BEA CUKAI DARI GENERASI KE GENERASI

Agar orang mudah mencirikan suatu organisasi/kegiatan, biasanya dengan menggunakan seragam. Makna dari baju seragam itu sendiri adalah sebuah pakaian yang dipakai oleh seorang anggota dari suatu organisasi ketika melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Seragam akan menggambarkan organisasi tersebut sehingga ketika anggota atau pegawai suatu organisasi memakai seragam, orang lain akan mengenal dan melihat satu hal yaitu organisasi tersebut bukan orang perorangan. Hal ini dapat terlihat sejak seragam dikenal pada zaman romawi, di mana prajurit, anggota senat, anggota keagamaan memakai seragam setiap saat ketika mewakili aktivitas organisasinya.

Begitupun instansi Bea Cukai yang mempunyai tugas mengawasi dan melayani, tentu agar mempermudah masyarakat untuk mengenali petugas Bea Cukai dengan melihat seragam. Untuk saat ini seragam bea cukai berwarna biru tua/ biru kehitam-hitaman sesuai dengan Perdirjen No. PER-38/BC/2016 dengan atribut seperti papan nama, badge, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda kehormatan, dan tanda kualifikasi. Untuk tanda pangkat, jabatan, kehormatan, dan kualifikasi berbeda-beda tergantung tingkatannya.

Menilik sejarah, bersumber dari Bagian Organisasi Tata Laksana (OTL), Sekretariat DJBC seragam bea cukai sudah berubah berkali-kali yang dibagi menjadi 6 generasi. Seragam generasi awal atau generasi pertama adalah masa pertama dibentuknya bea cukai hingga sekitar tahun 1970. Pada masa ini warna seragam adalah berwarna khaki, warna yang memang umumnya digunakan pegawai negeri pada masa ini sehingga anatara instansi satu dengan yang lainnya tidak banyak perbedaan. Pada masa ini tanda pangkat diletakkan di pundak dan pada tahun 1957 ada perubahan atribut tanda pangkat.

Seragam generasi kedua ini yang terlama digunakan, dari tahun 1970-1995. Pada masa ini seragam berwarna abu-abu dengan tanda pangkat yang berada di kerah bukan di bahu/pundak. Banyak orang salah mengira seragam pada masa ini adalah seragam yang pertama kali Bea Cukai gunakan tetapi ternyata salah.



PDH 1957.



PDL 1964.



Seragam generasi kedua.

Seragam generasi ketiga adalah yang digunakan pada tahun 1995-1999. Warna seragam kembali menggunakan warna khaki atas bawah. Beberapa alasan perubahan salah satunya karena warna abu-abu tampak seram sedangkan tugas bea cukai salah satunya adalah melayani. Tanda pangkat yang sebelumnya dipasang di kerah baju, dirubah lagi menjadi diletakkan di bahu. Mulai pada generasi ini penggunaan seragam sudah ditetapkan dengan peraturan.

Pada generasi keempat, tahun 1999 hingga 2009 seragam berubah memakai dua warna. Seragam pertama atasan warna khaki kehijauan dan celana warna hijau. Untuk seragam kedua menggunakan warna biru gelap atau biru kehitaman atas-bawah. Bahkan demi mendorong motivasi pegawai serta meningkatkan pelayanan dan citra sesuai visi dan misi Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan No 87/KMK.05/1996 dicabut. Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.05/1999 tanggal 1 Oktober 1999, diberlakukan seragam baru untuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Latar belakang perubahan seragam dinas juga disebabkan ada beberapa instansi yang memiliki warna dan bentuk yang hamper sama. Dalam keputusan menteri ini telah diatur seragam untuk pegawai wanita muslim yang bentuk dan kelengkapannya disesuaikan. Selain itu demi keseragaman, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP.61/BC/1999 menetapkan "pakaian seragam senam pegawai DJBC".

Untuk seragam generasi kelima yang digunakan tahun 2009-2013 warna seragam hanya menggunakan biru kehitaman saja. Hal ini karena digunakan sebagai identitas bea cukai karena saat itu banyak instansi lain menggunakan warna hampir serupa sehingga menyaru jika tidak diperhatikan baik-baik. Pemilihan warna biru juga karena banyak bea cukai internasional yang menggunakan warna ini sebagai identitas seragamnya.

Seragam saat ini adalah masuk dalam seragam generasi keenam yang berubah pada tahun 2013. Seragam tetap berwarna biru hanya saja untuk atribut ada perubahan.

Sebagaimana dinamika organisasi, narasumber dari OTL mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan-perubahan lagi menyesuaikan kebutuhan organisasi.



Seragam generasi keempat.



Seragam generasi kelima.



Seragam terbaru.

# (BUKAN) REFORMASI KAKI LIMA

Sebuah pernyataan yang memerahkan telinga sekaligus menohok ulu hati pernah dilontarkan oleh seorang anggota parlemen, "Persoalannya disitu, selama ini reformasi pabean sifatnya hanya ribut-ribut sebentar kemudian diam untuk waktu yang lama. Diingatkan, kemudian ribut dan akan diam kembali. Tidak pernah tuntas, sama seperti penertiban kaki lima". Tulisan ini mengangkat kembali *statement* tersebut bukan bermaksud untuk menggores hati para penggiat reformasi maupun mengecilkan upaya dan hasil-hasil nyata reformasi DJBC, sebagaimana tercermin slogan "Bea Cukai Makin Baik". Tapi lebih kepada upaya memberikan *alert* agar program penguatan reformasi yang sekarang sedang dijalankan betul-betul tepat sasaran, menyentuh dan memperbaiki hal-hal substansial yang menjadi akar permasalahan dan yang tak kalah penting harus terus menerus dan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Pergulatan reformasi kepabeaan tidak hanya terekam dalam tonggak-tonggak (*milestone*) inisiatif kelembagaan tetapi juga terekam pada peristiwa-peristiwa "pahit" yang ikut mewarnai proses reformasi. Pergulatan tersebut menyajikan drama tentang tekad baja dan upaya pantang menyerah sebagaimana Eliot Ness (Kevin Costner) yang berusaha mati-matian menjatuhkan Al Capone (Robert De Niro) dalam film *The Untouchables*. Meskipun diwarnai dengan kegagalan, pada akhirnya dengan merekrut orang-orang terbaik dalam sebuah tim, Eliot Ness berhasil membuat Al Capone sang Mafioso yang sebelumnya 'tak tersentuh' akhirnya bertekuk lutut. *The Untouchables* merefleksikan fitrah semesta dimana kebaikanlah yang seharusnya menjadi pemenang. Begitupun reformasi, seharusnya dia mampu tampil sebagai pemenang yang mampu mengidentifikasi sekaligus mengeliminir faktor-faktor penghambat menuju bea cukai yang mumpuni dalam kinerja dan citra, menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel.

Tonggak-tonggak inisiatif kelembagaan yang merefleksikan perjalanan reformasi antara lain adalah disahkannya UU Kepabeaan dan cukai pada tahun 1995, dilanjutkan reformasi kebijakan makro dan deklarasi anti penyelundupan pada tahun 2002. Tahun 2006/2007 dilakukan amandemen UU Kepabeaan dan Cukai yang diikuti dengan perbaikan struktur organisasi, sistem dan prosedur (portal INSW dan janji layanan) serta perbaikan renumerasi. Modernisasi KPPBC, Sentralisasi teknologi informasi (TI), MoU dengan penegak hukum dan penerapan manajemen kinerja dengan *balance score card* diimplementasikan tahun 2010. Disusul dengan *stakeholder engagement*, perluasan sistem teknologi TI serta revitalisasi Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC pada tahun 2014. Terakhir, yang sekarang sedang berlangsung ditahun 2017 ini adalah penguatan reformasi dengan fokus

reformasi budaya yang meliputi penguatan integritas, optimalisasi penerimaan, percepatan pelayanan, perluasan fasilitas, penguatan pengawasan serta modernisasi kelembagaan dan aturan.

## PERBAIKAN SISTEM DAN TATA KERJA

Tiga puluh tahun yang lalu dalam upaya merespon dan menindaklanjuti inpres 4 tahun 1985, dimana kewenangannya "dilucuti", DJBC menerapkan Tata Laksana Di Bidang Impor dengan nama *Customs Fast Release System (CFRS)*. CFRS adalah sistem pengeluaran barang secara cepat, tepat, mudah, murah dan adil, serta menerapkan komputersasi dalam sistem pelayanan. Apabila dikaji lebih jauh, dalam buku panduan CFRS yang diterbitkan tahun 1990 pada butir D tentang Pemeriksaan Tarif, Harga, serta ketentuan pembatasan impor sesudah pemeriksaan fisik, tugas seorang kepala seksi pabean dalam memeriksa kebenaran harga dalam dokumen Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai (PPUD) adalah dengan "memeriksa dengan menggunakan profil harga".

Apabila kita cermati, dalam konteks penelitian kebenaran harga (nilai pabean) ternyata tidak ada perubahan secara substansial sejak era CFRS dengan yang berlaku sekarang yaitu bahwa penelitian tetap dilakukan secara manual dengan menggunakan data pembanding. Walaupun sekarang menggunakan istilah yang berbeda yaitu menguji kewajaran dengan menggunakan Database Nilai Pabean (DbNP), atau dengan terminologi yang lebih "menjual" yaitu bahwa DbNP di gunakan sebagai *risk assessment tools* sesuai *best practice* internasional. Tetapi inti pekerjaannya sama yaitu memeriksa secara manual kebenaran pemberitahuan harga barang impor, komputer hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menampilkan data (*browse*) kemudian dilakukan pencarian (*search*) untuk mencari kesesuaian data komoditas yang diberitahukan dalam PIB dengan data yang ada dalam DbNP. Dibutuhkan *skill* khusus dan *extra effort* yang cukup makan waktu dalam proses *searching* untuk menemukan data yang relevan, padahal penelitian dan penetapan nilai pabean adalah proses yang peka waktu (*time sensitive*) terkait isu *dwelling time*.

Proses pemeriksaan nilai pabean yang dilakukan secara manual -dalam artian komputer hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menampilkan data- dan keputusan akhir sepenuhnya berdasarkan "*profesional judgment*" pejabat yang notabene pemahaman dan interpretasi terhadap undang-undang dan peraturan berbeda-beda menghasilkan anomali-anomali yang tetap terpelihara dalam rentang waktu tiga puluh tahun terakhir. Kondisi ini semakin parah karena tidak berjalannya proses *quality assurance* dan eksaminasi dalam proses penelitian dan penetapan nilai pabean. Anomali tersebut antara lain

perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) dalam hal penetapan nilai pabean maupun tarif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya perbaikan sistem dan tata kerja terutama pada titik-titik kritis, dalam konteks proses bisnis pelayanan dan pengawasan impor dengan cara melakukan identifikasi potensi-potensi masalah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Dari *pre clearance*, *on clearance* dan *post clearance*. Dan satu hal yang juga harus digarisbawahi yaitu bahwa otomasi idealnya tidak hanya dirancang untuk mempercepat waktu pelayanan tapi juga harus mampu meningkatkan kualitas dan akurasi pengawasan karena DJBC bukanlah organisasi yang semata-mata menempatkan *customer satisfaction* sebagai tujuan tapi juga melekat amanah maha berat untuk mengawasi dan mengamankan hak-hak negara. Dan sudah saatnya DJBC menempatkan TI sebagai *backbone* pelayanan dan pengawasan melalui otomasi bukan sekedar sebagai alat bantu bagi pegawai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan.

#### PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET

Dalam *frame* yang lebih luas, proses reformasi birokrasi tidak semata-mata perbaikan sistem dan prosedur serta aspek-aspek teknis lainnya, tapi ada faktor yang lebih substansial yaitu memastikan terjadinya perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam organisasi. Dalam tataran teoritis menurut Gunawan (2007:14), mendefinisikan *mindset* sebagai "*beliefs that affect somebody's attitude; a set of beliefs or a way of thinking that determine somebody's behavior and outlook*" (keyakinan-keyakinan yang mempengaruhi sikap seseorang; sekumpulan keyakinan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang). Sedangkan dalam Merriam-Webster mendefinisikan *culture set* sebagai "*the set of shared attitudes, values, goals, and practices that characterizes an institution or organization*".

Sebagai bagian dari orang-orang yang percaya terhadap eksistensi Tuhan, tentunya kita semua sepakat bahwa tidak ada satu sistem nilai apapun di dunia ini yang sedemikian kuat pengaruhnya terhadap perilaku (*attitude*) seseorang selain agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks merubah *mindset dan culture set* dalam reformasi di tubuh DJBC maka pendekatan keagamaan adalah cara yang paling ampuh dan efektif. Dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pendekatan keagamaan sudah menjadi bagian dari bahasan isu-isu strategis yang terimplementasi dalam rumusan-rumusan *Critical Issue Paper (CIP)*?. Atau jangan-jangan hanya menjadi isu pinggiran yang tenggelam oleh isu-isu yang lebih "menjual" dalam jargon-jargon bahasa tingkat tinggi.

Seorang guru spiritual yang sangat mumpuni berpesan bahwa "sebaik apapun sistem yang dibangun, kalau dari awal niatnya melanggar pasti akan dicari berbagai cara untuk menjebol dan mengakali sistem. Sebaliknya, walaupun secara sistem masih ada kelemahan tapi kalau

niat awalnya adalah menaati aturan pasti akan dicari berbagai upaya untuk tetap taat, tetap *lempeng* walaupun dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi faktor integritas pegawai sebagai *man behind the gun* sangat menentukan keberhasilan reformasi. Sang guru spiritual juga membuat perumpamaan, seandainya seluruh pegawai bea dan cukai adalah sekumpulan penebang kayu yang indikator kinerja utamanya adalah menebang kayu sebanyak-banyaknya maka diperlukan waktu khusus untuk mengasah kapak. Tanpa ada waktu untuk menajamkan kapak maka kapak lambat laun menjadi tumpul sehingga produktifitas/kinerja menurun. Maka mengasah kapak adalah bagian integral dari pekerjaan menebang pohon. Bahkan presiden Amerika yang legendaris, Abraham Lincoln, pernah berkata "Beri aku enam jam untuk menebang sebuah pohon dan aku akan menghabiskan empat jam pertama untuk mengasah kapak"

Pengajian/bintal atau kegiatan lain yang identik sesuai dengan agama dan kepercayaan pegawai adalah 'kegiatan mengasah kapak', untuk menjaga kebeningan hati agar dapat senantiasa memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan terhindar dari godaan untuk menyimpang dalam bekerja dengan merusak sistem yang sudah dibangun dengan susah payah. Namun kenyataannya, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai kegiatan selingan diluar sistem, yang dikerjakan dengan mencuri-curi waktu istirahat dan hanya hanya dianggap sebagai 'ekstra kurikuler'.

#### PENUTUP

Diperlukan kesungguhan dan ketelitian dalam mengidentifikasi segala permasalahan dalam program penguatan reformasi dengan segala kompleksitasnya. Diperlukan kerendahan-hatian untuk sejenak menengok ke belakang untuk melihat segala kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan keberhasilan proses panjang reformasi birokrasi. Dan barangkali perlu juga dirumuskan sebuah peta jalan (*roadmap*) reformasi DJBC sebagai panduan (*guidelines*) bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Terakhir, sebagai pengingat untuk tetap konsisten dan persisten serta agar tidak pernah lelah dalam memberikan kontribusi dalam mewujudkan *tagline Bea Cukai Makin Baik*, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah ayat dalam kitab suci yang artinya "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri " (QS Ar-ra'd:11). *Wallaahu a'lam bish showab*.

**Teguh Iman S. (Ketua Departemen  
Kajian Strategis Clif)**

# REORG

## Vertikal Direktorat J

### Penambahan 3 Kantor Wilayah DJBC dan 1 Kantor Wilayah DJBC Khusus



15 Kanwil, 1 Kanwil Khusus, 3 KPU → 18 Kanwil, 2 Kanwil Khusus, 3 KPU

### Perubahan tipologi dan kenaikan kelas 36 KPPBC Tipe Pratama menjadi KPPBC TMP C dan Penambahan 1 KPPBC TMP C

1. KPPBC Meulaboh
2. KPPBC Kuala Langsa
3. KPPBC Sibolga
4. KPPBC Pematang Siantar
5. KPPBC Kuala Tanjung
6. KPPBC Tanjungpandan
7. KPPBC Bengkalis
8. KPPBC Tasikmalaya
9. KPPBC Kantor Pos Baru
10. KPPBC Purwokerto
11. KPPBC Tegal
12. KPPBC Bojonegoro
13. KPPBC Madura
14. KPPBC Blitar
15. KPPBC Banyuwangi
16. KPPBC Probolinggo
17. KPPBC Madiun
18. KPPBC Jember
19. KPPBC Ketapang
20. KPPBC Nanga Badau
21. KPPBC Jagoi Babang
22. KPPBC Pulang Pisau
23. KPPBC Pangkalan Buun
24. KPPBC Sangatta
25. KPPBC Luwuk
26. KPPBC Pantoloan
27. KPPBC Morowali
28. KPPBC Malili
29. KPPBC Parepare
30. KPPBC Sumbawa
31. KPPBC Maumere
32. KPPBC Tual
33. KPPBC Biak
34. KPPBC Babo
35. KPPBC Merauke
36. KPPBC Manokwari

1. KPPBC Magelang (d/h Kantor Bantu pada KPPBC Yogyakarta)

# ANISASI

## Enderal Bea dan Cukai



### **Penggabungan 14 KPPBC Tipe Pratama menjadi Kantor Bantu pada KPPBC**

PMK 206.3/2014

PMK 188/2016

1. KPPBC Sambu Belakang Padang	Kantor Bantu pada KPU Batam
2. KPPBC Pangkalansusu	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Medan
3. KPPBC Siak Sri Indrapura	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Pekanbaru
4. KPPBC Bagansiapiapi	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Dumai
5. KPPBC Selatpanjang	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Bengkalis
6. KPPBC Dabo Singkep	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Tanjungpinang
7. KPPBC Tarempa	
8. KPPBC Pekalongan	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Tegal
9. KPPBC Tulungagung	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Blitar
10. KPPBC Bajoe	Kantor Bantu pada KPPBC TMP B Makassar
11. KPPBC Pomalaa	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Kendari
12. KPPBC Fakfak	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Babo
13. KPPBC Kaimana	
14. KPPBC Nabire	Kantor Bantu pada KPPBC TMP C Biak



### **Revitalisasai Kantor Wilayah dan KPU (Penguatan Tugas dan Fungsi)**

Kantor Wilayah

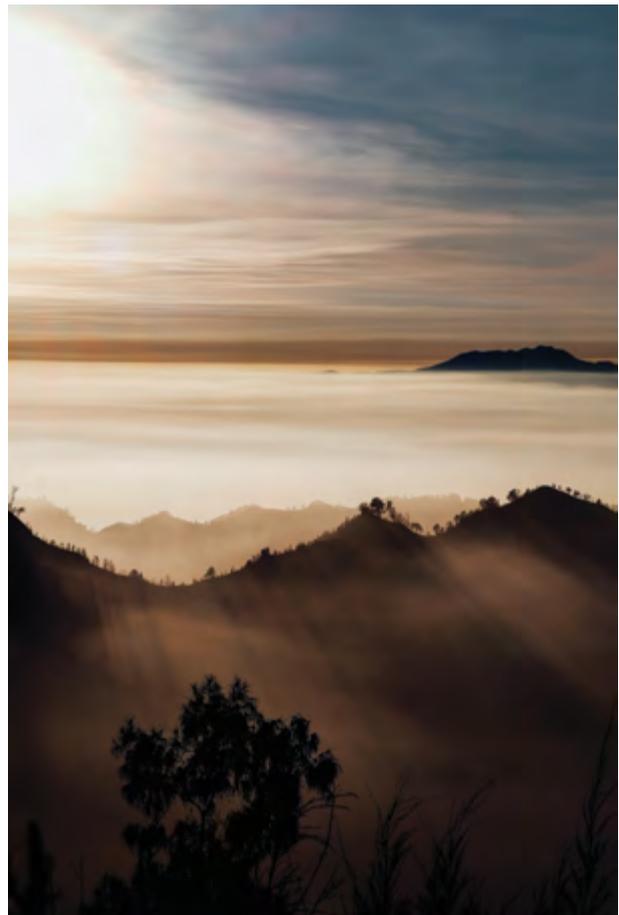
Kantor Pelayanan Utama Tipe A

Kantor Pelayanan Utama Tipe C

Seluruh Kantor Instansi Vertikal



# KEINDAHAN BROMO TAK PERNAH MEMBOSANKAN UNTUK TERUS DINIKMATI



Gemerlap bintang,  
udara dingin yang  
menyelimuti  
menjelang  
fajar, kabut  
yang perlahan-  
lahan menipis  
berganti dengan  
pemandangan  
pedesaan yang  
terlihat menawan  
dari puncak  
penanjakan, pasir  
yang terhampar  
luas sejauh mata  
memandang,  
kuda-kuda yang  
siap mengantar  
para pendaki ke  
kawah gunung  
bromo. Semuanya  
bersatu padu  
menyajikan  
keindahan  
yang tak lekang  
oleh waktu.



Fotografer : Rezky Ramadhani,  
Direktorat KIAL

# SELANCAR ALAM DAN KULINER KE PULAU LOMBOK

Anda pasti sepakat, setelah Bali, Pulau Lombok jadi destinasi wisata paling populer di Indonesia yang mampu menyuguhkan beragam wisata, dari pegunungan hijau, pantai eksotis, sampai dunia bawah laut yang sangat indah. Bahkan kulinernya pun terkenal yang terkenal pedas cukup membuat kami penasaran.





**Jernihnya Pantai Tanjung Aan**

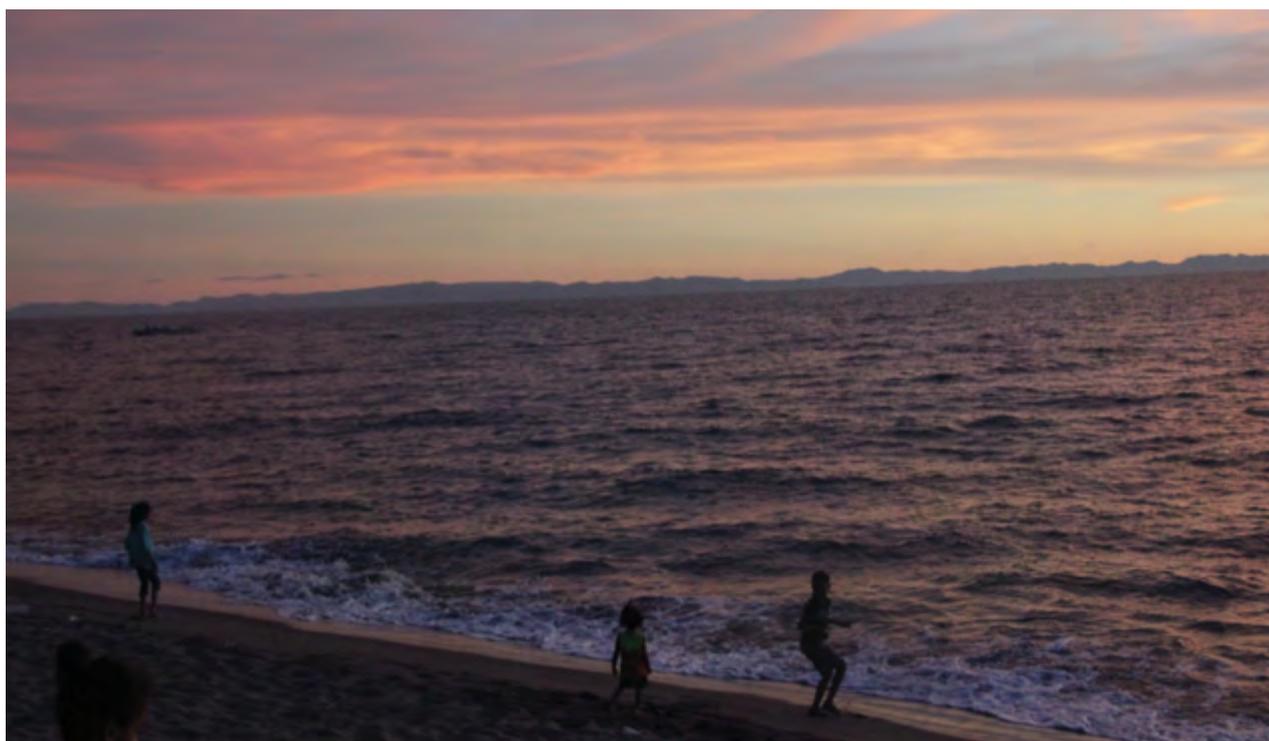
Di Kawasan Mandalika Resort, Desa Kuta, sekitar 75 Km dari Mataram, Ibukota NTB. Posisinya sekitar 3 Km dari Pantai Kuta, Lombok Tengah. Perlu 40

menit hingga 1 jam jika ditempuh dari Bandara Internasional Lombok. Pantai Tanjung Aan di Kuta Lombok memiliki dua sisi pantai yang sama-sama indah tetapi berbeda. Takjub Indah sekali ! bagaimana

tidak, sisi kiri terdapat pantai berpasir warna kuning kecokelatan yang disebut sebagai pasir merica, bentuknya sangat mirip dengan buliran lebih besar ketimbang pasir biasa. Sementara di sisi kanan memiliki pasir seputih tepung dengan butiran-butiran pasir menyerupai tepung berwarna putih bersih. Kedua pantai itu memiliki garis melengkung dengan panjang lebih dari 5 Kilometer. Hamparan pasir itu akan tampak menawan apabila disaksikan dari atas ketinggian Tanjung Aan. Perahu nelayan ditambatkan di pantai ini. Para nelayan juga menawarkan jasa perahu menuju Batu Payung, sebuah batu yang berada di tepian tebing dan berbentuk seperti payung apabila dilihat dari sudut tertentu. Batu Payung yang tersohor karena dijadikan lokasi pengambilan gambar sebuah iklan rokok dengan pesona petualangannya dan sering dijadikan sebagai lokasi pemotretan pre wedding. kami tidak mengunjungi tempat ini, karena keterbatasan waktu, untuk menuju lokasi ini diperlukan sarana transportasi perahu.

**Pantai Kuta Lombok dan Senggigi**

## ◆ TRAVEL NOTES



Bukan hanya Bali yang punya Pantai Kuta. Kuta Lombok tidak kalah loh dengan Kuta Bali, di Kuta Lombok justru pantainya lebih alami dibandingkan Kuta Bali yang dipadati gallery, restoran, mal dan hotel-hotel mewah. Turis singgah bermain di pantai menyalurkan hobi berselancar karena memiliki ombak yang tinggi dan panjang namun pantainya cukup aman untuk berenang. Pasir putih terhampar dan air laut sebening cermin bisa kami saksikan dengan mudah di Pantai Kuta Lombok. Kami sorenya ke Pantai Senggigi, menjadi tempat favorit penikmat sunset saat senja, sekaligus memandangi siluet Gunung

Agung, gunung tertinggi di Pulau Bali dari kejauhan. Karena favorit sebagai tempat untuk menunggu sang surya tenggelam maka tak heran kita tak bakal kesulitan mencari bar untuk bersantai di sore hari menikmati panorama sunset sambil ditemani semilir angin dan sege-las cocktail. Kami masuki kawasan pantai di sebuah bar, namanya La Chill Bar, ternyata pengunjung sudah memenuhi kursi-kursi yang tersedia di pantai di bagian belakang bar hanya beralaskan pasir pantai. Panorama eksotik terlihat saat matahari mulai perlahan-lahan turun ditelan lautan. Warna langit jingga dan penampakan Gunung Agung

yang terlihat puncaknya saja karena tertutup awan. Anak-anak sampai orang tua masih asyik bermain pasir di pantai. Sedangkan yang bersiap melihat atraksi sunset duduk manis di atas sofa masing-masing, sambil menikmati sajian menu dan tersedia di bar. Banyak wisatawan yang berada di Bali sengaja menyeberang ke Lombok sekedar berkunjung ke Pantai Senggigi karena menurut mereka atmosfer pantai ini hampir sama dengan Pantai Kuta.

### **Kampung Adat Lombok di Desa Sade**

Ciri khas sebuah desa dengan bangunan yang menyerupai lumbung



padi, di sanalah bisa melihat kehidupan suku asli sasak. Adalah Desa Sade yang terletak di Kuta, Lombok yang oleh Pemda sudah dikelola menjadi destinasi wisata sehingga warganya lebih terbuka terhadap wisatawan. Sambil berkunjung, Anda pun bisa belanja kerajinan tangan setempat atau belajar menenun kain tradisional Sasak dengan motif ciri khas suku sasak. Kalau mengunjungi Desa Sade konon seperti melihat kehidupan ribuan tahun yang lalu warga Desa Sade yang mayoritas beragama Islam yang selalu menjaga tradisi. Terlihat dengan bagaimana cara masyarakatnya menggunakan pakaian adat. Kaum pria menggunakan pakaian hitam dan sarung dilengkapi ikat kepala yang biasa di sebut sapuk dan ikat pinggang yang biasa disebut leang atau dodot. Sedangkan untuk wanita menggunakan kain panjang bercorak khas Lombok yang melilit di pinggangnya, dengan atasan baju kebaya.

Menjadi ciri khas dari suku sasak di Lombok adalah para wanita suku Sasak yang pandai menenun. Hasil tenun yang terkenal adalah tenun ikat dari tangan-tangan terampil wanita suku sasak. Bagi suku sasak, kedewasaan wanita yang siap untuk berkeluarga dapat dilihat dari seberapa pandai wanita tersebut membuat kain tenun ikat. Ini bisa dijadikan acuan bahwa wanita suku sasak yang sudah pandai menenun, dianggap menjadi wanita dewasa dan layak berkeluarga. Jadi pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat sasak selain bertani, para wanitanya menenun, baik kain sarung atau kain panjang bermacam corak khas Lombok untuk kemudian dijual.

## ◆ TRAVEL NOTES

### Lombok Culinary Trip Surganya Pecinta Makanan Pedas

Lombok, yang dalam bahasa jawa berarti cabai, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki ragam kuliner istimewa. Uniknya, nama-nama makanan khas daerah di Lombok berasal dari daerah makanan itu berasal seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, dan Nasi Balap Puyung. Kunjungan saya ke Lombok berlangsung ketika harga cabai di Jakarta sedang tinggi, begitu pun harga cabai di Lombok. Namun, ketika saya pikir hal tersebut akan mengurangi kepedasan makanan di Lombok, saya salah besar.

Sate Rembiga, PD tanpa saus. Hari pertama menginjak kaki di Lombok, kami mengunjungi Rumah Makan Ibu Sinnaset yang terkenal dengan Sate Rembiga. Sate Rembiga merupakan sate sapi berasal dari daerah Rembiga. Uniknya, sate ini disajikan tidak bersama dengan saus layaknya sate Madura atau sate Padang. Sate terdiri dari potongan daging sapi nyaris tanpa lemak yang

dibakar setelah dilumuri bumbu pedas manis berjam-jam sehingga rasanya meresap ke dalam daging dengan sempurna. Rasa pedas manis berasal dari bumbu sederhana yang terdiri dari bawang putih, cabai, terasi, dan gula merah. Sebelum

dibumbui, daging terlebih dahulu dibungkus dengan daun pepaya hingga melunak lalu dilumuri bumbu dan kemudian dibungkus kembali.

Rasanya jangan ditanya. Pengolahan yang sederhana tersebut menghasilkan rasa yang luar biasa. Karena pada proses pem-

pedas dan manis yang berimbang. Ketiadaan lemak di potongan dagingnya juga membuat sate ini cukup mudah dimakan. Rasanya, saya bisa memakan lebih dari 10 tusuk sate ini atau bahkan mengunyahnya sebagai kudapan sambil menonton televisi!

Bagi anda yang tidak terbiasa menikmati makanan pedas tidak perlu khawatir. Rasa pedasnya tidak mendominasi sehingga pengalaman anda makan sate ini tidak akan membuat anda trauma. Sementara, bagi anda yang kuat pedas. Sate ini dapat dinikmati bersama dengan pelecing kangkung yang pedasnya bisa membuat anda hidup kembali. Pengalaman makan di rumah makan ini semakin meyakinkan kami bahwa makanan di Lombok layak mendapat perhatian sekaligus sebagai peringatan bahwa makanan di Lombok pedasnya patut diwaspadai.

Ayam Taliwang, Bikin Kapok! Esok harinya kami mencoba makanan khas Lombok yang sudah terkenal, Ayam Taliwang. Ada banyak tempat makan di Mataram yang menyajikan ma-

kanaan yang berasal dari Taliwang ini. Berdasarkan rekomendasi dan beberapa blog pecinta kuliner, diputuskan untuk mengunjungi Rumah Makan Lesehan Taliwang Irama 3 yang terletak di jalan Ade Irma Suryani.





Setibanya di rumah makan, kami memesan Ayam Taliwang Bakar Pedas ditemani Es Kelapa Muda memakai gula merah. Tak lama kemudian pramusaji datang membawa satu ekor ayam kampung muda berusia tiga sampai lima bulan dalam keadaan terpanggang sempurna. Ketika mencicipi, daging ayam ternyata tidak sekeras bayangannya. Bekas bakaran daging terasa renyah diberes bagian yang sedikit gosong namun daging masih terasa lembut tidak kering. Herannya ternyata daging tidak terasa pedas, walau nama menyua sendiri bakar pedas. Seorang teman merekomendasikan tempat makan Ayam

Taliwang Dua Em Bersaudara, setelah salah satu teman kami mengeluh bahwa ayam taliwang Irama tidak sepedas yang diperkirakannya, berangkatlah kami menuju rumah makan dimaksud dan memesan Ayam Julat, menu ayam paling pedas. Tidak seperti di Irama, ayam disini terlihat lebih mengintimidasi. Olahan cabai yang menggenangi piring membuat kami ragu untuk memakan ayam tersebut. Setelah, mengumpulkan keberanian, akhirnya mulailah melahap ayam julat tersebut dengan sepiring nasi panas. Pada saat suapan pertama, pedasnya tidak terlalu berasa. Namun, sesaat kemudian bibir mulai terasa perih terbakar. "Ini baru pedas..!", pikir kami. Tapi, keterlaluannya pedasnya. Salah satu teman kami tadi akhirnya tidak sanggup untuk menghabiskan ayam julat tersebut meski sudah menambah nasi satu porsi ekstra!

**(Ariessuryantini/ Teddy Triatmojo).**



## **IMPOR DAN EKSPOR SEMENTARA** BARANG BAWAAN PENUMPANG

### **Pertanyaan:**

"Saya kuliah di Amsterdam. Kalau saya bawa barang pas mudik ke Indonesia dan seminggu kemudian saya bawa balik lagi apa kena bea masuk sama pajak? Terma kasih." [Robert S.]

"Halo. Bulan depan saya mau nonton Wimbledon, rencana mau bawa kamera dan *gadget* yang nilainya lumayan mahal nih, akan di-*stop* pegawai Bea Cukai gak ya di bandara buat bayar pajak dan bea masuk? Terma kasih." [Putri A.]

### **Jawaban:**

#### **IMPOR SEMENTARA**

Pertanyaan yang diajukan oleh Robert dalam ilmu kepabeanan dikenal dengan istilah impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke dalam negeri yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali ke luar negeri dalam waktu paling lama 3 tahun. Pada saat dibawa masuk ke Indonesia barang penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor.

Untuk dapat ditetapkan sebagai barang impor sementara, barang yang dibawa Robert haruslah tidak akan habis dipakai, mudah dilakukan identifikasi, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan, mempunyai tujuan penggunaan yang jelas, dan ada dokumen pendukung yang menyatakan barang tersebut akan diekspor kembali.

Saat tiba di Indonesia Robert harus mengisi dokumen Customs Declaration dan Formulir Impor Sementara, menyerahkan foto kopi paspor dan *boarding pass*, menunjukan barang dan dokumen pendukung seperti *invoice* dan lain-lain untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak impor dan menerima bukti penerimaan jaminan dari Bea Cukai, serta menyerahkan surat kuasa dan nomor rekening penumpang apabila pada saat berangkat ke luar negeri melalui bandara atau pelabuhan yang berbeda.

Selanjutnya, saat Robert akan meninggalkan Indonesia, harus menunjukan Customs Declaration, Formulir Impor Sementara, dan bukti penerimaan jaminan, menjalani pemeriksaan oleh bea cukai serta menerima kembali sejumlah uang yang telah diserahkan sebagai jaminan, dengan dipotong biaya administrasi bank apabila pengembalian dilakukan dengan cara ditransfer.

#### **BARANG REIMPOR**

Sedangkan pertanyaan yang diajukan Putri dalam ilmu kepabeanan kita mengenalnya sebagai barang reimpor, yaitu barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali karena sesuatu hal. Pada saat dibawa masuk ke Indonesia barang tersebut akan dibebaskan dari bea masuk dan/ atau cukai, tidak dipungut PPh namun dikenakan PPN dan atau PPnBM sesuai dengan peraturan perpajakan.

Saat ia akan berangkat ke luar negeri, Putri harus memberitahukan barang dan dokumen pendukung seperti *invoice* atas barang yang akan dibawa keluar negeri dan menjalani pemeriksaan oleh Bea Cukai, menyerahkan foto kopi paspor dan *boarding pass*, serta menerima surat pemberitahuan membawa barang atau bukti ekspor.

Selanjutnya, saat Putri kembali dari luar negeri harus menuju ruang pemeriksaan Bea Cukai, untuk menunjukkan barang serta surat pemberitahuan membawa barang atau bukti ekspor.

#### **FASILITAS CARNET**

Bagi wisatawan yang membawa barang untuk keperluan pribadi juga dapat memanfaatkan fasilitas Carnet. Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara), bersama lebih dari 80 negara telah meratifikasi perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Istanbul tersebut. Di mana dokumen yang dipergunakan layaknya sebuah paspor, dan digunakan sebagai dokumen pabean dalam rangka impor dan ekspor sementara.

Dokumen ATA/ CPD Carnet diterbitkan oleh penerbit dan penjamin Carnet yang berlaku secara internasional dan berlaku selama 12 bulan. Terhadap barang yang menggunakan fasilitas Carnet dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor serta tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk informasi lebih lanjut hubungi kami di BRAVO BEA CUKAI 1500225.

Salam,

Subdit Humas dan Penyuluhan, Dit. PPKC

# UNTUK BUMIKU (KITA MASIH MEMBISU)

oleh: Muhammad Rifki Al Habib

Aku rindu ...  
Aku merindu...  
Aku rindu merindu...  
Aku rindu merindu tak menentu...

Hijaumu pudarkan sepiku yang renta..  
Baumu hangatkanku pada sebuah gerhana..  
Segarmu basahi pagiku lalu ku bahagia..  
Aku rindu daun merah muda di batangmu yang telah tiada...

Bagai bangkai bangau yang haus mati di air telaga..  
Tak tau terbang lalu binasai tertindas oleh lapar dahaga..  
Kurus dan semakin mengkerut tua..  
Mati di permatanya yang tak lagi nyala..

Masih saja hitam kelam gulita..  
Aku terseok merindu lagu lagu cinta..  
Hanya anginmu yang mampu hancurkan duka..  
Saat sejukmu menyelimuti dinginnya neraka..

Aku berlari dan semakin tak bercahaya..  
Gelapmu telah kalahkan hati yang luka..  
Aku tak menentu menanti surga..  
Aku merindu gunung yang hijau ceria..

Aku melihat Mozart dan pianonya di suatu senja..  
Saat itu kau dan aku bersahabat nirwana..  
Aku menyesal mengkhianati rimbunya cinta yang rimba  
Kau menangis dan aku tenggelam tak bertenaga..

Untuk kau bumi ku manja..  
Maafkanku yang buatmu menyerah binasa..  
Aku tak bisa menjaga janji yang fana..  
Aku merindu mu merindu senyum kita..

Aku terjatuh..  
Aku semakin terjatuh..  
Aku semakin terjatuh dan rubuh..  
Aku rubuh pada dinginnya subuh..

# ◆ KICAUAN



**beacukai** Follow

1,268 likes 4w

donsimandalahi Bravo Charlie!  
elishaaginting Terus lanjutkan!  
Semangat dalam melindungi Indonesia!  
👏👏

habibul\_khoir Hidup  
#beacukaimakinbaik

bintang\_jp Ayo Berantas Terus  
Peredaran Narkoba di Indonesia ini  
solam #anakmedan

Log in to like or comment.



**beacukai** Follow

1,330 likes 4w

arintoprabowo Wkwkwk rokok ilegal  
men

chandra\_th @andiagam roko agam  
imams\_24 #BeaCukaiUntukRakyat  
@rohmanutaufiq

jharibowo #stopkokilegal  
reishatrisawidya @jack.cyril siga  
tsabitagladys @beacukaimalang

Log in to like or comment.



**beacukai** Follow

1,234 likes 3w

rwsiburian Jaya selalu  
Indonesia..#beacukaimakinbaik

marwjudasurbakti Kayaknya pengen  
lama di sana nih @har\_gust

zulihendriyanto Mantap Keerreenn  
ryanceka @dimasnuradi mana kau mas?  
katamu badau

rikiyanrestidi Kerja di bea cukai harus  
lulusan STAN ya ? @beacukai

Log in to like or comment.

**Rocky Luntungan** Yth,  
Bagaimana cara bayar Bea Masuk dan Pajak impor atas Barang  
Petumpang?  
Terima kasih  
25 March at 20:20

**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** Langsung ke counter yang ada  
di bandara

Pastikan anda menerima SSPCP sebagai bukti pembayaran anda  
25 March at 20:24

**Rocky Luntungan**  
Thank You  
25 March at 00:19

**Hendra Yang** Pagi direktorat jenderal bea dan cukai...  
Minta penjelasan skdit jika saya blanja HP seharga 10 jutaan 2 unit untuk di  
bawa ke Jakarta apa perlu buat laporan atau gmn pak ?  
27 March at 18:35

**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** Jika hp tersebut Anda bawa,  
maka akan mendapat pembebasan FOB USD250. Atas kelebihanannya  
akan dikenakan bea masuk dan pajak impor. Harap simpan invoice  
dan bukti bayar agar barang tersebut diletakkan berdasarkan nilai  
transaksi. Serta tunjukkan NPWP (jika ada) agar PPh Pasal 22 tidak  
dikenakan 100% lebih bnggl. 🙄  
3 - 27 March at 18:41

**Hendra Yang** Terima kasih penjelasan nya  
27 March at 18:52

**Abu Umar Alfaruq Gultom** Eravo BC, terus lindungi negeri ini.  
30 March at 20:23

# SUKA BEPERGIAN ATAU BELANJA ONLINE DARI LUAR NEGERI SUDAH TAHU ATURANNYA BELUM ?

Jangan lupa lapor  
jika bawa uang tunai atau  
instrumen pembayaran lain  
sejumlah **100 juta rupiah**  
atau lebih !

Pembawaan barang dari  
luar negeri  
yang harganya  
lebih dari **250 USD**  
wajib membayar  
Pajak dan Bea Masuk



Hati-hati  
apabila  
dititipi barang  
oleh orang lain,  
bisa jadi itu  
**NARKOBA** lho..

**YUK KITA BANGUN DAN LINDUNGI NEGERI !!  
UNTUK INDONESIA MAKIN BAIK**

Belanja online  
dari luar negeri  
di atas **FOB 100 USD**  
juga kena Pajak dan  
Bea Masuk ya..

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI



**1500225**

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

**BEA CUKAI**  
Makin Baik  
MENGAWASI & MELAYANI



**DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**

f i t  
@beacukaiRI

